Profil Sawit Rakyat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Tropenbos Indonesia
2020

TROPENBOS INDONESIA

Profil Sawit Rakyat
di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Tropenbos Indonesia
2020

Profil Sawit Rakyat
di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Diterbitkan oleh:

Tropenbos Indonesia, Bogor, Indonesia

Kutipan:

Irawan, U.S., Purwanto, E., 2020. *Profil Sawit Rakyat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*. Tropenbos Indonesia. Bogor.

Pewawancara:

Gusti Suganda
Yulius Yogi
Markolaus Sutopo
Jaswadi
Rahmawati
Yana Buana
Darkono

Editor:

Irene E.W.

Tata letak:

La Ode M. Erwin

Tersedia dari:

Tropenbos Indonesia
Jl. Akasia 1 Blok P1/6 RT.05/RW.05
Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor 6163-Indonesia
www.tropenbos-indonesia.org

Ringkasan Eksekutif

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama Indonesia dan sumber devisa terbesar setelah minyak bumi dan gas alam, mencapai Rp 265 triliun (US $ 16,9 miliar) pada tahun 2018. Indonesia adalah penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi melebihi 51 juta ton pada tahun 2019 (83% crude palm oil, 17% palm kernel oil). Dari hampir 15 juta ha luas perkebunan sawit, sebanyak 55% merupakan perkebunan swasta besar, 41% perkebunan rakyat, dan 4% perkebunan besar milik pemerintah. Seiring berjalannya waktu telah terjadi peningkatan besar-besaran perkebunan rakyat dari hanya 3.000 ha pada 1979 menjadi hampir 6 juta ha pada 2019, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelapa sawit dalam meningkatkan ekonomi Indonesia sebagian berkat dukungan petani sawit mandiri. Sayangnya, luasnya area perkebunan kelapa sawit swadaya tidak diimbangi dengan produktivitas hasil yang tinggi. Rata-rata produksi kelapa sawit perkebunan swadaya di Indonesia pada tahun 2019 adalah 3,2 ton/ha bahkan di Kabupaten Ketapang hanya 2,1 ton/ha, hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perkebunan swasta (4,1 ton/ha) dan perkebunan pemerintah (3,7 ton/ha). Perkebunan kelapa sawit skala kecil juga sangat rentan terhadap berbagai masalah lingkungan, sosial dan hukum sehigga akses ke pasar internasional terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Ketapang. Sehubungan dengan hal tersebut Tropenbos Indonesia (TI) pada tahun 2018 dan Agustus 2019 telah melakukan survei di sembilan desa yang terletak di sub lanskap Simpang Dua (didominasi oleh tanah mineral dan penduduk asli) dan Pematang Gadung (mencakup daerah gambut dalam yang luas dan memiliki populasi pendatang yang besar baru-baru ini), Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Wawancara semi-struktural dilakukan terhadap 145 responden yang mewakili tiga kelompok petani kelapa sawit: (1) Petani swadaya murni (budidaya kelapa sawit dilakukan sendiri tanpa bantuan, sumber dana untuk budidaya berasal dari modal sendiri atau meminjam dari lembaga keuangan), (2) Petani swadaya berbasis koperasi (budidaya kelapa sawit didampingi oleh organisasi manajemen plasma, mendapat pinjaman dari koperasi /BUMDes), (3) Petani plasma (budidaya kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan, mendapat pinjaman dari perusahaan). Analisis deskriptif kualitatif dengan tabulasi distribusi frekuensi dianalisis menggunakan program SPSS release 14.0.1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Seluruh responden memiliki lahan kelapa sawit di lahan milik pribadi, (ii) Sebagian besar petani menanam kelapa sawit secara monokultur, (iii) Asal usul lahan kelapa sawit dikuasai melalui empat cara, yaitu: membeli, hibah/transmigrasi, warisan, dan lahan perkebunan plasma dari perusahaan, (iv) Alasan perubahan penggunaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah: harga kelapa sawit yang lebih tinggi, mengikuti teman/ orang lain, dan sering terjadinya kebakaran, (v) Sebagian besar responden belum memiliki pengetahuan mengenai karakteristik bibit kelapa sawit berkualitas, (vi) Sebagian besar responden melakukan pembukaan lahan dengan cara tebang, tebas, bakar, (vii) Hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berusia > 5 tahun adalah: (a) petani swadaya murni (8,3 ton/ha/tahun), (b) petani swadaya berbasis koperasi (13,2 ton/ha/tahun), dan (c) petani plasma (20,9 ton /ha/tahun), (viii) Masih terbatasnya penerapan praktik pertanian yang baik, (ix) Penjualan dilakukan melalui perantara, (x) Sebagian besar responden tidak mengetahui sertifikasi kelapa sawit. (xi) Masyarakat tradisional umumnya tidak memiliki sertifikat tanah, sertifikat tanah umumnya dimiliki masyarakat transmigrasi, (xii) Harga kelapa sawit yang rendah menyebabkan petani enggan memperluas kebun sawit, (xiii) Sebagian besar sumber pendanaan pengelolaan kelapa sawit berasal dari modal petani sendiri, hanya 6,6% dari dana pinjaman, (xiv) Jumlah petani yang menjadi anggota kelompok tani terbatas, (xv) Minimnya pengetahuan petani tentang pengendalian hama dan penyakit sawit, (xvi) Sebagian besar petani belum pernah menerima pelatihan tentang budidaya kelapa sawit.

Kata Pengantar

Ekspansi kelapa sawit telah dianggap sebagai ancaman utama dan sangat bertanggung jawab atas tingginya laju deforestasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kelapa sawit juga dikatakan sebagai pendorong deforestasi 50% di Kalimantan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang luas telah memberikan dampak yang parah terhadap penurunan jumlah populasi orangutan dan satwa liar lainnya, kawasan hutan yang terfragmentasi telah menciptakan perangkap ekologis, memutus konektivitas ekologis, dan menghancurkan keanekaragaman hayati hutan.

Namun, dengan meningkatnya permintaan global untuk produk minyak sawit dan kontribusi komoditas ini terhadap pendapatan nasional, maka tak terhindarkan dan menjadi sangat menarik bagi banyak investor. Tidak hanya perusahaan skala besar tetapi juga petani mengejar hasil tinggi dan keuntungan finansial yang menguntungkan dari budidaya kelapa sawit.

Hal ini juga terjadi di Lansekap Gunung Tarak (GTL), di mana sejak 2017 hingga saat ini, Tropenbos Indonesia (TI) telah memfasilitasi Organisasi Layanan Masyarakat (OMS) untuk Lobi dan Advokasi (L&A) di bawah Program Aliansi Penghidupan Hijau/Green Livelihoods Alliance Program (GLA). Setelah berkolaborasi untuk upaya konservasi dengan perusahaan kelapa sawit selama bertahun-tahun, Tropenbos Indonesia juga berupaya memfasilitasi peningkatan praktik berkelanjutan dari petani kecil.

Menyadari kontribusi signifikan dari kelapa sawit petani kecil dalam produksi nasional, sementara sejauh ini, dukungan pemerintah dan sektor swasta masih terbatas. Seringkali petani kecil bukan bagian dari rantai pasokan berkelanjutan, menghubungkan akses kepada ketidakadaan pabrik perkebunan besar, dan rentan terhadap kendala keuangan, apalagi menerapkan praktik berkelanjutan dalam produksinya.

Petani kecil perlu menerima informasi tentang praktik pertanian yang baik, memiliki kepedulian yang lebih tinggi untuk keberlanjutan, akses rantai yang lebih kuat ke rantai pasokan dan perdagangan, mematuhi peraturan dan izin yang diperlukan, mendapatkan sertifikasi berkelanjutan, menerima intervensi pada mata pencaharian alternatif yang dapat dikombinasikan dengan budidaya kelapa

sawit, dan menerima fasilitasi pembentukan kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam berurusan dengan pasar dan sumber pembiayaan. Hanya dengan begitu mereka akan kurang rentan untuk dieksploitasi.

Mempertimbangkan rendahnya kapasitas umum petani kecil dan sangat membutuhkan fasilitasi dan bantuan teknis, pada tahun 2019 Tropenbos Indonesia melakukan survey semi struktural di sembilan desa terpilih di Kabupaten Ketapang, baik di lahan gambut dan tanah mineral, yang mencakup tiga kelompok responden petani kecil yaitu: petani swadaya mandiri, petani swadaya berbasis koperasi, dan petani plasma.

Laporan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pemerintah, sektor swasta dan OMS sebagai dasar untuk mengembangkan strategi intervensi untuk meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit. Dengan perkiraan bahwa selama dekade berikutnya petani kelapa sawit akan menggandakan produksi mereka menjadi bagian total dari produksi kelapa sawit di Indonesia, kontribusi pemerintah, sektor swasta dan OMS dalam peningkatan kapasitas tidak akan pernah sia-sia.

Dr. Edi Purwanto
Direktur Tropenbos Indonesia

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif iii
Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar x

Bab 1. Pendahuluan 1
1.1. Sektor kelapa sawit di Indonesia 1
1.2. Tujuan penelitian 3

Bab 2. Keadaan Umum Desa-Desa yang Diteliti 7
2.1. Desa Sungai Pelang 7
2.2. Desa Sungai Besar 10
2.3. Desa Pematang Gadung 14
2.4. Desa Gema 15
2.5. Desa Mekar Raya 19
2.6. Desa Kemora 22
2.7. Desa Batu Daya 24
2.8. Desa Muara Jekak 26
2.9. Desa Teluk Bayur 28

Bab 3. Metode 29
3.1. Pengambilan sampel 29
3.2. Jenis dan sumber data 29
3.3. Analisis data 30

Bab 4. Hasil 31
4.1. Data Responden 31
4.2. Jenis kepemilikan lahan 32
4.3. Karakteristik penggunaan kebun sawit 34
4.4. Pengelolaan kebun sawit mandiri 37
4.5. Pemasaran hasil sawit 48
4.6. Pelatihan dan pembinaan 49
4.7. Modal usaha kebun sawit mandiri 51
4.8. Pendapatan kebun sawit 51

4.9. Kondisi rumah 53
4.10. Keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 54
4.11. Pengetahuan tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan 56
4.12. Peremajaan kelapa sawit (*Replanting*) 56
4.13. Organisasi petani kelapa sawit 57
4.14. Tabungan 58
4.15. Rencana masa depan 58
4.16. Kondisi topografi dan lahan kebun sawit 59
4.17. Perawatan kebun sawit 59
4.18. Konservasi tanah 60
4.19. Pengelolaan air 61
4.20. Defisiensi unsur hara 62
4.21. Hama dan penyakit tanaman sawit 63
4.22. Aksesibilitas 66
4.23. Pendapatan per kapita 67

Bab 5. Pembahasan 69
Bab 6. Kesimpulan 91
Daftar Pustaka 99
Lampiran 102

Daftar Tabel

Tabel 3.1.	Jumlah responden masing-masing desa	29
Tabel 4.1.	Persentase suku asal responden	31
Tabel 4.2.	Persentase jenis pemanfaatan lahan oleh responden di tujuh desa studi	33
Tabel 4.3.	Data luas pemanfaatan lahan	33
Tabel 4.4.	Data jumlah plot, luas kebun, umur, dan jarak ke kebun sawit	36
Tabel 4.5.	Status kepemilikan sertifikat lahan kebun sawit	37
Tabel 4.6.	Daftar harga bibit sawit di lapangan	39
Tabel 4.7.	Jumlah pohon pada penanaman sawit	42
Tabel 4.8.	Harga pupuk	44
Tabel 4.9.	Data pemanenan sawit rakyat	46
Tabel 4.10.	Daftar sumber pendapatan	52
Tabel 4.11.	Sumber pendapatan responden di desa Muara Jekak	53
Tabel 4.12.	Sumber pendapatan responden di desa Teluk Bayur	53
Tabel 4.13.	Kondisi rumah	54
Tabel 4.14.	Areal Bernilai Konservasi Tinggi di sekitar desa	55
Tabel 4.15.	Kondisi kegiatan perawatan kebun sawit	60
Tabel 4.16.	Sumber pendapatan responden	68
Tabel 5.1.	Hasil produksi TBS kebun sawit berumur 5 tahun ke atas	74
Tabel 5.2.	Tingkat Produktivitas Kelapa Sawit Berdasarkan Kesesuaian Kelas Lahan (KKL)	75
Tabel 5.3.	Perkiraan hasil produksi CPO kebun sawit berumur 5 tahun ke atas	76
Tabel 5.4.	Status kepemilikan sertifikat dan sumber peminjaman dana	84

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bentang alam Simpang Dua dan Pematang Gadung dan area fokus dari lanskap ISP 5

Gambar 2.1. Sebaran lokasi desa penelitian 8
Gambar 2.2. Hasil panen buah sawit petani plasma 28

Gambar 5.1. Brondolan yang dikutip oleh tenaga wanita 70
Gambar 5.2. Kegiatan *pruning* (pemangkasan pelepah sawit) 73
Gambar 5.3. Hasil Panen Buah sawit yang diletakan di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) 73
Gambar 5.4. Perbandingan produksi TBS pada tiga pola pengelolaan sawit 77
Gambar 5.5. TBS Segar 78
Gambar 5.6. Faktor penentu produktivitas CPO 79
Gambar 5.7. Kegiatan Loading buah sawit untuk dijual ke pengepul 81

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Sektor kelapa sawit di Indonesia

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan andalan Indonesia yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai penyumbang devisa terbesar selain minyak dan gas, yaitu mencapai Rp 265 triliun (BPS, 2018). Hingga saat ini Indonesia dikenal sebagai negara produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar dunia. Data Direktorat Jenderal Perkebunan (2019) menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 51,44 juta ton yang terdiri dari minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) sebesar 42,87 juta ton (83,3%) dan minyak inti sawit (Palm Kernel Oil) sebesar 8,57 juta ton (16,7%). Produksi kelapa sawit tersebut diekspor ke berbagai negara, dimana India, Uni Eropa, dan Tiongkok merupakan tiga negara pengimpor terbesar minyak sawit Indonesia. Selain itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga tahun 2019 juga telah melibatkan petani sebanyak ± 2.740.749 orang dan menyerap tenaga kerja ± 4.526.713 orang.

Tingginya produksi minyak kelapa sawit di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan minyak nabati di dalam negeri serta besarnya potensi ekspor minyak kelapa sawit/crude palm oil (CPO). Minyak sawit sangat disukai sebagai bahan baku industri karena tersedia dalam jumlah yang besar dan harga yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak jagung (Manggabarani, 2009; Teoh, 2012). Kondisi ini telah memicu pesatnya pertumbuhan luas kebun sawit di Indonesia, dimana pada tahun 1970 luas kebun kelapa sawit hanya 133.298 ha, kemudian tahun 2019 telah meningkat pesat mencapai 14.677.560 ha yang terdiri dari: (i) Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 8.085.134 ha (55,1%) dengan produksi sawit sebesar 25.927.589 ton (60,5%), (ii) Perkebunan Rakyat (PR) seluas 5.958.502 ha (40,6%) dengan produksi sawit sebesar 14.846.112 ton (34,6%), dan (iii) Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 633.924 ha (4,3%) dengan produksi sawit sebesar 2.095.457 ton (4,9%) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Sekitar 71,8% produksi kelapa sawit di Indonesia tersebut diperoleh dari enam provinsi produsen kelapa sawit terbesar, yaitu: (1) Riau sebesar 8.864.883 ton (20,7%), (2) Kalimantan Tengah sebesar 6.279.857 ton (14,6%), (3) Sumatera Utara sebesar 5.623.054 ton (13,1%), (4) Sumatera Selatan sebesar 3.767.108

ton (8,8%), (5) Kalimantan Timur sebesar 3.164.793 ton (7,4%), dan (6) Kalimantan Barat sebesar 3.095.601 ton (7,2%), sedangkan sisanya sebesar 28,2% diperoleh dari provinsi lainnya.

Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) kelapa sawit sudah ada sejak tahun 1970, sedangkan Perkebunan Rakyat (PR) mulai dibangun tahun 1979 dengan luas hanya 3.125 ha dan mulai berkembang tahun 1980-an ditandai dengan adanya pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang selanjutnya berkembang menjadi berbagai bentuk pola kemitraan, antara lain: Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), kemitraan melalui program revitalisasi perkebunan, dan kemitraan yang dikembangkan oleh Perkebunan Besar Swasta untuk kelapa sawit (IFC, 2013).

Seiring berjalannya waktu perkebunan sawit rakyat semakin bertambah luas hingga mencapai 5.958.502 ha atau 40,6% dari total luas sawit di Indonesia pada tahun 2019, dimana dari jumlah tersebut selama dua dekade terakhir perkebunan swadaya memiliki porsi lebih besar hingga 70% dari luas areal perkebunan rakyat kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelapa sawit dalam meningkatkan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya dalam peningkatan produksi kelapa sawit. Namun sayangnya areal perkebunan sawit rakyat yang begitu luas belum diimbangi oleh produktivitas sawit yang tinggi. Data Statistik Kelapa Sawit 2017-2019 menunjukkan bahwa rata-rata produksi kelapa sawit pada perkebunan rakyat di Indonesia tahun 2019 hanya 3,2 ton/ha, hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil sawit dari perkebunan swasta (4,1 ton/ha) maupun perkebunan negara (3,7 ton/ha). Rendahnya produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat secara merata terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Hasil studi International Finance Corporation (IFC) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa perkebunan rakyat kelapa sawit swadaya memiliki produktivitas 40% lebih rendah dari skenario Good Agricultural Practices (GAP) bagi Perkebunan Rakyat dan 116% lebih rendah dari skenario GAP perusahaan. Sementara itu, petani yang bermitra dengan perusahaan memiliki produktivitas 6% lebih rendah dari skenario GAP bagi perkebunan rakyat dan 46% lebih rendah dari skenario GAP oleh perusahaan (Daemeter, 2015).

Di sisi lain, perkebunan rakyat kelapa sawit sangat rentan menghadapi berbagai isu lingkungan, sosial, dan legalitas yang dapat menghambat akses ke pasar internasional. Haryadi (2019) menyebutkan isu lingkungan yang terjadi antara lain: (i) Adanya kampanye negatif, (ii) Undang-Undang Delegasi Uni Eropa tentang pelarangan minyak kelapa sawit sebagai biofuel tahun 2030 yang akan digantikan oleh energi terbarukan ramah lingkungan, dan (iii) Deforestasi kawasan hutan. Berbagai isu tersebut tentu menyebabkan terjadinya diskriminasi dan hambatan baik terkait tarif maupun non tarif dari Uni Eropa, seperti pajak lingkungan maupun sertifikasi sawit berkelanjutan yang mensyaratkan produk

ramah lingkungan dan ramah sosial, hal ini sebagai salah satu cara untuk menjamin konsumen bahwa produk kelapa sawit diproduksi secara lestari. Khusus isu sawit berkelanjutan tersebut maka pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 telah mengeluarkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), meskipun sertifikasi ini dinyatakan belum cukup untuk dapat diakui oleh Uni Eropa. Untuk produk-produk makanan dan non makanan dari minyak sawit yang ditujukan ke pasar Eropa mereka menerapkan sistem sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lokasi pengembangan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat. Di kabupaten ini hanya terdapat Perkebunan Sawit Swasta Nasional dan Perkebunan Sawit Rakyat. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa luas total perkebunan rakyat kelapa sawit di Kabupaten Ketapang sekitar 87.522 ha dan produksi minyak sawit (CPO) sebesar 157.095 ton dengan jumlah petani yang terlibat sebanyak 22.647 orang. Sebagaimana kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat, maka produksitivitas perkebunan rakyat kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Ketapang juga menunjukkan hasil yang rendah (2,1 ton/ha), lebih rendah dari produksi perkebunan sawit rakyat di Provinsi Kalimantan Barat (2,2 ton/ha), apalagi dibandingkan dengan produktivitas perkebunan rakyat kelapa sawit di tingkat nasional (3,2 ton/ha) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam menjadikan perkebunan rakyat kelapa sawit sebagai salah satu kontributor produktivitas sawit di Indonesia dimana dengan jumlah petani sawit yang mencapai 2,7 juta orang di tahun 2019, dapat berdampak signifikan dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah studi untuk mengetahui karakteristik dan status perkebunan rakyat kelapa sawit di Kabupaten Ketapang sebagai salah satu pendukung produktivitas kelapa sawit Indonesia.

1.2. Tujuan penelitian

Program The Green Livelihoods Alliance (GLA) adalah program kolaboratif antara Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri di Belanda. Program lima tahun ini (2016-2020) dilaksanakan di sembilan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia di mana Yayasan Tropenbos Indonesia (TI) adalah salah satu fasilitator program utama di mana area fasilitasi terletak di Lanskap Gunung Tarak, Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang telah mengalami perubahan lanskap yang cukup besar selama tiga puluh tahun terakhir. Sementara kegiatan ekonomi meningkat dengan pesat, kedua Kabupaten tersebut juga mengalami kebakaran hutan dan lahan yang parah serta degradasi lingkungan.

Program GLA menetapkan 6 (enam) **Outcome**: (1) Perencanaan tata ruang menjadi lebih adil dan berkelanjutan; (2) Pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan LSM mengkoordinasikan intervensi dan investasi pada tingkat lanskap; (3) Petani kelapa sawit mengelola konsesi mereka secara berkelanjutan, sementara pedagang / pembeli melakukan perdagangan berkelanjutan; (4) Masyarakat melindungi dan memanfaatkan hutan untuk mata pencaharian lokal yang berkelanjutan; (5) Masyarakat lokal memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan; (6) LSM berkontribusi terhadap pembangunan pertumbuhan hijau dan berkomitmen untuk mengimplementasikan tindakan kolaboratif.

Untuk mencapai Outcome 3, dalam rancangan dan fase awal program GLA (2016 dan 2017), fokusnya pada perbaikan kelestarian rantai pasok kebun sawit besar. Hambatannya, walaupun acuan standar keberlanjutan telah ditetapkan dalam standar internasional dan peratuan perundangan nasional, proses pelaksanaan di tingkat lapangan (manajemen unit) umumnya lebih ditentukan oleh keputusan manajemen di Jakarta, bahkan di luar Indonesia. Keputusan di tingkat lapangan lebih dikontrol dari manajemen pusat daripada oleh pengelola perkebunan di tingkat tapak, sedangkan rantai pasok juga banyak ditentukan melalui transaksi bisnis ke bisnis. Kemudian dengan diberlakukannya moratorium pada tahun 2018, kecil kemungkinan ada ijin baru perkebunan besar.

Namun, sementara perusahan sawit besar memiliki pengawasan yang memadai terhadap perkebunan mereka sendiri tetapi jangkaun TI terbatas untuk mempengaruhi rantrai pasoknya, pabrik juga membeli dari petani sawit mandiri. Perkebunan kelapa sawit mandiri seringkali berkembang begitu ada akses ke pabrik dan ekspansi ini jauh lebih sulit dikendalikan daripada ekspansi perusahaan karena banyaknya plot kecil dan aktor yang terlibat. Sementara dampak per individu terbatas, tetapi dampak petani sawit mandiri dalam skala lanskap cukup berarti.

Untuk meningkatkan penggunaan lahan berkelanjutan di wilayah proyek dan saat ini kurangnya dukungan untuk petani sawit mandiri (independent smallholder plantation), TI mengalihkan target fasilitasi dari sawit besar ke sawit mandiri. Meskipun target bergeser dan karena itu kegiatan sedikit ditunda, tujuannya tetap sama, meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan kelapa sawit, pengembangan inklusif dan perlindungan lingkungan.

Untuk memahami profil umum perkebunan rakyat di Ketapang, pada tahun 2018, TI melakukan penelitian di Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai dan Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, hasilnya telah dipublikasikan pada Purwanto, E., Tjawikrama, D., 2019. *The role of village assemblies in overcoming barriers to smallholder inclusiveness: examples from Indonesia*, in: ETFRN News 59, Exploring

inclusive oil palm production, Wageningen. Pada akhir 2018, TI telah dengan tegas berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas sektor kelapa sawit petani swadaya dan memilih dua sub-lanskap di Kabupaten Ketapang dimana perkebunan kelapa sawit petani swadaya (ISP) telah berkembang tetapi dengan lingkungan fisik dan sosial yang berbeda.

Sub-bentang alam yang dipilih (lihat Gambar 1) terletak di Kecamatan Simpang Dua, yang memiliki sebagian besar tanah mineral dan penduduk asli, dan bentang alam Pematang Gadung yang meliputi daerah gambut dalam yang besar dan memiliki populasi migran besar baru-baru ini. Selanjutnya, sebuah studi komprehensif dilakukan selama 2019 di tujuh desa (Pematang Gadung, Sungai Pelang, Sungai Besar, Gema, Mekar Raya, Kemora dan Batu Daya) sebagai dasar untuk mengembangkan intervensi yang layak di dua sub-lanskap yang berbeda.

Laporan ini membahas temuan-temuan utama dan wawasan tentang perkebunan kelapa sawit petani kecil di sembilan desa di Kabupaten Ketapang berdasarkan pada pengolahan data dan analisis wawancara semi-struktur terhadap 145 orang petani.

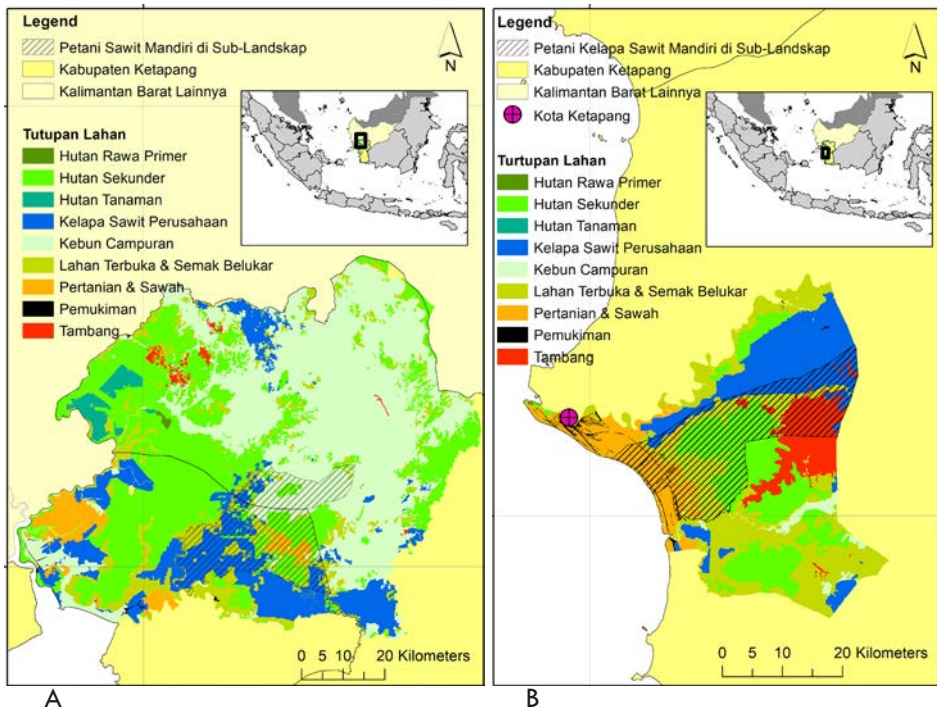

Gambar 1.1. Bentang alam Simpang Dua (A) dan Pematang Gadung (B) dan area fokus dari lanskap ISP (Purwanto dan Jelsma, 2020)

Bab 2. Keadaan Umum Desa-Desa yang Diteliti

2.1. Desa Sungai Pelang

Desa Sungai Pelang, merupakan desa terluas yang berada di Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan luas wilayah ± 150.000.000 m² (BPS 2018:323,30 Km2) yang terdiri dari lokasi ladang/sawah (60%), kebun sawit mandiri (2%), kebun non sawit (5%), semak belukar (5%), pemukiman (5%), lahan hutan (5%), dan Area perusahaan perkebunaan sawit (18%) (sumber: data desa).

Desa Sungai Pelang berbatasan dengan::
a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Negeri Baru, desa Mekar Utama, desa Sungai Jawi
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sungai Besar
c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sungai Melayu Rayak
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata

Desa Sungai Pelang memilki 5 dusun yaitu: Dusun Segak, Dusun Parit Berdiri, Dusun Pelang Kecil, Dusun Kanalisasi, dan Dusun Rawasari. Penduduk di Desa Sungai Pelang sebanyak 1.550 KK dengan 5.283 jiwa (BPS, 2018). Sebanyak 45% mayoritas penduduknya adalah Suku Melayu dan sebagian lainnya merupakan Suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, dan keturunan Cina. Sebagian besar Penduduk Desa Sungai Pelang bermata pencarian sebagai petani (baik itu menggarap lahan sendiri maupun menggarap lahan sewaan). Petani sawah sebanyak 80%, pekebun sebanyak 10%, nelayan sebanyak 5%, dan mata pencaharian lainnya sebanyak 5%. Nelayan Desa Sungai Pelang umumnya adalah nelayan kecil dengan alat tradisional yang sederhana.

Kegiatan pertanian

Pada umumnya masyarakat Desa Sungai Pelang masih menggunakan api untuk membersihkan lahan karena dinilai lebih murah. Penggunaan api dilakukan dengan sitem sekat bakar atau dengan cara mengumpulakan jerami, ranting-ranting, atau dedaunan ke suatu spot untuk kemudian dibakar. Mayoritas lahan pertanian masyarakat merupakan hak milik pribadi. Kepemilikan lahan ada yang diperoleh secara turun-temurun, adapula yang mendapatkan jatah dari pemerintah melalui program transmigrasi. Produksi padi rata-rata 5 ton/ha. Kendala dalam pertanian padi adalah kesulitan memperoleh sumber air. Selain padi, masyarakat juga menanam sayur-sayuran, serta budidaya nanas dan buah naga (terutama dilakukan oleh masyarakat transmigrasi).

Tidak ada istilah "**tembawang**" dalam tatanan masyarakat Desa Sungai Pelang. Terdapat Hutan Desa dengan luas sekitar lebih kurang 600 ha. Potensi hutan adalah kayu.

Gambar 2.1. Sebaran lokasi desa penelitian

Pembangunan "kanal negeri baru-pematang gadung"

Kanal Negeri Baru-Pematang Gadung yang menghubungkan Sungai Pawan dan Sungai Pesaguan,melewati 4 desa yaitu Desa Negeri Baru, Desa Sungai Pelang, Desa Sungai Besar, dan Desa Pematang Gadung. Kanal ini merupakan akses transportasi utama pada saat itu dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Akses jalan dan listrik

Akses jalan mulai mendapat perhatian pemerintah pada tahun1980-an. Listrik mulai masuk desa pada tahun 1990-an.

Sejarah desa

Desa Sungai Pelang diperkirakan sudah ada sejak zaman pemerintahan Kerajaan Matan. Kala itu desa disebut "kampung", dikepalai oleh seorang kepala kampung

yang disebut “Kebayan”. Nama Sungai Pelang berasal dari sebuah kapal Sultan Matan Tanjung Pura yang bernama Lancang Pelang.

Program transmigrasi

Pada tahun 1970-an pemerintah mengadakan program transmigrasi gelombang I di Desa Sungai Pelang. Hal ini berpengaruh terhadap keadaan penduduk, adat istiadat, serta pembukaan lahan baru bagi warga transmigrasi. Program transmigrasi bepengaruh pula terhadap sektor pertanian, jenis komoditi yang ditanam, serta teknologi pertanian. Program Transmigrasi gelombang II dilaksanakan tahun 2012, hal ini berpengaruh terhadap; (i) Pembukaan lahan gambut secara besar-besaran oleh pemerintah sebagai daerah pemukiman baru bagi para transmigran, (ii) Akses ke areal gambut, (iii) Adanya aktivitas masyarakat di areal gambut, (iv) Adanya pemukiman dan kebun transmigran di areal gambut.

Kebakaran besar pernah terjadi pada tahun 2015 dimana hampir semua gambut berada di sekitar jalan Pelang-Tumbang Titi terbakar. Kebakaran menghabiskan perkebunan masyarakat dan menyebabkan kerugian. Sejak tahun 2015 hingga 2018, hampir setiap tahun terjadi kebakaran di areal gambut Sungai Pelang.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa

Perkebunan sawit mulai masuk ke Desa Sungai Pelang pada tahu 1997. Di Desa Sungai Pelang terdapat 2 perusahan perekbunan Kelapa Sawit, yaitu PT ARTU Plantation dan PT Limpah Sejahtera. PT Limpah Sejahtera memegang HGU seluas 6.000 ha di Desa Sungai Pelang yang merupakan areal gambut dan membangun kebun plasma seluas 1200 ha untuk masyarakat Desa Sunga Pelang. Pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh Koperasi Pelang Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 1401 orang. Masih sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Masyarakat mulai menanam sawit secara mandiri pada tahun 2000-an. Varietas yang ditanam pada umumnya jenis marihat dan longsum.

Nilai-nilai tradisi yang masih terjaga

Budaya gotong-royong masih terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari kebersamaan dalam acara pernikahan, kematian, pengajian, maupun dalam aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Tokoh masyarakat dan tokoh agama masih berperan sebagai motivator dalam masyarakat.

Konflik lahan

Pernah terjadi konflik lahan antara masyakat namun dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat di tingkat desa. Konflik yang pernah terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan perusahan terkait ganti rugi lahan.

2.2. Desa Sungai Besar

Informasi dasar desa

Desa Sungai Besar berada di Kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan luas total 116.728 ha (data BPS 2018: 28.20 km2). Desa ini memiliki penduduk sebanyak 4013 jiwa dari 1.127 KK yang tersebar di 5 dusun dan 22 RT, yaitu Dusun I Kalimas, Dusun II Sawah Rendam, Dusun III Sungai Sirih, Dusun IV Kanalisasi, dan Dusun V Transmigrasi. Pusat desa berada di Dusun I Kalimas. Sebanyak 45% adalah suku madura, 35% suku melayu 11% suku cina, 8% suku Jaya, selain itu juga dihuni oleh kurang dari 1% suku Dayak, Bugis dan Banjar. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian 80% adalah petani, 5% pedagang,3% nelayan, 2% PNS. Tingkat pendidikan penduduk sarjana 5%, SMA 35%, SMP 30%, SD 20% dan tidak sekolah 10%. Komoditas utama yang ada di desa adalah padi, komoditas sampingan adalah sawit, sayur, karet, dan kelapa.

Kegiatan pertanian

Sebagian besar masyarakat Desa Sungai Besar masih menggunakan api untuk membersihkan lahan, membersihkan sisa pohon, membersihkan sisa-sisa ranting, daun, gulma dengan harapan untuk mendapatkan abu, penggunaan api juga dinilai dapat mengusir hama dan mengurangi keasaman tanah. Mereka membakar dengan skala kecil pada spot tertentu, masyarakat lokal sering menyebutnya dengan istilah “manduk” atau “mungguk” yaitu membakar dengan cara mengumpulkan ranting-ranting, daun-daun, atau jerami kemudian dibakar.

Lahan Masyarakat Desa Sungai Besar berstatus sebagai lahan milik sendiri, ada lahan yang sudah bersertifikat adapula yang masih dalam proses sertifikasi. Asal usul kepemilikan lahan pertanian, mayoritas warga mendapat lahan pertanian dari warisan secara turun-temurun, ada pula yang didapat dengan cara membeli kepada warga lainnya serta ada yang mendapatkan lahan dari pemerintah melalui Program Transmigrasi (seluas 2 ha/KK). Lahan-lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Komoditi yang diusahakanantara lain sawit, karet, cabai, nanas, ubi kayu, kacang-kacangan, dan padi. Pola tanam yang digunakan oleh masyarakat adalah dengan sistem polikultur (pola tanam campur dan tumpang sari) seperti karet-nanas, sawit-nanas, cabai-kacangan-kacangan-ubi kayu.

Sebagian masyarakat mulai menanam sawit sejak tahun 2012/2013 dengan varietas yang ditanam adalah Matihat dan Longsum. Produksi sawit untuk saat ini rata-rata berkisar antara 0,5-0,8 ton/ha/sekali panen. Rata-rata sawit dipanen sebanyak 2 kali dalam sebulan. Harga sawit berkisar antara Rp550,00 – Rp1.100,00/kg. Sawit dibeli langsung oleh pedagang atau pengepul yang datang langsung ke desa.

Masyarakat Desa Sungai Besar ada juga yang berbudidaya karet dengan rata-rata produksi 10-13kg/ha/hari. Ada dua jenis produk olahan latex yang dihasilkan oleh petani yaitu bentuk balok dan bentuk mangkok. H arga jual latex berkisar antara Rp5.000,- hingga Rp8.000,-/kg. Di antara tanaman karet masyarkat juga menanam nanas dengan sistem tumpang sari. Nanas merupakan komditi yang cukup menjanjikan bagi masyakat dimana cara penanaman dan mendapatkan bibitnya mudah, hargabibitnya juga relatif murah (Rp.1000,-/bibit) dengan harga jual mencapai Rp 2.500,- hingga Rp 3.000,-/buah. Petani menjual langsung buah nanas kepada "peraih" atau pedagang yang datang langsung ke petani.

Masyarakat juga menanam padi, dimana padi ditanam di luar lahan gambut. Tanaman padi yang ditanam oleh warga adalah varietas unggul jenis Inpara 10 dan Argo 70 yang ditanam 2-3 kali dalam setahun dengan hasil kira-kira 4-5 ton/ha/musim tanam. Selain padi unggul, ada juga petani yang menanam varietas lokal jenis umbung serai dengan masa tanam 1 kali dalam setahun. Hasil pertanian padi dijual dalam bentuk beras dengan harga berkisar Rp. 8.000,00 – Rp. 10.000,00/kg. Selain padi masyarakat juga menanam cabai, ubi kayu, dan sayur-sayuran di sekitar pematang sawah. Cabai dijual dengan harga berkisar antara Rp 60.000,00- Rp 80.000,00/kg, sedangkan ubi kayu dijual dengan harga berkisar antara Rp 550,00-Rp 1.500,00/kg. Kegitan ekonomi lain selain dari sektor pertanian dan perkebunan adalah usaha sarang burung walet, warung sembako atau jualan saprodi, peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan kambing dan nelayan. Sarana dan Prasarana yang ada di desa ini adalah sekolah yaitu SD (4 buah), SMP (1 buah), SMA (2 buah), dan paud (5 buah), sarana kesehatan puskesmas (1 buah), dan pustu (1 buah). Tidak terdapat pasar di desa ini.

Akses jalan dan listrik

Desa Sungai Besar dilalui oleh jalan utama Ketapang-Pesaguan di mana jalan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat sekitar dan masyarakat hulu. Masyarakat dari Hulu Sungai Pesaguan seperti dari Tumbang Titi dan sekitarnya menggunakan jalan ini sebagai jalan utama. Mereka menggunakan transportasi air sungai Pesaguan kemudian dari Pesaguan Kanan mereka lanjutkan jalan kaki melalui jalan Ketapang-Pesaguan. Jalan ini diperkirakan sudah ada sejak jaman kerajaan Matan. Jalan mulai mendapat perhatian pemerintah sejak tahun 1980-an. Kondisi jalan 70% beraspal dan 30% adalah tanah. Listrik mulai masuk ke Desa Sungai Besar sejak tahun 1990-an. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya listrik yang secara otomatis berpengaruh pula terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat. Tempat meminjam uang yang tersedia di desa adalah Bank, kelompok simpan pinjam, pedagang/ pengumpul, keluarga, petani lain/tetangga dan warung.

Sejarah desa

Desa terbentuk sejak jaman penjajahan Belanda. Desa Sungai Besar diperkirakan sudah ada sejak tahun 1938. Desa Sungai Besar bukan merupakan desa hasil pemekaran desa lainnya, namun Desa Sungai Besar sudah ada sejak zaman Kerajaan Matan. Dulu desa disebut"kampung" dan dikepalai oleh seorang kepala kampung. Suku yang pertama hadir di desa ini adalah Suku Melayu. Sistem kepemilikan lahan di desa ini adalah hak milik. Kepemilikan lahan berasal dari warisan kemudian diperjualbelikan, ada pula dari pembagian pemerintah desa dengan pengaplingan. Terdapat pula orang luar desa yang memiliki lahan di desa ini dengan jual membeli secara pribadi dan sepengetahuan pemerintah desa. Terdapat kejelasan batas lahan kawasan hutan dan lahan di luar kawasan hutan.

Program transmigrasi

Pada tahun 1970-an pemerintah mengadakan program transmigrasi pertama di Kabupaten Ketapang. Desa Sungai Besar merupakan salah satu desa tujuan transmigrasi tersebut. Tentu dengan adanya program transmigrasi ini, juga berpengaruh terhadap keadaan penduduk serta pengetahuan bertani bagi penduduk lokal. Terdapat sharing pengetahuan yang diberikan oleh penduduk pendatang terhadap penduduk lokal terkait teknologi pertanian, hal ini berpengaruh pula terhadap jenis komoditi yang ditanam oleh penduduk lokal misalnya jenis varietas padi, tanaman buah-buahan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2012 Pemerintah kembali mengadakan program Transmigrasi di Sungai Besar. Program ini merupakan awal dari pembukaan lahan gambut secara besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keadaan alam di sekitar, di mana hutan gambut mulai terbuka. Pemerintah secara masif membuka parit-parit jumbo di areal gambut, alhasil gambut mulai mengering. Demikian juga masyarakat mulai gencar beraktivitas di areal gambut. Pola pembukaan lahan dengan sistem tebang, tebas, bakar kerap dilakukan oleh masyarakat karena dianggap murah dan praktis. Puncaknya pada tahun 2014-2015 terjadi kebakaran besar yang terjadi di beberapa desa sekitar. Keberadaan masayarakat Trans ini juga berpengaruh terhadap keadaan penduduk desa serta pola pertanian/perkebunan dan jenis komoditi yang diusahakan.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa

Terdapat 400 Kepala Keluarga (KK) yang membuka kebun sawit mandiri di desa ini dengan luas total 1100 ha. Pembukaan kebun sawit terjadi tahun 2014. Masyarakat beralih ke sawit dengan alasan menjamin kehidupan. Tidak terdapat masyarakat yang membangun sawit dengan membuka hutan sekunder bekas HPH namun dengan mengkonversi kebun yang telah dimiliki . Kebun sawit di desa ini dikelola sendiri-sendiri. Tidak terdapat kelompok tani sawit/ koperasi sawit di desa ini. Kebun sawit tersebut dapat diperjualbelikan, tidak terdapat aturan dan

lembaga lokal yang mengaturnya. Desa ini tidak menjadi wilayah konsensi kebun sawit.

Di Desa Sungai Besar belum ada konsesi perusahan sawit. Kebun yang ada merupakan sawit mandiri atau sawit rakyat. Masyarakat Desa Sungai Besar mulai aktif menanam sawit sejak tahun 2012/2013 karena tergiur oleh harga yang mahal dan menjanjikan. Varietas sawit yang ditanam oleh masyarakat adalah mayoritas varietas "marehat" dan "longsum".

Tradisi masyarakat dalam melakukan pembakaran, masyarakat sudah paham dengan sekat bakar, tidak ada tradisi yang menonjol. Desa tidak pernah mendengar istilah ISPO/RSPO menurut narasumber namun Desa mengetahui NKT/HCV.

Nilai-nilai tradisi yang masih terjaga

Nilai-nilai yang masih terjaga di masyakat Desa Sungai Besar adalah budaya gotong-royong. Aktivitas gotong royong masih berjalan dengan baik yang rutin dilaksanakan setiap Jum'at atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kegiatan gotong-royong yang dilaksanakan antara lain pembersihan lahan, parit, rumah ibadah, makam dan lain-lain.

Untuk kegiatan pertanian gotong royong dikenal dengan istilah "Jenjurokan". Jenjurokan merupakan ciri khas masyarakat lokal di mana sitem ini merupakan sistem yang diwariskan oleh leluhur. Dalam sistem jenjurokan masyarakat akan bekerja secara gotong-royong secara bergilir, misalnya membersihkan lahan si A kemudian pada hari berikutnya membersihkan lahan si B, dst. Jenjurokan ini biasa dilakukan pada saat pembersihan lahan, pembukaan lahan, penamanan, dan pemanenan. Jenjurokan dalam usaha tani sawit biasa dilakukan untuk pembibitan (seperti mengisi polibag), penebasan, dan penanaman.

Hasil hutan/Tembawang

Beberapa orang masyarakat masih mengambil kayu dari hutan untuk dipergunakan sendiri maupun dijual sebagai bahan bangunan baik untuk rumah tinggal maupun untuk bangunan sarang burung walet dan untuk keperluan lainnya. Desa Sungai Besar memiliki potensi hasil hutan nonkayu berupa rotan sebagai bahan baku kerajinan tangan. Menurut penuturan warga dulu pernah ada usaha kerajinan tangan rotan namun usaha tersebut kini sudah tidak berjalan lagi karena terkendala sulitnya pemasaran,sehingga produk yang dihasilkan tidak terjual.

Hasil Tembawang seperti durian, cempedak, dan hasil buah-buahan hutan lainnya tidak ada di Sungai Besar karena karakteristik hutan Desa Sungai Besar sendiri berada di areal bergambut dimana tanaman-tanaman tersebut tidak terdapat di hutan gambut.

Konflik lahan

Konflik lahan yang terjadi adalah konflik lahan yang ada di perbatasan, di batas Desa Sungai Besar dengan desa tetangga seperti Desa Sungai Bakau, Sungai Pelang, Pematang Gadung dan Sungai Melayu Raya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara warga Desa Sungai Besar yang berlahan di areal perbatan dengan desa tetangga. Salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya bercerita tentang salah satu penyebab kebakaran yang pernah terjadi adalah dipicu oleh sengketa lahan di perbatasan Desa Sungai Bakau. Pernah terjadi konflik/ perselisihan paham/pertengkaran yang berhubungan dengan kepemilikan lahan tahun 2016 yaitu antara masyarakat dengan luas lahan yang di sengketakan ± 500 ha. Hingga saat ini belum terselesaikan. Penyebab terjadinya konflik adalah batas desa, yang terlibat dalam konflik tersebut adalah masyarakat, LPHD dan pemerintah desa.

2.3. Desa Pematang Gadung

Desa Pematang Gadung berada di Kecamtaan Matan Hilir Selatan dengan luas wilayah 138.20 km2 (BPS, 2018). Desa Pematang Gadung. Desa ini memiliki 4 dusun (Dusun Sungai Buluh, Dusun Sungai Dungun, Dusun Tanjung Pura, dan Dusun Dayak Putus) dan 16 RT , di mana pusat desa berada di Dusun Sungai Dungun. Jumlah penduduk Desa Pematang Gadung ± 800 KK dengan 2.340 jiwa. Suku yang mendiami wilayah ini didominasi Melayu, dan beberapa suku Madura, Cina, Jawa dan Dayak. Komoditas utama adalah padi, komoditas sampingan adalah sawit, kelapa, ikan dan tambang emas. Di Desa Pematang Gadung tidak terdapat transmigran. Sarana dan prasarana yang ada di desa ini adalah sekolah yaitu SD dan SMP, sarana kesehatan puskesmas dan bidan desa, kondisi jalan beraspal. Tidak terdapat pasar di desa ini, namun kadang-kadang ada pembeli yang datang ataupun menjual ke pasar di Pesaguan. Di Desa ini tidak tersedia lembaga keuangan.

Sejarah desa

Desa Pematang gadung terbentuk tahun 1981. Suku yang pertama hadir di desa ini adalah suku Melayu. Faktor yang membuat suku/masyarakat mendiami desa ini adalah karena nyaman serta sumber daya alam yang melimpah. Awal pembukaan lahan di desa ini adalah areal perladangan dan pemukiman. Sistem kepemilikan lahan di desa ini dimiliki secara pribadi/hak milik. Kepemilikan lahan berasal dari pembukaan lahan untuk areal pertanian. Terdapat pula orang luar desa yang memiliki lahan di desa ini dengan jual beli secara pribadi dan diketahui oleh pemerintah desa. Batas lahan kawasan hutan dan lahan di luar kawasan hutan tidak begitu jelas.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa
Terdapat 14 Kepala Keluarga (KK) yang membuka kebun sawit mandiri di desa ini dengan luas total ± 100 ha. Pembukaan kebun sawit terjadi tahun 2002. Masyarakat beralih ke sawit dengan alasan panen cepat dan tergiur oleh harga sawit. Tidak terdapat masyarakat yang membangun sawit dengan membuka hutan sekunder bekas HPH, namun mereka melakukannya dengan mengkonversi kebun dan belukar yang telah dimiliki mereka. Kepemilikan kebun sawit adalah milik sendiri. Kebun sawit d idesa ini dikelola sendiri-sendiri. Tidak terdapat kelompok tani sawit/koperasi sawit di desa ini. Kebun sawit tersebut dapat diperjualbelikan, tidak terdapat aturan dan lembaga lokal yang mengaturnya, dengan kesepakatan para pihak dengan surat jual beli. Desa ini tidak menjadi wilayah konsensi kebun sawit.

Terdapat nilai tradisi yang masih hidup dalam kegiatan tebas bakar. Tradisi masyarakat dalam melakukan pembakaran adalah membakar dengan sekat bakar. Tradisi yang masih hidup hingga sekarang adalah Jenjarokan. Menurut narasumber, Desa Pematang Gadung tidak pernah mendengar istilah ISPO/RSPO maupun NKT/HCV. Di Desa ini juga belum terdapat sawit korporasi.

Konflik lahan
Pernah terjadi konflik/perselisihan yang berhubungan dengan kepemilikan lahan terkait dengan batas tanah dan selalu ada dengan skala kecil yaitu antara masyarakat dengan masyarakat dengan luas lahan yang disengketakan tidak lebih dari 2 ha. Penyelesaian konflik dilakukan dengan musyawarah mufakat. Penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan paham soal tapal batas, yang terlibat dalam konflik tersebut adalah masyarakat lokal.

2.4. Desa Gema

Desa Gema berada di Kecamtan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 178.18km2 (BPS, 2018). Desa Gema memiliki 3 dusun dan 22 RT , yaitu Dusun Gerai Kiri, Dusun Gerai Kanan, dan Dusun Mantuk. Pusat desa berada di dusun Gerai Kanan. Komoditas utama adalah karet, padi kayu, madu, rotan, rebung, sawit, dan buah-buahan. Komoditas sampingan adalah anyam-anyaman rotan, bambu. Penduduk desa menanam padi hanya untuk dikonsumsi sendiri karena kapasitas panen tidak mencuckupi untuk dijual melainkan hanya cukup untuk dikonsumsi. Selain komoditas tersebut ada juga beberapa warga yang mendirikan bangunan burung walet dan menjadikan sarang burung walet sebagai komoditas.

Penduduk di Gema sebanyak ± 492 KK dengan 1892 jiwa. Suku yang mendiami desa ini adalah Dayak, Melayu, dan Cina. Suku atau penduduk asli Desa Gema adalah Suku Dayak dan menjadi penduduk mayoritas di Desa Gema. Selain Suku

Dayak ada pula penduduk pendatang, yaitu Suku Flores, Melayu, dan Cina. Suku Dayak yang merupakan penduduk asli Desa Gema, diperkirakan berasal dari daerah Sukadana,yaitu penduduk Dayak Sukadana yang menolak masuk Islam dan memilih beralih dari Sukadana ke dukuh-dukuh atau dahas-dahas. Sebanyak 80% pendudukunya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebanyak 10% merupakan karyawan pada perusahaan, dan 10% bermata pencaharian tidak menentu. Mayoritas tingkat pendidikan didominasi lulusan SD/sederajat yaitu sebesar (45%), SMP/sederajat (25%), SMA/sederajat sebesar (15%), Perguruan Tinggi (10%), dan tidak tamat SD (5%).

Sarana dan prasarana desa

Sarana pendidikan di Desa Gema, terdapat 1 unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 1 TK (Taman Kanak-kanak), 2 unit SD(Sekolah Dasar) dan 1 unit SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sarana kesehatan terdiri dari 1 unit Puskesdes (Pusat kesehatan desa) yang terdiri dari 5 tenaga medis yang ada di desa,yaitu 2 bidan dan 3 perawat. Prasarana jalan yang ada di desa, jalan beraspal merupakan jalan utama Trans Kalimantan yang terletak di tengah desa dan merupakan perbatasan antara Dusun Gerai Kiri dan Dusun Mantuk,sementara jalan Desa 70% merupakan jalan bercor semen dan sisanya merupakan jalan tanah. Di desa ini terdapat Lembaga Keuangan (yaitu Credit Union Pancur Dangeri) yang ada di Desa Gema. CU merupakan alternatif lembaga simpan pinjam bagi masyarakat setempat. Selain CU Pancur Dangeri, beberapa masyarakat Desa Gema juga menjadi anggota CU Semandang Jaya, namun CU Semandang Jaya belum ada kantor cabang di Desa Gema sehingga masyarakat melakukan registrasi dan transaksi di kantor cabang CU Semanjang Jaya Simpang Dua. Di Desa Gema tidak terdapat fasilitas pasar sehingga masyarakat menjual komoditas mereka kepada pengepul/tengkulak yang ada baik di dalam maupun di luar desa. Komoditi hasil masyarakat adalah karet, buah-buahan, sawit, dan kerajinan tangan. Yang susah dijual adalah tengkawang (buah) karena tidak ada pembeli. Lembaga keuangan yang tersedia adalah CU Pancur Dangeri. Tempat meminjam uang yang tersedia adalah Koperasi/ CU, pedagang/ pengumpul, keluarga, petani lain/tetangga dan rentenir.

Sejarah desa

Desa Gema terbentuk sejak tahun 1970, yang merupakan gabungan dari 2 desa yaitu Desa Gerai dan Desa Mantuk. Suku yang pertama hadir di desa ini adalah Suku Dayak yang diperkirakan dari Sukadana. Faktor yang membuat suku/ masyarakat tersebut mendiami desa ini adalah alam yang subur dan sumber daya yang melimpah. Awal pembukaan lahan di desa ini adalah untuk areal pertanian bagi masyarakat atau yang sering dikenal dengan istilah ladang oleh masyarakat setempat. Proses berladang dilakukan oleh masyakat dengan cara membuka hutan baik hutan primer maupun hutan sekunder dengan sistem tebas, tebang, dan bakar dengan menggunakan alat tradisional seperti parang, kapak, beliung, rimbas,

dan alat-alat tradisional lainnya. Bekas ladang/lahan pertanian padi ditanami dengan tanaman yang lain seperti karet, durian, cempedak, pinang, lembawang, atau jenis tanaman lainnya. Dalam proses berladang dari awal pembukaan lahan, penanaman maupun panen masyakat melakukan dengan sistem gotong-royong atau masyakat setempat mengenalnya dengan istilah sistem arisan.

Budaya gotong-royong masih dikenal di tengah masyarakat desa, hal ini terlihat ketika ada aktivitas-aktivas masyarakat tidak pernah sepi, contohnya: acara-acara adat atau ada orang yang meninggal. Untuk mendukung budaya gotong royong tersebut pemerintah desa menyiapkan peralatan inventaris seperti tenda, alat-alat masak, dan sebagainya yang disimpan di kantor desa dan dapat dipergunakan oleh siapa saja tanpa harus menyewa jika memerlukan.

Sistem kepemilikan lahan di Desa Gema adalah lahan bekas pertanian secara otomatis menjadi hak milik oleh si pembuka lahan pertama dan dapat diwariskan kepada anak cucu serta menjadi hak milik yang diakui adat secara turun-temurun. Sejarah kepemilikan lahan di Desa Gema diawali dengan proses pembukaan hutan untuk dijadikan ladang pertanian yang kemudian dijadikan lahan perkebunan, baik perkebunan karet, durian, cempedak, kebun campur maupun kebun sawit, dan lainnya.

Di Desa Gema juga terdapat tanah yang dimiliki oleh warga luar desa yang berada di luar desa, prosesnya melalui kegiatan jual-beli yang diketahui oleh aparat desa. Terkait kejelasan lahan kawasan hutan dan lahan warga di luar kawasan hutan pihak desa mengganggap batas cukup jelas berdasarkan telaah pada peta.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa

Di Desa Gema tidak terdapat perkebunan sawit korporasi, masyarakat desa masih menolak kehadiran perusahaan perkebunan karena masyarakat menilai perusahaan yang beroperasi di desa tidak akan memberikan keuntangan kepada mereka. Terdapat 30 Kepala Keluarga (KK) yang membuka kebun sawit mandiri di desa ini. Pembukaan kebun sawit terjadi tahun 2012-2013. Masyarakat melakukan budidaya sawit secara mandiri secara tradisional, yaitu dengan sistem tebas-tebang-bakar atau dijadikan ladang terlebih dahulu. Sebenarnya cara pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sama halnya dengan cara mereka membuka lahan untuk perkebunan karet atau tanaman lainnya, yaitu dijadikan ladang terlebih dahulu baru kemudian ditanami dengan jenis tanaman lainnya seperti karet, sawit, dan lainnya. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ada dua macam, yaitu pembukaan hutan sekunder dan mengkonversi perkebunan karet menjadi perkebunan sawit dengan cara dijadikan ladang terlebih dahulu.

Ada beberapa alasan masyarakat mengkonversi kebun/hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, yaitu harga sawit lebih tinggi, lahan perkebunan karet mereka yang terjadi kebakaran dan ada pula yang ikut-ikutan teman atau orang lain. Anjloknya harga karet dan tergiur dengan harga sawit merupakan alasan beberapa masyakarat untuk mengkonversi kebun karet menjadi sawit. Di samping itu areal perkebunan karet yang terletak di daerah Lobor, perbatasan antara Desa Gema dan Desa Sinar Kuri, selalu terbakar di setiap musim panas dengan penyebab kebakaran yang tidak diketahui oleh warga, hal ini juga merupakan alasan mereka mengkonversi lahan karet menjadi kebun sawit. Ada juga beberapa yang menanam sawit karena mengikuti jejak keluarga atau tetangga yang telah menanam sawit terlebih dahulu. Hingga sekarang diperkirakan sudah lebih dari 100 kepala keluarga yang telah menanam sawit, 26 kepala keluarga di antaranya sudah memasuki masa panen (yang sudah panen sebanyak 26 KK).

Saat ini ketersediaan lahan telah terbatas. Kebun sawit yang ada di desa ini adalah milik sendiri/milik warga, dan dikelola sendiri. Tidak terdapat kelompok tani sawit/ koperasi sawit di desa ini. Kebun sawit tersebut dapat diperjualbelikan dengan diketahui oleh aparat desa. Desa ini tidak menjadi wilayah konsensi kebun sawit. Kegiatan perburuan masih dilakukan dikawasan hutan, buah-buahan masih tersedia karena tidak semua lahan dijadikan sawit.

Terdapat nilai tradisi yang masih hidup dalam kegiatan tebas bakar. Tradisi masyarakat dalam melakukan pembakaran adalah kegiatan tersebut dilakukan dengan sistem gotong royong yang disebut masyarakat dengan istilah 'arisan'. Jika terjadi kebakaran yang menyebabkan kerugian pihak lain, maka pelaku akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya disesuaikan dengan kerugian material. Masyarakat di desa ini tidak pernah mendengar istilah ISPO/RSPO maupun NKT/HCV menurun.

Penggunaan api

Kegiatan berladang yang dilakukan oleh masyakarat masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan sistem tebas bakar, demikian juga untuk pembukaan lahan bagi perkebunan sawit mandiri. Pembukaan kebun sawit mandiri yang dilakukan oleh warga adalah dengan cara dijadikan ladang untuk menanam padi terlebih dahulu, kemudian baru ditanami sawit. Bahkan untuk penyiangan sawit (dalam 2-3 tahun terakhir) dilakukan dengan cara dibakar. Ketika sawit berumur 1 tahun, gulma pada tanaman sawit dibersihkan dengan cara ditebas kemudian dibakar untuk ditanami padi, masyarakat menganggap cara tersebut bisa membuat sawit lebih subur.

Kegiatan membakar ladang dilakukan secara gotong-royong, mereka memberi istilah kegiatan ini "arisan atau pengari" yang beranggotan lebih dari 5 orang. Sejauh ini belum pernah terjadi kebakaran besar yang disebabkan oleh aktivitas

mereka dalam berladang. Kebakaran sering terjadi setiap musim panas di daerah Lobor, daerah yang terletak dipinggir jalan Trans Kalimantan di perbatasan Desa Gema dan Desa Sinar Kuri, namun hingga saat ini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui.

Konflik lahan

Konflik lahan yang terjadi hanya bersifat konflik internal, yaitu antara sesama masyarakat lokal, bahkan antara saudara. Konflik dipicu oleh lahan warisan dari orang tua. Lahan yang disengketakan tidak luas yaitu sekitar 1-2 ha. Konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan yaitu melalui musyawarah dan mufakat yang dimediasi oleh pemerintahan desa.

2.5. Desa Mekar Raya

Luas wilayah Desa Mekar Raya 200.47 km2 (BPS, 2018). Desa Mekar Raya memiliki 3 dusun dan 7 RT, yaitu Dusun Gerai Kiri, Dusun Gerai Kanan, dan Dusun Mantuk. Pusat desa berada di Dusun Banjur. Penduduk Desa Mekar Raya sebanyak 193 KK dengan 852 jiwa. Suku yang tinggal di desa ini adalah Dayak (99.4%), Cina (0.2%), Batak (0.2%), Madura (0.1%). Sebanyak 98% matapencaharian masyarakat adalah sebagai petani, dan sisanya sebagai PNS (2%). Tingkat pendidikan masyakarat didominasi SMP (58%), SD (25%), SMA (8%), Sarjana D3 (0,2%), Sarjana S1 (0,71), tidak tamat SD (7,51%), tidak tamat SMP (3.28%), tidak pernah sekolah (1.05%), dan masih rsekolah (41.43%).

Komoditas yang dihasilkan antara lain: padi, karet, kayu, madu, rotan, rebung, durian, jengkol, cempedak, tengkawang, sawit, aren, anyaman rotan, anyaman bambu. Masyarakat Desa Mekar Raya berladang dan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan dikonsumsi sendiri. Komoditas utama yang menjadi sumber mata pencarian adalah karet di mana hingga kini sebanyak 65% masyarakat masih menyadap karet. Pada musim buah (buah durian, jengkol, cempedak, kapul, pekawai) masyarakat yang bekerja sebagai penyadap karet beralih profesi menjadi pemungut buah hasil hutan tembawang dikarenakan harga buah yang mereka pungut lebih menguntungkan dibandingkan dengan harga karet.

Sarana dan prasarana desa

Sarana pendidikan di Desa Mekar Raya, terdapat 1 unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 1 TK (Taman Kanak-kanak), 1 unit SD (Sekolah Dasar) dan 1 unit SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sarana kesehatan terdiri dari 1 unit Pustu (Pusat kesehatan Pembantu desa) 1 unit gedung Posyandu yang terdiri dari 1 Bidan, 1 Perawat, dan 2 Dukun beranak (alternatif). Sarana Religi Gereja Katolik 1 unit. Prasarana jalan yang ada di desa, jalan yang ada di Desa Mekar Raya sudah beraspal hingga perbatasan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong

Utara, dan menjadi jalan poros penghubung antara Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Lembaga Keuangan: terdapat Credit Union Pancur Dangeri dan Credit Union Semandang Jaya. CU merupakan alternatif lembaga simpang pinjam bagi masyakarakat setempat. Selain CU Pancur Dangeri, beberapa masyakat Desa Mekar Raya juga menjadi anggota CU Semandang Jaya, namun CU Semandang Jaya belum memiliki kantor cabang di Desa Mekar Raya sehingga masyarakat melakukan registrasi dan transaksi di kantor cabang CU Semanjang Jaya yang terdapat di Simpang Dua. Desa Mekar Raya tidak memiliki fasilitas pasar sehingga masyarakat menjual komoditas mereka kepada pengepul/tengkulak yang ada baik di dalam maupun di luar desa.

Sejarah desa

Desa terbentuk sejak tahun 1996. Desa Mekar Raya dulunya terbagi menjadi lima (5) dusun yaitu Dusun Baya Keranji (sekarang menjadi Desa Batu Daya), Dusun Kembra (sekarang menjadi Desa Kemora, Dusun Merangin (sekarang menjadi Desa Kampar Sebomban), Dusun Banjur dan Dusun Karab hingga sekarang masih menjadi bagian satu Desa Mekar Raya. Pada masa kepemimpinan Absalon Nunai tepatnya pada tahun 2008, Desa Mekar Raya mulai memekarkan desanya menjadi dua (2) desa yaitu, yang semula Dusun Baya Keranji menjadi Desa Batu Daya dan yang semula dusun Merangin menjadi Desa Kampar Sebomban. Pemekaran dua desa tersebut dikarenakan penggunaan anggaran dana desa (ADD) yang setiap tahunnya selalu kurang akibat pembagian dana yang terlalu meluas. Tahun 2015 Desa Mekar Raya memekarkan kembali satu dusun untuk dijadikan sebuah desa yaitu Dusun Kembara yang sekarang menjadi Desa Kemora.

Suku yang pertama hadir di desa ini adalah suku Dayak. Faktor yang membuat masyarakat betah tinggal di Desa Mekar Raya adalah selain karena faktor sejarah adalah karena sumber daya alam yang melimpah, ketersedian hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi orang Dayak, hutan sebagai tempat berburu, tempat berladang, tempat mendapatkan madu, tempat mencari buah-biuahan, dan lain sebagainya.

Awal pembukaan lahan di Desa Mekar Raya

Dari dulu, pembukaan lahan selalu diawali dengan kegiatan pertanian atau disebut dengan berladang. Kegiatan berladang saat itu selalu diawali dengan membuka hutan yang masih utuh menggunakan alat tradisional, kemudian dibakar untuk ditanami baik padi, tanaman pertanian lainnya, dan beragam jenis tanaman buah. Kegiatan dalam pembukaan lahan seperti ini memang masih dilakukan hingga sekarang namun tidak lagi pada hutan yang masih utuh, melainkan pada lahan karet tidak produktif. Kegiatan pembukaan lahan tersebut tidak hanya dilakukan sendiri, melainkan dilakukan secara bergotong royong dengan masyarakat sekitar perkampungan.

Budaya gotong-royong

Budaya gotong royong masih diterapkan oleh masyarakat desa, baik untuk kegiatan berladang, acara adat, atau acara lainnya. Sistem kepemilikan lahan di Desa Mekar Raya adalah lahan bekas pertanian secara otomatis menjadi hak milik oleh si pembuka lahan pertama dan dapat diwariskan kepada anak cucu serta menjadi hak milik yang diakui adat secara turun-temurun. Sejarah kepemilikan lahan di Desa Mekar Raya diawali dengan proses pembukaan hutan untuk dijadikan ladang pertanian yang kemudian dijadikan lahan perkebunan, baik perkebunan karet, durian, cempedak, jengkol, kebun campur maupun kebun sawit, dan lainnya. Di Desa Mekar Raya juga terdapat tanah yang dimiliki oleh warga luar desa yang berada di luar desa, prosesnya melalui kegiatan jual-beli yang diketahui oleh aparat desa dan juga warisan dari orang tua kepada anak, namun sang anak tidak menetap di Desa tersebut atau memiliki rumah dan usaha di luar Desa. Perbedaan antara lahan kawasan hutan dan lahan pertanian atau perkebunan masyarakat sangat jelas, yaitu dengan melihat kondisi hutan yang masih tersisa, hal itu berarti memiliki status hutan yaitu hutan lindung.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa

Di Desa Mekar Raya tidak terdapat perkebunan sawit korporasi, masyarakat desa masih menolak kehadiran perusahaan perkebunan karena masyarakat menilai jika sudah masuknya perusahaan, maka akan banyak terjadi permasalahan seperti konflik sosial, kesenjangan, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya seperti yang sudah terjadi di desa-desa tentangga. Mereka juga menolak perusahaan disebabkan masih memikirkan anak cucu mereka tidak dapat mengetahui lagi keanekaragaman flora dan fauna yang pernah ada di Hutan Di Desa Mekar Raya, apabila perusahaan masuk ke desa mereka untuk melakukan penanaman sawit.

Masyarakat melakukan budidaya sawit secara mandiri dan tradisional, yaitu dengan sistem tebas-tebang-bakar atau areal yang telah dibuka dijadikan ladang terlebih dahulu. Sebenarnya cara pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sama halnya dengan cara mereka membuka lahan untuk perkebunan karet atau tanaman lainnya, yaitu pada tahap awal menjadikan lahan sebagai areal berladang dahulu, selajutnya baru kemudian ditanami dengan jenis tanaman lainnya seperti karet, sawit, atau jenis tanaman lainnya. Adapun pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ada dua macam, yaitu: (1) Membuka hutan sekunder dan (2) Mengkonversi perkebunan karet menjadi perkebunan sawit dengan cara dijadikan ladang terlebih dahulu.

Pembukaan kebun sawit telah dimulai sejak tahun 2013. Terdapat beberapa alasan masyarakat mengkonversi kebun/hutan menjadi perkebunan sawit, yaitu: (i) Harga sawit lebih tinggi, (ii) Anjloknya harga karet, (iii) Mengikuti jejak keluarga atau tetangga yang telah menanam sawit. Hingga sekarang diperkirakan sekitar

40 orang kepala keluarga telah menanam sawit, 30 kepala keluarga di antaranya sudah memasuki masa panen dengan total luas lahan 70 ha.

Penggunaan api

Pembukaan lahan dengan cara tebas bakar sejak dulu sudah dilakukan dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu. Pembukaan lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam padi serta tumbuhan lainnya yang ingin ditanam oleh pemilik lahan, antara lain sawit. Tetapi dalam pembukaan lahan sawit, lading yang telah dibuka mereka gunakan untuk penanaman padi. Alasan pembukaan lahan dengan menggunakan api adalah: dapat membuat subur tanah, mengurangi serasah bekas tebangan sehingga memudahkan untuk menanam padi, dan biaya murah. Sebelum dilakukan pembakaran ladang, sehari sebelum membakar pemilik ladang membersihkan sekeliling ladang dengan membuat jalur/jalan dengan lebar 2 meter, sekaligus membersihkan serasah yang ada di jalan dengan tujuan: (i) Untuk mencegah api agar tidak merambat dan (ii) Untuk mempermudah akses dalam mengontrol api dari tepi ladang. Pemilik ladang akan memberi tahu kepada pemilik kebun yang berbatasan dengan ladangnya untuk meminta bantuan secara bersama-sama dalam menjaga api agar tidak merabpat ke kebun orang lain. Jika api sampai merambat ke kebun orang lain atau menggaggu pohon karet orang lain hingga layu, maka pemilik kebun yang membakar tersebut akan mendapatkan sanksi hukum adat yaitu: "wajib menyerahkan anak ayam 1 ekor, beras sekepal dan piring 2 buah.

Konflik lahan

Konflik lahan yang terjadi di Desa Mekar Raya yaitu antara masyarakat dan masyarakat namun bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan hukum adat yang disaksikan oleh pengurus adat, lembaga desa, dan tokoh masyarakat.

2.6. Desa Kemora

Desa Kemora memiliki 2 dusun dan 5 RT, yaitu Dusun Kembera dan Dusun Dipah Stoku. Pusat desa berada di Dusun Dipah Stoku. Luas wilayah menurut data desa adalah 9.469,30 ha. Komoditas utama dari desa adalah karet, padi lokal, durian, jengkol, gula aren, bambu anyaman, komoditas sampingan adalah sahang dan sawit. Penduduk Desa Kemora sebanyak 172 KK dengan 673 jiwa. Suku yang mendominasi adalah Dayak (96.9%), Jawa (0.6%), Melayu (0.7%), dan Cina (1.8%). Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani (82%), PNS (1%), peternak (1%), karyawan swasta (13%), dan perangkat desa (3%). Tingkat pendidikan masyarakat terdiri dari: sarjana (0.59%), SMA (8.32%), SMP (4.16%), SD (7.7%), tidak tamat (SD 7.7%). Sarana dan prasarana yang tersedia di desa adalah sekolah yaitu 1 buah SD dan 1 buah SMP, 1 buah sarana kesehatan pustu, 1 orang bidan. Kondisi jalan tidak beraspal. Tidak terdapat pasar di desa ini, masyarakat biasanya menjual hasil pertanian kepada pekerja yang ada di

perusahaan. Komoditi hasil masyarakat adalah sawi, prenggi, terong, sahang, gula aren, dan jengkol. Komoditas yang sulit dijual adalah buah sawit kerena jauh dari pengepul. Tempat meminjam uang yang tersedia adalah Credit Union, yaitu: CU Pancur Dangeri, CU Semandang Jaya, dan CU Lantang Tipo.

Sejarah desa

Desa terbentuk sejak 19 Agustus tahun 2015. Suku yang pertama hadir di desa ini adalah suku Dayak. Faktor yang membuat suku/masyarakat tersebut mendiami desa ini adalah melimpahnya hasil sumberdaya alam. Yang mengawali pembukaan lahan di desa ini adalah nenek moyang mereka dengan cra menebang kayu, kemudian dibakar dan dijadikan ladang. Sistem kepemilikan lahan di desa ini ada yang membeli dari tetangga dan ada juga yang diwariskan orang tua. Sejarah kepemilikan lahan desa ini: nenek moyang mereka ke hutan untuk menebang kayu, kemudian membakar dan manjadikannya ladang. Barangsiapa yang pertama kali membuat ladang di lokasi tersebut, dengan menanam tanaman kopi atau jenis buah-buahan maka orang itulah yan menjadi pemiliknya. Terdapat pula orang luar desa yang memiliki lahan di desa ini yaitu orang yang asalnya dari desa tersebut namun menikah dan tinggal di desa lain. Lahan tersebut hasil warisan dari orang tua. Terdapat kejelasan batas lahan kawasan hutan dan lahan di luar kawasan hutan yaitu dengan pemasangan patok batas.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa

Terdapat Kepala Keluarga yang membuka kebun sawit mandiri dan sawit plasma. Pembukaan kebun sawit dimulai sejak tahun 1994 untuk perusahaan PT CUS dan tahun 2015 MKS. Awal pembukaan kebun sawit adalah kebun sawit mandiri, plasma dalam proses pengurusan. Masyarakat beralih ke sawit karena ikut-ikutan melihat saudaranya yang menanam sawit. Tidak terdapat masyarakat yang membangun sawit dengan membuka hutan sekunder namun dengan cara mengkonversi kebun karet menjadi sawit. Saat ini ketersediaan lahan masih cukup luas. Kebun sawit yang ada di desa ini adalah milik sendiri dengan dikelola masing-masing. Tidak terdapat kelompok tani sawit/koperasi sawit di desa ini. Kebun sawit mandiri dapat diperjualbelikan dengan kesepakatan antara penjual dan pembali.

Desa ini menjadi wilayah konsensi kebun sawit PT CUS dan PT MKS. Dalam proses pembangunan kebun sawit melibatkan sebagian saja pemerintah dan masyarakat. Proses pembebasan lahan untuk kebun plasma untuk PT CUS tidak ada ganti rugi lahan dengan alasan yang mereka kelola adalah hutan negara bukan milik masyarakat, sedangkan PT MKS menerapkan ganti rugi lahan. Hubungan petani plasma dengan perusahaan, saat ini plasma masih dalam proses perumusan dan belum ada kejelasan terkait pembagian plasma. Pernah ada konflik dengan perusahaan yaitu konflik lahan yang tidak dibayar PT CUS menyebabkan akses jalan ditutup dan camp perusahaan disegel.

Masyarakat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya seperti berburu, mencari buah-buahan, dan lainnya, meskipun setelah sebagian besar lahan mereka telah dikonversi menjadi sawit yaitu dengan memanfaatkan lahan yang masih tersisa yang berbatasan Desa Mekar Raya. Terdapat nilai tradisi yang masih hidup dalam kegiatan tebas bakar. Tradisi masyarakat dalam melakukan pembakaran adalah dengan membersihkan keliling ladang sekitar 1,5 m sebelum membakar. Tradisi yang masih hidup hingga kini acara bebantan dan ada lahan yang dijadikan keramat seperti di Terjun Beruak. Jika seseorang melanggar aturan adat maka biasanya orang tersebut sakit-sakitan yang disebabkan ulahnya sendiri. Tahun 2016 pernah terjadi kebakaran yang sumbernya dari PT CUS. Sawit korporasi sebagian besar tidak melakukan pembukaan lahan dengan sistem tebas bakar. Desa tidak pernah mendengar istilah ISPO/RSPO dan NKT/HCV menurut narasumber. Menurut desa sawit korporasi di desa ini sudah mengalokasikan areal NKT.

Konflik lahan

Pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan PT CUS, dala, bentuk penyegelan camp dan akses portal jalan pada tahun 2015-2016. Luas lahan yang menjadi sengketa ± 700 ha, dan hingga kini belum ada penyelesaian. Sebab utama konflik adalah lahan masyarakat tidak dibayar oleh perusahaan. Pihak yang terlibat adalah masyarakat yang merasa tanahnya dirugikan oleh pihak perusahaan. Pernah dilakukan mediasi dengan Bupati Ketapang dan beberapa anggota DPRD terkait permasalahan ganti rugi lahan masyarakat yang digarap oleh PT CUS namun tidak ada hasilnya, hanya saja perusahaan dilarang lagi membuka lahan baru.

2.7. Desa Batu Daya

Desa Batu Daya memiliki 2 dusun dan 4 RT, yaitu Dusun Tunas Harapan dan Dusun Karanji. Pusat desa berada di Dusun Karanji. Total luas wilayah 93 km2 (BPS, 2018). Desa belum pernah melakukan pemetaan dan pengukuran penggunaan lahan sehingga desa tidak memiliki peta tata guna lahan. Desa Batu Daya tidak memiliki peta bahkan sketsa desa yang dapat menggambarkan Sumber Daya Alam. Komoditas utama yang ada didesa adalah karet komoditas sampingan adalah padi ladang dan sawit. Jumlah penduduk sebanyak 131 KK dengan 524 jiwa. Masyarakat berasal dari Suku Dayak, Jawa, Melayu, Batak, dan Cina. Tingkat pendidikan penduduk terdiri dari: sarjana (10%), SMA (25%), SMP (35%), SD (16%), dan tidak tamat SD (4%).

Sarana dan Prasarana yang ada di desa adalah: 1 buah SD, 1 buanh sarana kesehatan pustu, 1 orang bidan. Kondisi jalan tidak beraspal, jalan tanah yang telah dikeraskan. Tidak terdapat pasar di desa ini, masyarakat biasanya menjual hasil pertanian melalui pengepul dari Desa Simpang Dua dan Sungai Laur. Komoditi hasil masyarakat adalah karet dijual ke pengepul lokal untuk dijual di Sungai Laur.

Hampir semua komoditi sulit dijual karena tidak ada pasar dan akses yang sulit. Lembaga keuangan yang tersedia adalah CU Pancur Dangeri, CU Semandang Jaya, dan CU Lantang Tipo. Tempat meminjam uang yang tersedia adalah Credit Union, koperasi, keluarga, petani lain/ tetangga.

Sejarah desa

Desa terbentuk sejak tahun 2009 dari pemekaran Desa Mekar Raya, definitif 2010. Suku yang pertama hadir di desa ini adalah Suku Dayak. Faktor yang membuat suku/masyarakat tersebut tinggal di desa ini adalah karena tanah leluhur dan melimpahnya hasil sumberdaya alam. Awal pembukaan lahan di desa ini adalah pindahan dari Sukadana (Tamak Rawang) dan menetap dengan membuka ladang yang disebut pedukuhan. Setelah memiliki jumlah cukup banyak maka jadilah duun/kampung baja. Sistem kepemilikan lahan di desa ini dengan membuka hutan menjadi lahan yang ditanami padi ladang dan bua-buahan. Sejarah kepemilikan lahan desa ini membuka hutan menjadi ladang berpindah, selanjutnya menjadi tembawang dan dijadikan kebun karet dan buah-buahan. Terdapat pula orang luar desa yang memiliki lahan di desa ini yaitu dengan cara membeli atau dengan menikah dengan orang lokal. Terdapat kejelasan batas lahan kawasan hutan dan lahan di luar kawasan hutan yaitu dengan pemsangan patok kawasan pada tahun 1994.

Sejarah pembukaan kebun sawit di desa

Terdapat 30 Kepala Keluarga (KK) (8%) yang membuka kebun sawit mandiri di desa ini dengan total luas lahan 31 ha dan 130 KK (50%) yang membuka kebun sawit plasma dengan total luas lahan 252 ha . Pembukaan kebun sawit dimulai sejak tahun 1994 untuk perusahaan, awal pembukaan kebun sawit adalah kebun sawit plasma. Masyarakat beralih ke sawit karena harga karet jatuh atau mereka ikut-ikutan tetangga lainnya. Tidak terdapat masyarakat yang membangun sawit dengan membuka hutan sekunder namun dengan mengkonversi kebun yang telah dimilikinya. Saat ini ketersediaan lahan masih cukup luas. Kebun sawit yang ada di desa ini adalah milik sendiri dan milik perusahaan, dengan pengelolaan: (a) plasma dari perusahaan PT SMP (Swadaya Multi Prakarsa) dan (b) Pengelolaan sawit mandiri dikelola sendiri-sendiri. Tidak terdapat kelompok tani sawit/ koperasi sawit di desa ini. Kebun sawit mandiri dapat diperjual belikan dan tidak ada aturan atau lembaga yang mengaturnya.

Desa ini menjadi wilayah konsensi kebun sawit PT SMP (Swadaya Multi Prakarsa). Dalam proses pembangunan kebun sawit melibatkan pemerintah, namun tidak semua masyarakat dilibatkan. Proses pembebasan lahan untuk kebun plasma dengan proses ganti rugi lahan, namun terjadi konflik hingga saat ini terkait besarnya nilai ganti rugi. Hubungan petani plasma dengan perusahaan banyak terdapat masalah terkait ganti rugi lahan. Tahun 2014 pernah ada konflik dengan perusahaan dan mediasi oleh DPRD Ketapang. Penyebab utama konflik adalah

masalah ganti rugi yang belum dibayar dan tambahan jumlah harga dari 70.000/orang/bulan menjadi 550.000/orang/bulan.

Masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (seperti berburu, mencari buah-buahan dan lainnya) terutama setelah sebagian besar lahannya dikonversi menjadi sawit. Terdapat tradisi kegiatan tebas bakar. Tradisi masyarakat dalam melakukan pembakaran adalah tebang-tebas-bakar. Tradisi yang masih hidup hingga kini acara bebantan ketika pembersihan kampung, persembahan untuk tempat keramat di daerah aliran Sungai Keranji. Jika seseorang melanggar aturan adat maka dikenakan sanksi berupa hukum adat. Tahun 2014 di PT SMP pernah terjadi kebakaran. Sawit korporasi sebagian besar tidak melakukan pembukaan lahan dengan sistem tebas bakar. Desa tidak pernah mendengar istilah ISPO/RSPO dan NKT/HCV menurut narasumber. Menurut masyarakat desa, sawit korporasi di desa ini belum mengalokasikan areal NKT.

Konflik lahan

Pernah terjadi konflik yang berhubungan dengan kepemilikan lahan antara msyarakat dengan perusahaan sawit terkait pembukaan lahan (tahun 1994-2014) dengan luas yang disengketakan ± 1000 ha. Permasalahan yang timbul adalah lahan tidak dibayar (ganti rugi), tuntutan plasma (penambahan anggota plasma). Belum terdapat penyelesaian dari masalah ini. Pihak yang terlibat masyarakat, perusahaan, DPRD Ketapang.

2.8. Desa Muara Jekak

Desa Muara Jekak terletak di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, memliki luas 93.73 km2 (BPS, 2018), terdiri dari 3 dusun dan 16 RT. Jumlah penduduk 822 KK dengan 2.884 jiwa, didominasi oleh etnis Melayu. Desa Muara Jekak merupakan sebuah desa yang saat ini ditetapkan sebagai Desa Mandiri oleh pemerintah, yang telah mandiri dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kebun Sawit Plasma Desa.

Sejarah pembukaan sawit di Desa Muara Jekak

Pada tahun 1990, perusahaan memberitahu penduduk Desa Muara Jekak bahwa mereka akan membangun kelapa sawit dalam kemitraan dengan masyarakat setempat. Setelah tiga tahun negosiasi, kesepakatan yang dicapai adalah bahwa desa akan menerima 150 ha perkebunan plasma hanya untuk memberi manfaat bagi 75 dari 783 rumah tangga. Ini semakin membingungkan karena perusahaan melakukan pembukaan lahan berdasarkan izin area perkebunan IUP daripada melalui negosiasi dengan pemilik lahan individu. Menyadari masalah ini, penduduk desa bertemu dan sepakat bahwa tanah mereka akan dikelola secara kolektif oleh pemerintah desa. Administrator akan dirotasi setiap dua tahun melalui

majelis umum desa, dengan manajemen sehari-hari disubkontrakkan kepada para profesional.

Melihat manfaat yang jelas, pengelolaan oleh desa terorganisasi dengan baik, memungkinkan pembayaran pinjaman untuk pembangunan plasma secara cepat, diikuti laba bersih tahunan sebesar Rp 3-4 miliar (US $ 210.000-280.000). Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola perkebunan diambil dari penduduk desa baik pria dan wanita dengan membayar upah minimum pemerintah. Perempuan umumnya terlibat dalam panen, menerima Rp600 (US $ 0,04) per kg. Desa menjual semua hasil panennya kepada perusahaan yang merupakan anggota RSPO, tetapi sejauh ini desa itu sendiri belum mengajukan sertifikasi. Pendapatan itu secara adil digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewan desa membayar asuransi kesehatan semua penduduk desa, dan beasiswa pendidikan sebesar Rp100.000-500.000 (US $ 7-35) per bulan untuk siswa dari taman kanak-kanak hingga universitas. Majelis umum desa juga memutuskan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur terpilih, dan sebagian dari keuntungan disimpan dalam bentuk dana untuk menutupi biaya penanaman kembali setelah 25 tahun. Sisa dari keuntungan tahunan dibagi rata di antara semua rumah tangga.

Sejak 2010, majelis desa juga telah memberikan pinjaman individu untuk mengembangkan perkebunan petani swadaya. Ini difokuskan pada mereka yang secara hukum melindungi lahan produktif tetapi sumber daya terbatas untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Demi kesetaraan, pinjaman dibatasi hingga 1 ha per rumah tangga. Pengetahuan dan pengalaman dalam praktik pertanian yang baik yang diperoleh dari perkebunan inti telah sepenuhnya dilaksanakan tanpa kendala. Ini telah meningkatkan produktivitas bulanan tandan buah segar menjadi 2 ton/ ha, halini hampir sama dengan perkebunan inti. Menurut pejabat desa, ada ruang untuk meningkatkan hasil panen hingga 50% atau lebih.

Petani mandiri di Desa Muara Jekak

Pembangunan perkebunan independen didanai oleh pinjaman dari pemerintah desa yang mencakup biaya persiapan lahan dan pengadaan bibit. Biaya pemeliharaan selama pendirian bervariasi di antara petani, sehingga jumlah pinjaman bervariasi dari Rp6,5 juta hingga Rp18 juta (US $ 451-US $ 1.250) per ha. Pembayaran kembali ke desa dilakukan melalui pengurangan 30% dari total pendapatan dari petani yang menerima setidaknya Rp1 juta (US $ 70) per bulan.

Pada tahun 2016, Desa Muara Jekak mendirikan BUMDes. Sejak 2016 jumlah BUMDes telah menjamur, tetapi sebagian besar tidak berfungsi secara optimal; yang ada di Muara Jekak dianggap luar biasa. Ini telah aktif dalam mengatasi penetapan harga yang buruk oleh perantara, dan dalam mendistribusikan bahan tanaman dan pupuk kelapa sawit berkualitas tinggi, yang tidak mudah diperoleh oleh petani kecil. Ini juga berfungsi sebagai penyedia layanan transportasi dari perkebunan ke titik pengumpulan.

2.9. Desa Teluk Bayur

Desa Teluk Bayur terletak di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, memiliki luas 57 km2 (BPS, 2018) dengan jumlah penduduk 3.070 (laki-laki 1.720, perempuan 1.350). Penduduk didominasi oleh Suku Dayak dan Melayu. Desa Teluk Bayur merupakan hasil pemekaran dari Desa Sempurna yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2005, terdiri dari tiga dusun, yaitu: Dusun Bayur Indah, Dusun Sungai Putih, dan Dusun Tanjung Harapan Baru.

Sejarah sawit di Desa Teluk Bayur

Berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan Dewan Desa Teluk Bayur pada tahun 2000, maka seluas 490 ha plasma didirikan. Setelah empat tahun pemeliharaan, pengelolaan kebun masing-masing seluas 2 ha diserahkan kepada 245 petani. Di sini, perkebunan dikelola oleh petani perorangan yang bekerjasama dengan perusahaan melalui koperasi dan tidak secara kolektif oleh desa. Petani sebagai pemilik perorangan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan dapat memilih cara menjual tandan buah segar mereka. Karena semua input pertanian (seperti pupuk, agrokimia, dan tenaga kontrak) dipasok oleh perusahaan dengan pembayaran pinjaman dikurangi dari hasil penjualan, maka semua petani terus menjual hasil sawit mereka ke perusahaan yang sama. Harga jual ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi perusahaan mengendalikan penyortiran dan penilaian kualitas dan menentukan berat penjualan bulanan.

Gambar 2.2. Hasil panen buah sawit petani plasma

Bab 3. Metode

3.1. Pengambilan sampel

Survey dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 yang dilakukan terhadap 145 responden yang berasal dari 9 desa (Desa Gema, Desa Mekar Raya, Desa Pematang Gadung, Desa Sungai Besar, Desa Sungai Pelang, Desa Muara Jekak, Desa Teluk Bayur, Desa Kemora, Desa Batu Daya) dan 4 kecamatan (Kecamatan Sandai, Sungai Laur, Matan Hilir Selatan, dan Simpang Dua) di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified random sampling. Sampel distratifikasi menurut kelompok masyarakat dan aparat pemerintah. Responden dari kelompok masyarakat dipilih secara acak, sementara untuk aparat pemerintah dipilih secara langsung dengan dasar bahwa responden dapat memberikan masukan perkebunan sawit yang terjadi di desanya.

Table 3.1. Jumlah Responden Masing-masing Desa

Kecamatan	Desa	Jumlah responden (orang)
Sandai	Muara Jekak	9
Sungai Laur	Teluk Bayur	9
Matan Hilir Selatan	Sungai Pelang	25
	Sungai Besar	30
	Pematang Gadung	16
Simpang Dua	Gema	17
	Mekar Raya	16
	Kemora	12
	Batu Daya	11
Total		**145**

Sumber: Tropenbos Indonesia (2019)

3.2. Jenis dan sumber data

Data yang diperlukan dalam survey ini meliputi data sekunder dan primer. Data primer diperoleh melalui kuisioner/wawancara dengan para kelompok responden meliputi: data responden, jenis lahan yang dimiliki responden, karakteristik penggunaan kebun sawit mandiri, pengelolaan kebun sawit, pemasaran hasil sawit,

pendampingan kebun sawit mandiri, pelatihan dan pembinaan untuk perkebunan sawit mandiri, modal usaha kebun sawit mandiri, kontribusi pendapatan dari kebun sawit, kondisi rumah, penjualan TBS, keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di sekitar kebun sawit, pengetahuan tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, kegiatan replanting, organisasi petani sawit, tabungan petani sawit, rencana masa depan. Selain itu juga dilakukan pengamatan lapangan untuk memperoleh informasi data tentang: topografi, kondisi tanah, implementasi perawatan kebun, konservasi tanah, manajemen pengairan, status defisiensi unsur hara, status hama dan penyakit sawit, tingkat kemudahan akses. Secara lengkap daftar pertanyaan kuisioner disajikan pada **Lampiran 1**.

3.3. Analisis data

Hasil observasi dan interview kemudian ditabulasikan sesuai dengan kategori-kategori atau kelompok. Pendekatan analisis data yang digunakan dengan metode Qualitative Descriptive Analysis dengan tabulasi distribusi frekuensi. Seluruh data dianalisis menggunakan program statistik SPSS release 14.0.1 (Statistical Product and Service Solution), yaitu sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Selanjutnya hasil analisis data diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu berupa penyajian fakta-fakta yang menggambarkan kondisi sebenarnya pada lokasi pengamatan.

Bab 4. Hasil

4.1. Data responden

a. Petani mandiri/swadaya

Jumlah total responden yang diwawancara dari 7 desa adalah 127 responden (laki-laki 95% dan perempuan 5%). Umur responden paling banyak berada di kisaran 41-50 tahun (34,5%) dan 31-40 tahun (28,6%). Tingkat pendidikan responden dari Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Besar, Desa Kemora, dan Desa Batu Daya antara SD-SLTA, sedangkan untuk Desa Pematang Gadung, Gema dan Mekar Raya pendidikan responden antara SD- sarjana S1. Tingkat pendidikan terakhir responden Desa Sungai Pelang dan Mekar Raya didominasi oleh tingkat SLTA (35%), sedangkan Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Gema, Kemora dan Batu Daya didominasi pendidikan tingkat SD (45%).

Hasil studi menunjukkan suku-suku yang mendominasi desa-desa studi adalah: (1) Suku Dayak, terdapat empat desa yang asal sukunya didominasi oleh Dayak, yaitu Desa Gema (88,2%), Desa Mekar Raya (93,8%), Kemora (83%) dan Batu Daya (83%), (2) Suku Melayu, terdapat di Desa Pematang Gadung (100%), (3) Suku Jawa dan Sunda, terdapat di Desa Sungai Pelang (84%) dan Sungai Besar (60%). Di Sungai Besar suku yang tinggal lebih beragam, baik dari Cina, Jawa, Melayu, Sunda, maupun Lampung. Persentase asal suku dari para responden di masing-masing desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Persentase asal suku responden

Suku	Gema	Mekar Raya	Pematang Gadung	Sungai Pelang	Sungai Besar	Kemora	Batu Daya	A (%)
Cina	5,9	0	0	0	13,3	0	0	3,8
Dayak	88,2	93,8	0	0	0	83	91	34,8
Jawa	5,9	0	0	52	40	17	0	21,8
Melayu	0	0	100	4	16,7	0	0	24,1
Sunda	0	0	0	32	20	0	0	10,4
Lampung	0	0	0	0	3,3	0	0	0,7

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Sebagian besar responden (76%) di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar merupakan penduduk yang bermigrasi dari luar desa, sedangkan responden di Desa Pematang Gadung, Gema, Mekar Raya, Desa Kemora, dan Desa Batu Daya sebagian besar (65,6%) berasal dari responden yang lahir di desa tersebut. Terdapat beberapa faktor pendorong yang menyebabkan mereka bermigrasi ke

desa, antara lain: ikut keluarga (18,1%), mencari pekerjaan (16,6%), mendapatkan lahan (32%) terutama responden di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar, dan karena penggusuran lahan (6,7%). Adapun yang membuat mereka tertarik pindah ke desa antara lain: bisa mendapatkan lahan, adanya pertanian yang dijanjikan pemerintah, mendapatkan mata pencaharian, lokasi yang aman, dan lahan subur.

Para responden tersebut memiliki berbagai pekerjaan utama dimana sebagian besar adalah petani (56,8%), adapun Desa Gema merupakan desa yang memiliki jumlah responden bermatapencaharian petani terendah (29,4%) jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Beberapa matapencaharian penduduk selain petani antara lain: dagang, karyawan swasta, buruh bangunan, guru, PNS, dan wiraswasta.

b. Petani Swadaya Berbasis Koperasi

Total responden yang diwawancarai di Desa Muara Jekak sebanyak 9 orang (laki-laki 78%, perempuan 22%), dengan jumlah anggota keluarga paling sering adalah 4 orang. Umur responden berkisar 29-60 tahun. Sebanyak 89% responden lahir di desa ini. Tingkat pendidikan responden 33% S1, 44% SLTA, dan 22% SLTP, dengan pekerjaan utama paling banyak adalah petani sawit dengan pekerjaan sampingan paling sering adalah wiraswasta.

c. Petani plasma

Total responden yang diwawancarai di Desa Teluk Bayur sebanyak 9 orang (laki-laki 100%), dengan jumlah anggota keluarga paling sering adalah 4 orang. Umur responden berkisar 27-65 tahun. Sebanyak 89% responden lahir di desa ini. Tingkat pendidikan responden 78% SD dan 11% SLTA, dengan pekerjaan utama paling banyak adalah petani sawit.

4.2. Jenis kepemilikan lahan

a. Petani mandiri/swadaya

Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) memiliki lahan sawit dengan luas yang bervariasi, di lahan milik pribadi dengan status dikuasai dan digarap sendiri. Di Desa Gema dan Mekar Raya selain sawit lahan yang paling banyak dimiliki responden adalah karet. Di Desa Mekar Raya, Desa Kemora, dan Desa Batu Daya seluruh responden (100%) memiliki lahan sawit dan karet. Di Desa Sungai Pelang dan Pematang Gadung lahan yang paling banyak dimiliki setelah sawit adalah sawah. Di Desa Mekar Raya lebih dari 80% responden juga memiliki lahan berupa sawah, ladang dan belukar. Sedangkan di Desa Sungai Besar hanya hanya 20-30% responden yang memiliki lahan selain sawit baik berupa sawah, karet, maupun belukar. Data jenis pemanfaatan lahan oleh para responden di tujuh desa studi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Persentase jenis pemanfaatan lahan oleh responden di tujuh desa studi

Jenis pemanfaatan lahan	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
sawit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
sawah	64.0%	20%	81,3%	17.7%	81.3%	58%	46%
ladang	4.0%	6.7%	31,3%	52.9%	81.3%	75%	82%
kebun karet	4.0%	20%	37,5%	64,7%	100%	100%	100%
belukar	28.0%	30%	56,3%	5,9%	81.3%	25%	45%
lainnya	4.0%	0%	25%	5,9%	6.3%	0%	0%

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Luas lahan sawit yang dimiliki oleh para responden dari tujuh desa berkisar antara 0,5 – 25 ha, di mana rata-rata luas lahan sawit yang dimiliki adalah 3,5 ha. Para responden dari Desa Gema memiliki rata-rata luas lahan sawit lebih tinggi (5,6 ha) jika dibandingkan dengan desa lainnya (berkisar antara 2-3,9 ha). Adapun kepemilikan jenis penggunaan lahan lainnya selain sawit adalah: (1) Sawah, berkisar 0,5 – 4 ha, (2) Ladang, berkisar 0,1 – 15 ha, (3) Karet, berkisar 0,1 – 50 ha, (4) Belukar 1 – 13 ha. Khusus di Desa Gema dan Mekar Raya memiliki kebun karet masing-masing hingga 30 ha dan 50 ha, sedangkan kepemilikan lahan sawit terluas adalah 25 ha. Data luas pemanfaatan lahan di tujuh desa disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.3. Data luas pemanfaatan lahan

Luas lahan (ha)	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
sawit (min-maks) **rata-rata:**	0.5-10 **2**	0.5-8 **2.4**	1-9 **3.5**	2-14 **5.6**	1-25 **3.9**	1-5 **2.25**	1-2.5 **1.75**
sawah (min-maks) **rata-rata:**	0.5-3 **1.5**	0.5-1.5 **1.5**	1-7 **3.4**	1-4 **1.5**	0.5-3 **1.6**	1-2 **4**	1-6 **4**
ladang (min-maks) **rata-rata:**	1-4 4	1-1.5 1.25	0.1-4 1.8	0.25-15 5.8	0.5-2 1.2	1-2.5 1.6	1-2.5 1.6
karet (min-maks) **rata-rata:**	1 **1**	0.13-5 **1.9**	0.48-4 **1.5**	2-30 **10.4**	1-50 **7.4**	2-8 **4.7**	1-8 **3.3**
belukar (min-maks) **rata-rata:**	1-5 **1.8**	1-13 **3**	1.3-8 **4**	1-3 **2**	1-8 **3.1**	1-3 **1.8**	1-10 **4.7**
lainnya (min-max) **rata-rata:**	1 **1**	1 **1**	1-6 **2.6**	1.5 **1.5**	0.12 **0.12**	0 0	0 0

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Jumlah plot sawit yang dimiliki responden adalah 1 (33%), 2 (56%) dan 3 (11%) dengan status 89% dikuasai dan digarap sendiri dan 11% menggadai dari orang lain. Selain sawit, lahan yang juga dimiliki responden berupa karet 89% dengan luas 1-10 ha, sawah 56% responden, ladang 22% dan 33% responden masih memiliki lahan berupa belukar. Seluruh lahan tersebut berada di lokasi lahan pribadi.

c. Petani plasma

Jumlah plot sawit yang dimiliki seluruh responden adalah masing-masing 1 plot seluas 2 ha dengan status 67% dikuasai dan digarap sendiri dan 33% mengerjakan tanah orang lain (bagi hasil). Selain sawit, lahan yang juga dimiliki responden berupa sawah 89% dengan luas 0.4-2 ha, karet 67% responden dan 22% masih memiliki lahan berupa belukar. Seluruh lahan tersebut berada di lokasi lahan pribadi. Sebanyak 67% responden merupakan pemilik lahan sebelum lahannya dijadikan kebun sawit plasma oleh perusahaan besar. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa sebelum menjadi kebun plasma, kebun ini sudah berupa kebun sawit mandiri. Proses akuisisi oleh perusahaan sawit menurut responden adalah:

1) Dibagi rata seluruh Kepala Keluarga (245 KK), masing-masing KK mendapatkan 2 ha.
2) Negosiasi antara desa, pemilik lahan, dan perusahaan kemudian lahan di tebang, tebas, bakar kemudian dilakukan *land clearing*.
3) Perusahaan melakukan penggantian tanam tumbuh pada lahan yang dipergunakan masyarakat sebelumnya sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku pada saat itu.
4) Pengelolaan oleh perusahaan bekerjasama dengan desa, kemudian hasil pembagian dibagikan ke desa dengan bagian petani 20% dan perusahaan 80% (KKPA).
5) Perusahaan menggarap tanah dari land clearing sampai penanaman dan perawatan selama 3 tahun kemudian diserahkan kepada petani dengan pembagian 80:20, 80 untuk Perusahaan dan 20 untuk Petani.
6) Keluarga besar mendapatkan 6 kapling tidak ada ganti rugi lahan oleh perusahaan. Kredit keperusahaan sebesar 17 juta sudah 10 tahun lunas pembayaran dari 30% hasil panen.
7) Seluruh responden menyatakan senang setelah dilakukan konversi menjadi kebun sawit plasma.

4.3. Karakteristik penggunaan kebun sawit

a. Petani mandiri/swadaya

Penanaman kebun sawit pada tujuh desa studi didominasi dengan pola penanaman secara monokultur, terutama di Desa Pematang Gadung dan Gema di mana seluruh responden melakukan penanaman kebunnya secara monokultur.

Hal ini berbeda dengan penanaman sawit pada Desa Sungai Besar, Sungai Pelang, Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya yang menanam sawit dengan pola campuran. Sebanyak 20% responden Sungai Pelang menanam sawit dicampur dengan nanas, sedangkan 31% responden Desa Mekar Raya menanam sawit dicampur dengan pohon jengkol, demikian juga dengan 36% responden Desa Kemora, 13% responden Desa Sungai Besar dan 9% responden Desa Batu Daya yang menanaman sawit dengan berbagai tanaman campuran.

Hampir seluruh resonden memiliki lahan datar pada kebun sawitnya, kecuali beberapa responden dari beberapa desa yang memiliki lahan miring hingga terjal, misalnya di Desa Mekar Raya terdapat 31% responden, Desa Kemora 25% danDesa Batu Daya 9% yang memiliki lahan dengan topografi miring dan di Desa Gema sebanyak 41% responden memiliki lahan miring dan 18% responden memiliki lahan curam.

Sejarah penguasaan lahan pada masing-masing desa berbeda-beda, yaitu: (1) Lahan berasal dari cara membeli (yaitu di Desa Pelang dan Pematang Gadung), (2) Lahan berasal dari hibah/transmigrasi (yaitu di Desa Pelang dan Sungai Besar), (3) Lahan berasal dari warisan (yaitu di Desa Gema, Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya). Adapun untuk sejarah penggunaan lahan sebelum ditanami sawit menunjukkan bahwa: (1) Lahan pada awalnya berupa semak belukar, hal ini terdapat di Desa Pelang, Sungai Besar, dan Pematang Gadung, (2) Lahan pada awalnya merupakan kebun karet, hal ini terdapat di Desa Gema, Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya.

Terdapat beberapa alasan perubahan penggunaan lahan menjadi kebun sawit, antara lain: (1) Harga sawit lebih tinggi sehingga lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan produk lain saat itu, hal ini menurut pendapat sebagian besar responden dari Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Mekar Raya, dan Batu Daya (2) Mengikuti teman/orang lain yang melakukan budidaya sawit, dinyatakan oleh sebagian besar responden Desa Sungai Pelang, Kemora dan (3) Sering terjadi kebakaran, dinyatakan sebagian besar responden Desa Gema. Perubahan penggunaan lahan menjadi kebun sawit tersebut paling banyak dilakukan pada rentang tahun 2012-2014 walaupun beberapa responden di Desa Sungai Besar dan Pematang Gadung ada yang telah memulai tanam sawit pada tahun 2001-2002. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa untuk melakukan pengelolaan kebun sawit dengan cara dikerjakan dan dikuasai sendiri, sangat sedikit responden yang menggadaikan lahannya ke orang lain ataupun melakukan sistem bagi hasil dengan orang lain.

Jumlah plot sawit yang dimiliki responden bervariasi dari 1 hingga 9 plot, adapun rata-rata jumlah plot sawit yang dimiliki oleh responden adalah 1-2 plot. Luas kebun sawit yang dimiliki responden berkisar 0.5-25 ha. Para responden di Desa Sungai Pelang Sungai Besar dan Batu Daya paling banyak memiliki kebun sawit dengan luas 1 ha, sedangkan di Desa Pematang Gadung, Mekar Raya dan Kemora paling banyak memiliki lahan swit seluas 2 ha. Berbeda dengan keempat

desa lainnya, para responden di Desa Gema memiliki paling banyak memiliki lahan sawit dengan luas 5 ha. Sawit yang ditanam berumur antara 1-10 tahun, di mana para responden sebagan besar memiliki sawit yang telah berumur 5 tahun. Kebun sawit tersebut berjarak antara 0-17 km dari rumah responden, dan sebagian besar jarak rumah responden ke kebun sawit adalah 0,5- 3 km.

Tabel 4.4. Data jumlah plot, luas kebun, umur, dan jarak ke kebun sawit

Kategori data	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
jumlah plot kekerapan	1-6 1&2	1-8 1	1-4 2	1-6 3	1-9 1	1-2 1	1-2 1
luas (ha) Min-Max kekerapan	1-10 ha 1ha	0.5-25 ha 1 ha	1-9 ha 2 ha	2-14 ha 5 ha	1-25 ha 2 ha	1-5 ha 2 ha	1-4 ha 2 ha
umur (th) kekerapan	1-6 th 5 th	1-7 th 5 th	1-6 th 4 th	1-10 th 5 th	3-7 th	5-7 th 5 th	5-6 th 5 th
jarak ke kebun (km) kekerapan	0-10 km 0,5 km	0-10 km 3 km	0.1-4 km 1-2 km	1-17km	0-2 km 1 km	0-4 km < 1 km	0-5 km < 1 km

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Jenis kebun sawit yang dimiliki responden di Desa Muara Jekak didominasi dengan jenis monokultur (89%) yang seluruhnya berada di lahan pribadi dengan status dikuasai dan digarap sendiri. Luas lahan sawit yang dimiliki berkisar 2-10 ha, paling sering adalah 2 ha. Umur sawit berkisar 2-13 tahun, paling banyak adalah 5 tahun. 56% kebun sawit milik responden kemiringan lahan adalah datar dan 44% miring. Jarak dari rumah ke kebun tidak terlalu jauh, berkisar 3-10 km.

Cara menguasai lahan 57% merupakan warisan, 22% diperoleh dengan membeli dan 11% merupakan hibah/pemberian. Penggunaan lahan saat ini seluruhnya adalah kebun sawit, namun sebelum dikuasai 44% merupakan kebun karet, 22% ladang dan 11% memang sudah menjadi kebun sawit. Perubahan lahan menjadi kebun sawit oleh responden dimulai tahun 2005-2016, paling banyak adalah tahun 2013. Alasan perubahan lahan paling banyak adalah karena ikut teman/ oranglain (56%) dan harga lebih tinggi/menguntungkan (22%). Mayoritas lahan sawit saat ini tidak memiliki sertitikat, hanya 22% responden yang lahannya memiliki sertifikat.

c. Petani plasma

Jumlah plot yang dimiliki responden di Desa Teluk Bayur adalah 1 plot dengan luas yang seragam 2 ha, dan seluruhnya berada di lahan pribadi dengan jarak ke kebun 3-15 km. Umur sawit juga seragam yaitu 22 tahun. Sebanyak 67% responden memiliki lahan sawit dengan kemiringan lahan datar, 22% miring dan 11% curam. 89% responden cara menguasai lahan yang dimiliki adalah pembagian kebun plasma dari perusahaan (56% tahun 2010, 33% menguasai sejak tahun 2000)

dan 1 responden menyatakan warisan dari orang tua. Penggunaan lahan saat ini adalah 100% kebun sawit dan mulai dirubah tahun 1997. sebelum dikuasai 44% merupakan hutan sekunder, 33% kebun damar, 11% kebun karet dan 11% belukar. Sebanyak 89% responden menyatakan lahan sawit memiliki sertifikat.

Janji/kesepakatan tertulis/lisan pengelola kebun inti yang belum dipenuhi menurut responden (89%) adalah adanya kesepakatan tentang sertifikat lahan plasma yang dimiliki petani. Diawal dikemukakan bahwa sertifikat lahan akan diberikan setelah kredit pembangunan kebun dibayar lunas oleh petani setelah kredit lunas (di tahun 5-6), namun sampai saat ini perusahaan belum memberikan sertifikat tersebut, terjadi tumpang tindih dengan HGU.

Sebanyak 44% responden menyatakan ada bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi komunikasi antara petani plasma dengan perusahaan yaitu: Pemerintah Desa telah menjembatani pertemuan antara plasma dan perusahan terkait sertipikat lahan namun samai saat ini tidak/ belum ada titik terang yang didapat oleh plasma, informasi dari BPN bahwa hambatannya adalah perusahaan tidak membayar pajak selama ijin tersebut.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat dua status legalitas lahan sawit, yaitu: (1) Lahan telah bersertifikat, hal ini dinyatakan sebagian besar oleh responden dari Desa Sungai Pelang (56,0%), Sungai Besar (73,3%), Pematang Gadung (68,8%), dan Desa Teluk Bayur (89%); (2) Lahan belum bersertifikat, hal ini dinyatakan sebagian besar responden dari Desa Gema (88,2%), Mekar Raya (93,8%), Kemora (92%), Batu Daya (91%), dan Muara Jekak (78%). Status sertifikat lahan kebun sawit masing-masing desa disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Status of ownership certificates for oil palm plantations

Kepemilikan sertifikat lahan (%)	Gema	Mekar Raya	Pematang Gadung	Sungai Pelang	Sungai Besar	Kemora	Batu Daya	Muara Jekak	Teluk Bayur	rata-rata
Tidak bersertifikat	88,2	93,8	31,2	40	26,7	92	91	78	11	61,3
Bersertifikat	0	6,2	68,8	56	73,3	8	0	22	89	35,9
Tidak menjawab	11,8	0	0	4	0	0	9	0	0	2,8

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

4.4. Pengelolaan kebun sawit mandiri

Sumber Modal

a. Petani mandiri/swadaya

Untuk melakukan pengelolaan kebun sawit para responden memperoleh modal dari berbagai sumber. Hasil studi menunjukkan bahwa sumber dana untuk pengelolaan kebun sawit sebagian besar diperoleh dari modal sendiri (dana mandiri), namun demikian beberapa responden juga memperoleh modal pengelolaan kebun sawit

berasal dana pinjaman, antara lain berasal dari: (1) Pinjaman dari Credit Union (responden di Desa Gema dan Mekar Raya), (2) Pinjaman Bank (responden di Desa Pematang Gadung, Sungai Pelang, dan Sungai Besar), (3) Pinjaman dari keluarga atau petani lain (responden di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar).

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Sebanyak 56% responden menggunakan sumber dana sendiri untuk pengelolaan kebun sawit, namun sebanyak 44% responden lainnya menggunakan modal pinjaman dari koperasi desa, dengan besaran Rp 8 juta-10.5 juta untuk tiap responden.

c. Petani plasma

Seluruh responden menyatakan bahwa sumber dana untuk pengelolaan kebun sawit plasma berasal dari pinjaman. Sebanyak 89% responden menyatakan bahwa dana awal pembangunan sawit plasma sebesar Rp 17 juta diperoleh dengan cara berhutang kepada perusahaan, dari hasil penjualan buah sawit setiap bulan akan dipotong 30%, dan 11% responden menyatakan bahwa awalnya dana pinjaman dan petani tidak tahu bahwa sebelum diserahkan semua biaya dibebankan pada petani. Kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi kebun inti kesepakatan sepihak dari perusahaan inti dan elit desa (78%), sisanya menyatakan tidak mengetahui.

Terdapat 56% responden yang menyatakan dilibatkan dalam kalkukasi biaya invetasi kebun plasmanya yaitu adanya penjelasan dari perusahaan perihal biaya pembangunan kebun mulai dari pembukaan lahan sampai dengan usia 48 bulan, yaitu mulai dari pembukaan lahan, pembuatan jalan, bibit, penanaman dan biaya perawatan sampai dengan plasma diserahkan kepada petani diberitahukan jumlahnya. Sebanyak 89% responden menyatakan terdapat mekanisme pengaduan/masalah mengenai kebun sawit plasma dimana 44% responden menyatakan pengaduan melalui koperasi, 22% menyatakan apabila ada permasalahan plasma petani melaporkan kepada ketua Satuan Kelompok Tani kemudian ketua meneruskan kepada perusahan terkait permasalahan plasma.

Sumber bibit

a. Petani mandiri/swadaya

Salah satu langkah awal pembangunan kebun sawit adalah penyediaan bibit. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari semua desa studi memperoleh bibit sawit dengan cara membeli dari pedagang atau petani lain. Selain itu beberapa di antara mereka juga ada yang membeli bibit dari perusahaan atau membuat bibit sendiri dengan cara mengecambahkan benih sawit yang dipungut dari kebun sawit petani. Jenis bibit yang paling banyak dibudidayakan adalah jenis Marihat, kemudian diikuti jenis Lonsum, Sopim,

Costarika, Sokpindo, Spindo, Tanera dan Sriwijaya. Beberapa responden membeli bibit dalam kondisi bibit siap tanam ataupun kondisi biji yang telah kecambah. Bibit-bibit tersebut dibeli dengan harga yang bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran. Para responden di Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, dan Mekar Raya membeli bibit sawit dengan harga < Rp 10.000/batang, sedangkan di Desa Sungai Pelang dan Gema sebagian besar responden membeli bibit dengan harga Rp 21.000-30.000/batang. Khusus di Desa Kemora jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah Socfindo yaitu oleh 75% responden, 50% diantaranya membeli dari perusahaan dalam bentuk benih dengan harga Rp 1.200.000/500 benih sisanya membeli dari pedagang/petani lain.

Tabel 4.6. Daftar harga bibit sawit di lapangan

Harga bibit (Rp)	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
Min Maks	1.400 75.000	1.000 35.000	1.750 51.000	6.300 35.000	1.200 35.000	2.400 25.000	2.000 25.000
< 10.000	12%	40%	50%	5,9%	43,8%	50%	63%
10.000-20.000	16%	20%	6,3%	29%	0	8%	0
21.000-30.000	68%	16,6%	37,5%	52,9%	18,8%	8%	18%
31.000-40.000	0	3,3%	0	11,8%	6,3	0	0
>41.000	4%	0	6,3%	0	0	0	0

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Terkait pengetahuan petani tentang kualitas bibit yang ditanam, maka studi ini menunjukkan bahwa di Desa Pematang Gadung, Mekar Raya dan Batu Daya lebih dari 50% responden mengetahui pengetahuan tentang kualitas bibit, di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar dan Kemora terdapat 40% responden mengetahui, adapun di Desa Gema hanya 5,8% responden yang mengetahui pengetahuan tentang kualitas bibit yang ditanam tersebut. Di samping itu juga hanya terdapat 20% responden dari semua desa yang memiliki pengetahuan tentang: tempat penjualan bibit berkualitas, ciri-ciri bibit berkualitas, serta sistem tanam sawit.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Sebanyak 56% responden menggunakan sumber dana sendiri untuk pengelolaan kebun sawit, 44% menggunakan modal pinjaman dari koperasi desa, dengan besaran 8 juta-10.5 juta untuk tiap responden.

Sumber bibit sawit mandiri yang menggunakan sumber dana sendiri seluruhnya dibeli dari pedagang bibit dengan harga Rp. 35.000 sedangkan responden dengan sumber dana koperasi seluruhnya menyatakan bahwa bibit disediakan oleh koperasi desa dengan harga Rp. 55.000.

Jenis bibit yang paling banyak di gunakan adalah Marihat. Jenis ini ditanam oleh seluruh responden. Jenis lainnya adalah Sriwijaya 33% responden dan Lonsum 11% responden. Terdapat 44% responden menyatakan mengetahui kualitas bibit

yang di tanam. Petani yang mengetahui pengaruh bibit sawit terhadap kualitas produksi sebanyak 56% yang menyatakan jika kulaitas bibit bagus maka hasil produksi juga bagus.

c. Petani plasma

Seluruh responden menyatakan bahwa petani tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai bibit baik sumber bibit, jenis bibit maupun jumlah bibit yang ditanam, namun 11% responden menyatakan diberitahu bahwa jumlah bibit yang ditanam adalah 260/ 2 ha atau 130/ ha. Sumber bibit sawit seluruhnya diadakan oleh perusahaan. Seluruh responden menyatakan bahwa petani tidak dilibatkan dalam penentuan jenis/kualitas bibit sawit yang ditanam. Hanya 11% responden yang menyatakan mengetahui kualitas bibit yang ditanam di kebun plasma, yaitu jenis Marihat. Sebanyak 89% responden menyatakan bahwa kualitas bibit di kebun plasma sama dengan kebun inti. Tidak ada petani plasma yang menyatakan tahu berapa harga bibit sawit yang ditanam di kebun plasmanya karena bibit disiapkan oleh perusahaan.

Pembukaan lahan

a. Petani mandiri/swadaya

Untuk mengawali budidaya kebun sawit, maka para petani melakukan pembukaan lahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa seluruh responden di Desa Kemora dan Batu Daya dan lebih dari 80% responden di Desa Gema dan Mekar Raya melakukan pembukaan lahan dengan cara tebang, tebas, bakar, dimana lahan-lahan yang telah terbuka tersebut pada awalnya ditanami padi sebelum dikonversi ke kebun sawit. Pembukaan lahan dengan cara ini juga dilakukan di Desa Pematang Gadung (oleh 68% responden) dan di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar (oleh 40% responden). Selain dengan cara tebang, tebas, bakar, juga terdapat alternatif lain untuk membuka lahan yaitu dengan menggunakan herbisida, hal ini terutama dilakukan pada lahan yang telah terbuka.

Adapun alasan dilakukannya pembukaan lahan dengan sistem tebang-tebas-bakar karena cara ini dianggap lebih mudah dan murah. Adanya penerapan sistem pembukaan lahan seperti ini ternyata telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, antara lain: terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dinyatakan sebagian besar responden Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, dan Pematang Gadung. Namun dampak negatif tersebut tidak dirasakan oleh sebagian besar responden di Desa Gema dan Mekar Raya. Pembukaan lahan dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut:

(1) Melalui arisan atau gotong royong anggota keluarga atau tetangga/ petani lain, hal ini dilakukan mayoritas responden di Desa Gema, Mekar Raya, Kemora dan Batu Daya. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembukaan lahan sistem ini hanya sebatas untuk biaya konsumsi (makan dan minum). Untuk pembukaan lahan diperlukan waktu yang cukup lama

tergantung masing-msing desa, contohnya di Desa Mekar Raya, Kemora dan Batu Daya membutuhkan waktu ½-1 bulan, sedangkan di Desa Gema membutuhkan waktu 1- 4 bulan

(2) Dilakukan sendiri oleh petani, hal ini banyak dilakukan oleh responden di Desa Pematang Gadung dan Desa Sungai Pelang. Pembukaan lahan sistem ini tidak membutuhkan biaya HOK.

(3) Menggunakan tenaga orang lain baik melalui sistem borongan, yaitu dengan biaya penebangan pohon Rp 6 juta/ha dan biaya penebasan dan pembersihan sebesar Rp 1,8-3 juta/ha. Selain sistem brongan juga diterapkan sistem upah harian dengan biaya Rp 100.000-150.000/hari. Hal ini banyak dilakukan responden di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar. Waktu yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan adalah ½-1 bulan.

Pembukaan lahan di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar membutuhkan waktu yang lebih singkat (1 hari sampai dengan 2 minggu), hal ini disebabkan lahan mereka rata-rata sudah berupa ladang atau semak belukar sehingga sebagian besar responden (63%) melakukan dengan cara menyemprot herbisida, sebagian lainnya (30%) menggunakan mesin pemotong rumput/traktor.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Seluruh responden melakukan pembukaan lahan dengan sistem tebang-tebas-bakar. Alasan menggunakan teknik tebas-bakar menurut 56% responden adalah untuk kesuburan tanah dan 44% menyatakan karena mudah dan murah. Mayoritas responden menyatakan merasakan dampak negatif penggunaan api untuk pembukaan dan pembersihan lahan yaitu mengganggu kesehatan, 11% menyatakan karena menyebabkan kebakaran lahan. Hok yang dibutuhkan untuk kegiatan pembukaan lahan dilaksanakan berkisar 1-21 HOK dengan biaya Rp 120,000- 2 juta/ha. Menurut responden dengan sumber dana dari pinjaman koperasi desa, biaya pembukaan lahan sudah termasuk didalam pinjaman tersebut.

c. Petani plasma

Seluruh responden menyatakan bahwa petani tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat pembukaan dan persiapan lahan, namun 11% responden menyatakan ada MoU.

Penanaman sawit

a. Petani mandiri/swadaya

Setelah lahan tersedia dan musim hujan tiba, maka para petani melakukan penanaman sawit. Jarak tanam yang umum digunakan adalah 9,2 m x 9,2 m sehingga diperoleh populasi per hektar 136 pokok. Namun pada kenyataannya sering tidak sesuai dikarenakan topografi areal dan kondisi lahan.Jumlah populasi per hektar diduga berpengaruh terhadap tiga komponen produksi yaitu produksi

total kebun, bobot janjang rata-rata dan produktivitas. Pada studi ini para responden menyatakan bahwa jarak tanam yang digunakan dalam penanaman sawit adalah 6 m x 6 m hingga 9 m x 10 m, namun dari hasil studi ini diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden menerapkan jarak tanam: 8 m x 8 m, 8 m x 9 m, dan 9 m x 9 m atau setara dengan jumlah tanaman sawit 100-125 batang/ha atau 126-150 batang/ha. Data penanaman sawit disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.7. Jumlah pohon pada penanaman sawit

Jumlah bibit ditanam/ha	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
Min (batang)	100	78	67	70	56	80	85
Maks (batang)	230	179	235	250	220	187	160
Distribusi (%)							
< 100 / ha	0	3.3	6	6	12.5	16	27
100-125/ ha	8	**40**	**38**	29	**37,5**	**67**	27
126-150/ ha	**68**	**40**	**38**	**41**	31,3	8	18
151-175/ ha	16	13	6	6	6.3	8	18
176-200/ ha	0	3	6	12	6.3	0	0
> 200/ ha	4	0	6	6	6.3	0	0

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Sistem penanaman sawit dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (i) Ditanam sendiri, hal ini dilakukan oleh sebagian besar responden baik secara sendiri ataupun dengan melibatkan keluarga. Cara ini tidak membutuhkan biaya penanaman, (ii) Borongan penanaman per bibit, yaitu Rp 3.000-10.000/bibit, (iii) Borongan penanaman per hektar, yaitu Rp 600.000 – 1.200.000/ha, (iv) Sistem upah harian sebesar Rp 65.000-120.000/hari selama 3-12 hari.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Seluruh responden menyatakan menggunakan jarak tanam dalam menanam sawit, paling sering adalah9mx9m (89% responden) dan 8mx8m (11% responden). Jumlah tanaman sawit yang di tanam 92-200 batang/ ha. Biaya penanaman menurut responden berkisar Rp 500,000-4,8 juta, dan untuk responden dengan sumber pembiayaan dari koperasi desa biaya penanaman sudah termasuk dalam komponen pinjaman.

c. Petani plasma

Seluruh responden menyatakan bahwa petani tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat penamanan bibit, namun Setelah 3 tahun kebun diserahkan kepada petani untuk pengelolaannya.

Perawatan kebun sawit

a. Petani mandiri/swadaya

Setelah bibit ditanam, maka petani akan melakukan perawatan penanaman. Hampir seluruh responden (lebih dari 90%) melakukan perawatan kebun sawit, yaitu: (i) Secara Manual (di Desa Sungai Besar dan Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya), (ii) Menggunakan Herbisida (Desa Sungai Pelang, Pematang Gadung, dan Gema), jenis herbisida yang paling sering digunakan adalah Gramoxon dan Round up, selain itu juga digunakan herbisida jenis Herbatop dan Gempur. Harga herbisida yang digunakan juga bervariasi di setiap desa, yaitu antara Rp 60.000-85.000/ liter hingga Rp 90.000-120.000/ liter.

Perawatan kebun sawit dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (i) Dilakukan sendiri oleh petani dengan melibatkan tenaga dari keluarga, cara ini dilakukan oleh sebagian besar responden, (ii) Upah harian, yaitu Rp 70.000-120.000/ hari sebanyak 2-5 HOK, (iii) Upah borongan, yaitu Rp 500.000-700.000/ha. Di desa Pematang Gadung terdapat 1 orang responden yang memiliki lahan cukup luas sehingga dia memborongkan pekerjaan penyemprotan kepada anak SMA sepulang sekolah dengan sistem borongan Rp 10.000/tangki, dimana setiap anak mampu mengerjakan 6 tangki.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Hampir seluruh responden melakukan perawatan atau penyiangan (89%), mayoritas dilakukan dengan menggunakan kombinasi herbisida dan manual. Waktu yang dibutuhkan untuk perawatan manual 1-24 hari, dengan biaya Rp. 3.000-5.000 / batang atau 1-1,8 juta. Jenis herbisida yang digunakan adalah Gramoxon, Round up dan Paratop.

c. Petani plasma

Hanya 22% responden yang menyatakan bahwa petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat perawatan bibit, namun setelah 3 tahun kebun diserahkan kepada petani untuk pengelolaannya.

Pemupukan

a. Petani mandiri/swadaya

Selain kegiatan perawatan kebun sawit dengan cara penggunaan herbisida, para petani juga melakukan pemupukan tanaman sawit. Sebagian besar responden pada masing-masing desa melakukan kegiatan pemupukan tanaman sawitnya, yaitu: Desa Pematang Gadung (100%), Desa Sungai Pelang (96%), Desa Sungai Besar (93%), Desa Gema (76%), dan Desa Mekar Raya (63%). Namun di Desa Kemora tidak terdapat satupun responden yang melakukan pemupukan begitu juga dengan 92% responden di Desa Batu Daya, hanya 8% responden yang melakukan pemupukan. Jenis pupuk yang paling banyak digunakan adalah NPK

dan Urea, selain itu beberapa responden juga menggunakan Borax, KCl, dolomit, TSP, SP36, dan pupuk kandang. Kegiatan pemupukan dilakukan sejak mulai tanam, usia 1-3 bulan, atau usia 1-3 tahun. Kegiatan pemupukan paling paling banyak dilakukan pada tanaman umur 3 bulan setelah penanaman di lapangan. Frekuensi pemupukan bervariasi, yaitu: 1-4 kali per tahun, namun yang paling sering dilakukan adalah pemupukan sebanyak 1-2 kali/tahun. Jumlah pupuk yang digunakan adalah 1-1,5 kg per batang atau 50-400 kg/ha. Pupuk yang digunakan hampir seluruhnya diperoleh dengan cara membeli dengan harga yang beragam. Mayoritas responden menyatakan bahwa akses membeli pupuk cukup mudah, namun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan modal, tingginya harga pupuk, dan kelangkaan pupuk menurut beberapa responden. Perbandingan jenis dan harga pupuk untuk masing-masing desa disajikan Tabel berikut:

Tabel 4.8. Harga pupuk

Jenis dan Harga pupuk/ 50 kg (Rp)	Desa				
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya
Urea	135.000-160.000	135.000-160.000	130.000-330.000	200.000-250.000	100.000-260.000
NPK	75.000-160.000	140.000-300.000	49.000-200.000	150.000-310.000	100.000-600.000

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Hampir seluruh responden di Desa Muara Jekak melakukan pemupukan (89%), pupuk yang digunakan adalah NPK, Urea, KCl dan borax. Terdapat 44% responden menyatakan memupuk sejak awal penanaman, 11% menyatakan baru dipupuk setelah usia 3 bulan dan 5 tahun. Frekuensi pemupukan adalah 2 kali/tahun dan 3 kali pertahun. Waktu yang dibutuhkan untuk pemupukan 1-9 hari. Jumlah pupuk yang digunakan 250-2.000 kg.

c. Petani plasma

Sebanyak 44% responden di Desa Teluk Bayur menyatakan bahwa petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat pemupukan.

Pengendalian hama dan penyakit

a. Petani mandiri/swadaya

Berbeda dengan perawatan tanaman sawit dalam bentuk penyiangan maupun pemupukan, hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak melakukan pengendalian hama penyakit tanaman sawit, hanya sedikit responden yang melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman sawit, yaitu: Desa Pematang

Gadung (44%), Desa Sungai Besar (37%), Desa Sungai Pelang (28%), Desa Gema (11%), bahkan di desa Mekar Raya, Kemoran, dan Batu Daya tidak ada satupun responden yang melakukan pengendalian hama penyakit.

Kegiatan pengendalian penyakit dilakukan dengan menggunakan pestisida dan dilakukan tidak rutin atau hanya jika terjadi serangan saja. Jenis pestisida yang digunakan antara lain Decis, Furadan dan Regent. Harga pestisida yang digunakan beragam mulai dari Rp 30,000-500,000/botol tergantung jenis dan ukuran pestisida. Dosis yang digunakan responden mengikuti anjuran yang tertera pada label. Kegiatan ini dilakukan 1-2 HOK yang berasal dari dalam atau luar keluarga.

b. Petani swadaya berbasis koperasi
Mayoritas responden tidak melakukan pengendalian hama penyakit hanya 33% responden yang menyatakan melakukan pengendalian hama penyakit. Pengendalian dilakukan hanya apabila ada serangan menggunakan pestisida.

c. Petani plasma
Terdapat 33% responden menyatakan bahwa petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat pengendalian hama penyakit, yaitu bahwa pengendalian hama penyakit dilakukan petani.

Pemangkasan/cabut daun

a. Petani mandiri/swadaya
Hampir seluruh responden disetiap desa melakukan kegiatan pemangkasan/ cabut daun, namun frekuensinya beragam 1-3 kali/tahun, dan sebagian besar menyatakan tidak melakukan secara khusus namun kegiatan pemangkasan umumnya dilakukan bersamaan dengan waktu panen.

Dalam melakukan pengelolaan kebun sawit para responden menyatakan bahwa tidak ada pelibatan anak, namun mereka melibatkan kaum perempuan khusunya untuk kegiatan pemupukan dan pemanenan.

b. Petani swadaya berbasis koperasi
Sebanyak 44% responden menyatakan bahwa petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat pemangkasan daun.

c. Petani plasma
Sebanyak 78% responden melakukan pemangkasan/cabut daun. Kegiatan ini oleh beberapa responden dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemanenan, dengan waktu yang dibutuhkan 1-4 hari.

Pemanenan

a. Petani mandiri/swadaya

Kegiatan pemanenan pertama (buah pasir) umumnya dilakukan pada tanaman sawit berumur antara 2-4 tahun, namun panen pertama yang paling sering dilakukan responden adalah pada umur 3 tahun. Kegiatan pemanenan buah sawit tersebut paling banyak dilakukan 2 kali/bulan atau 24 kali/tahun, namun ada juga yang melakukan pemanenan 1 kali/bulan atau 12 kali/tahun, atau panen sebanyak 18 kali/tahun, yaitu dengan memanen sawit setiap 20 hari. Hasil studi juga menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas yang dilakukan pasca panen buah sawit kecuali kegiatan pengangkutan ke TPH. Data pemanenan buah sawit disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.9. Data pemanenan sawit

Pemanenan	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
Panen pertama							
Umur (min-maks) paling sering	2-4 3	2-4 3	2.5-4 3	2.5-4	2.5-4 3	2.5-5 3	3-4.5 3
Hasil panen (kg/ha/th) kisaran rata-rata	10-9.600 1.369	8-8.000 1.810	17-71.667 5.492	240-4.800 1.364	50-2400 1.063	60-1.300 476	300-1.500 972
Harga (Rp) paling sering	500-1.100 1.000	250-1.100 1.000	500-1.400 700	500-1.200 1.200	600-1.300 1.000	500-700 500	500-750 500
Biaya pemanenan (Rp)	Dilakukan sendiri dan 200/kg	Dilakukan sendiri dan 200/kg	Dilakukan sendiri dan 200-250/kg	Dilakukan sendiri dan 150-500/kg	Dilakukan sendiri dan 200/kg	Dilakukan sendiri	Dilakukan sendiri
Panen setahun terakhirr							
Umur (min-maks) paling sering	3-7 5	3-7 5	3-6 4	4-10 5	3-7 4	5-7 5	5-6 5
Hasil panen (kg/ha/th) kisaran rata-rata	100-48.000 8.601	120-24.000 6.901	174-21.667 4.179	750-16.800 5,621	50-15.360 3.942	400-3.000 1.287	1.200-11.200 4.700
Harga (Rp) paling sering	250-1.680 700	650-1.020 700	520-800 700	650-900 700	600-1.000 700	500-700 500	500 500
Biaya pemanenan (Rp)	Dilakukan sendiri dan 200/kg	Dilakukan sendiri dan 200-250/kg	Dilakukan sendiri dan 200-250/kg	Dilakukan sendiri dan 150-300/kg	Dilakukan sendiri dan 200/kg		

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Umur pertama dilakukan pemanenan/ buah pasir menurut responden berkisar antara 3-5 tahun, namun paling sering pada usia 3 tahun (67%). Kegiatan pemanenan paling banyak dilakukan 2 kali/ bulan atau 24 kali/ tahun, namun 22% responden hanya melakukan pemanenan 1 kali/ bulan atau 12 kali/ tahun.

Panen pertama paling berkisar 2-4 tahun, paling sering dilakukan pada umur 3 tahun(56%), 4 tahun (22%) dan 2 tahun (11%), dengan hasil panen total 78 -19.200 kg/tahun, paling sering adalah 3,600 kg/tahun. Harga buah sawit pada panen pertama berkisar Rp 900-1.500. Sedangkan panen setahun terakhir umur sawit responden 4-13 tahun. Umur 4 tahun 33% dan umur 5 tahun 33%, dengan hasil panen total 14.400-240.000 kg/tahun atau 1.250-24.000 kg/ha/tahun, rata-rata 13.193 kg/ha/tahun. Harga buah sawit panen setahun terakhir Rp 950-1.020, paling sering adalah Rp 1.000 (67% responden).

c. Petani plasma

Hasil studi di Desa Teluk Bayur menunjukkan sebanyak 67% responden menyatakan bahwa petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat pemanenan. Bentuk pelibatan tersebut yaitu Perusahaan menentukan tanggal panen, petani yang melakukan pemanenan dengan upah Rp 1.400/kg TBS dan mandor sawit berkunjung saat panen. Terdapat 67% responden juga menyatakan diberitahu oleh perusahaan mengenai jumlah produksi TBS dengan ada resi dari perusahaan tentang jumlah TBS yaitu 600-700 TBS pada usia 4-5 th tanam dan biasanya petani menghitung sendiri.

Produksi panen tahun terakhir (2017-2018) berkisar antara 12.000 – 30.000 kg/ha/tahun, rata-rata adalah 20.895,6 kg/ha/th. Menurut 56% responden perusahaan sudah memberitahu mengenai harga TBS, atau sudah ditentukan sebelum pemanenan, hanya tahu pembayaran berapa kilo hasil panen dan harga TBS ditentukan oleh pemerintah. Terdapat 56% menyatakan perusahaan memberitahu kalkulasi mengenai pendapatan petani dengan melibatkan petani saat penimbangan, dan 44% menyatakan perusahaan memberitahu mekanisme pembagian keuntungan. Sebanyak 67% responden menyatakan bahwa kondisi/ kualitas lahan (misalnya kelerengan, kerawanan banjir, kerawanan kebakaran/ konflik dengan orangutan, kesuburan) kebun plasma lebih rendah dibandingkan kebun inti.

Kebun plasma menerima perlakuan yang berbeda dengan kebun inti menurut 89% responden. dan menurut seluruh responden produktifitas sawit petani plasma kurang baik dibandingkan dengan kebun inti. Petani plasma mengetahuinya mengetahui berbagai perbedaaan tersebut melalui: Buah lebih banyak di sawit inti karena pertumbuhan sawit lebih subur, sedangkan plasma produksi semakin menurun dan daun sawit menjadi kuning. kebun inti dikelola oleh perusahaan yang dilakukan perawatan,pemupukan secara baik dan benar sementara kebun Plasma dikelola oleh Petani yang kurang mengusai ilmu budidaya sawit dengan baik dan benar. Hasil panen lebih sedikit, ukuran tandannya lebih kecil, karena perawatan dilakukan oleh petani plasma sendiri. Sawit di kebun plasma perawatan, pruning dan pemupukan kurang karena terkendala biaya. Petani plasma adalah pihak yang menanggung resiko jika terjadi gagal panen atau kerusakan (89% responden) dan 11% menyatakan tidak ada kesepakatan.

4.5. Pemasaran hasil sawit

a. Petani mandiri/swadaya

Sosialisasi kebijakan terkait persyaratan buah kelapa sawit yang dapat dibeli disampaikan berbagai responden di lima desa: menurut 69% responden Desa Mekar Raya sosialisasi tersebut pernah dilakukan, namun di Desa Gema hanya 6% responden yang menyatakan pernah ada sosialisasi, bahkan di Desa Sugai Pelang, Sungai Besar, dan Pematang Gadung responden menyatakan tidak pernah dilakukan sosialisasi tersebut.

Studi ini juga menginformasikan bahwa terdapat pengepul/tengkulak di semua desa, bahkan di Desa Sungai Pelang menurut responden terdapat 6 pengepul, adapun di Sungai Besar terdapat 3 orang, namun di Desa Kemora, responden menyatakan tidak ada tengkulak di desa, tengkulak hanya ada di Kec Simpang Sua dan tidak rutin datang ke Desa Kemora . Terdapat mill/ pabrik namun pabrik tersebut berada di luar desa. Meskipun terdapat pabrik, para petani tidak dapat menjual hasil sawit langsung ke pabrik, tetapi mereka hanya bisa melakukan penjualan melalui tengkulak pemegang SPK. Menurut para responden jarak dari desa ke mill/pabrik berkisar 20-220 km. Beberapa mill/pabrik yang diketahui responden dari masing-masing desa sebagai tempat penjualan TBS adalah sebagai berikut: (i) Desa Sungai Pelang: nama mill PT Limpah Sejahtera, (ii) Desa Mekar Raya: nama mill PT CUS, Sinas Mas,dan PT MBK yang berjarak 25-80 km dari desa, (iii) Desa Gema, nama mill PT Sinas Mas, jarak 30 km dari desa, (iv) Desa Pematang Gadung, nama mill PT Metro, PT KAL, dan PT BGA dengan jarak 100 km dari desa, (v) Desa Sungai Besar, nama mill PT Metro, PT KAL, PT BGA, dan PT Limpah Sejahtera dengan jarak 45-160 km.

Mayoritas petani menjual sawit kepada pengepul/tengkulak. Metode penjualan yang dilakukan adalah petani mengangkut hasil panen ke rumah dan pengepul akan datang menjemput buah langsung ke rumah/kebun petani langsung, sebagian petani menumpuk hasil panen di tepi jalan dan akan diambil oleh anak buah dari pengepul atau petani akan menjual di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan biaya angkut dari TPH dibebankan pada pengepul. Responden di desa Sungai Pelang seluruhnya menyatakan tidak mengetahui pemegang DO dan perbedaan harga TBS, sedangkan menurut responden di Sungai Besar dan Mekar Raya perbedaan harga terdapat selisih Rp 400-500 antara harga di desa dan di pabrik.
Hasil survey mendapatkan responden beberapa desa yang langsung menjual TBS ke pabrik, yaitu: (i) Desa Pematang Gadung, terdapat 1 responden memiliki Delivery Order (DO) yang menjual langsung TBS ke PT KAL namun tidak pernah mendapatkan pendampingan dari pabrik, (ii) Desa Sungai Pelang, terdapat petani yang langsung menjual ke PT Limpah Sejahtera namun tidak memiliki DO sehingga masih melalui perantara, (iii) Desa Mekar Raya, terdapat 1 responden yang menjadi pengepul buah sawit yang menjual ke PT Sinas Mas, namun dikarenakan

tidak memiliki DO penjualan dilakukan melalui tengkulak lain sebagai pemegang SPK. Sebagai catatan bahwa buah sawit harus segera diproses dalam kurun waktu 48 jam setelah dipanen, karena akan berdampak pada semakin rusaknya kualitas minyak sawit mentah (CPO).

Sebagian besar responden menyatakan bahwa penentu harga dan sumber informasi harga sawit adalah dari pengepul/tengkulak, sedangkan penentu harga dari tengkulak adalah tengkulak yang memiliki SPK dari pabrik. Tansaksi antara petani dengan pengepul dilakukan secara cash yaitu dibayar langsung setelah penimbangan TBS, selain itu ada juga transaksi melalui sistem ijon sebagaimana disampaikan oleh 16% responden di Desa Sungai Besar.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Seluruh responden menyatakan ada kelompok tani yaitu kelompok tani sawit Karya Bersama, dan seluruh responden tergabung dalam kelompok tersebut. Tujuan kelompok tani menurut responden adalah:

- Untuk persyaratan pinjaman desa (44%)
- Memodali pembangunan kebun mandiri, membantu penyediaan pupuk, herbisida dan membeli TBS (|22%)
- Mempermudah penjualan hasil TBS dan mempermudah pembelian pupuk (11%)\
- Untuk meningkatkan kebersamaan (11%)

Dalam penjualan sawit 56% responden menyatakan bahwa biaya angkut sudah dipotong koperasi di harga jual, 11% menyatakan biaya 150/kg.

Seluruh responden menyatakan terdapat tengkulak dan ada mil. Jarak desa ke mill 8-30 km. Tujuan penjualan TBS menurut 66% responden adalah PT PTS Bumi Raya Grup, dan 33% PT LAB (lanang Agro Bersatu). Cara penjualan 11% menjual melalui koperasi, 11% melalui pengepul, 22% melalui BUMDES dan 22% menjual langsung ke PKS. Dalam penjualan langsung responden menyatakan memiliki kontrak/DO (delivery order) dengan mill. Pendampingan dari mill adalah berupa teknis memanen buah sawit dan kontrak koperasi dengan PT PTS. Permasalahan dalam pemasaran menurut responden adalah:

- Jika CPO di PT PTS penuh maka panen anak mundur
- Harga tidak stabil

4.6. Pelatihan dan pembinaan

a. Petani mandiri/swadaya

Mayoritas responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Hanya 12% responden di Desa Pematang Gadung dan 6.3% responden di Desa Mekar Raya yang menyatakan pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan di Desa Pematang Gadung yaitu tentang cara budidaya

sawit yang bagus sesuai standar, cara penanaman, perawatan, pemupukan, menjaga buah supaya berkualitas, dan pembuatan larutan untuk pengendalian hama penyakit (oleh PT BGA). Sedangkan di Desa Mekar Raya pelatihan diperoleh responden dari perusahaan PT Prakasa Tani Sejati (PTS) Bumi Raya Group. Hasil studi menunjukkan bahwa para responden membutuhkan beberapa topik pelatihan terkait budidaya sawit, yaitu: (i) Budidaya dan perawatan sawit yang benar, (ii) Cara mengupayakan sawit berbuah maksimal, (iii) Pelatihan membuat racun rumput/gulma, (iv) Pelatihan membuat pupuk, (v) Pelatihan pemasaran.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Hanya terdapat 1 responden yang pernah mendapat pelatihan yaitu tentang teknis pemanenan dari PT PTS. Jenis pelatihan yang diinginkan responden adalah pelatihan dari Dinas Perkebunan mengenai:

- Cara berbudidaya sawit yang benar (56%)
- Cara pemupukan dan perawatan
- Cara pengolahan sawit

c. Petani plasma

Sebanyak 67% responden menyatakan pernah mendapatkan pelatihan ataupun pembinaan mengenai sawit namun tidak secara lengkap diantaranya tentang Pengelolaan perkebunan sawit,cara pemupukan (jumlah pupuk untuk setiap pohon),cara perawatan sawit yang baik, cara pruning dan cara pemanenan, yang dilakukan perusahaan melalui mandor. Mayoritas menyatakan pelatihan dilakukan 1 kali, namun ada juga yang menyatakan pernah mendapat pembinaan 20-24 kali. Seluruh responden yang mendapatkan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan ataupun pembinaan tersebut bermanfaat bagi petani diantaranya petani dapat mengetahui cara memupuk dan memanen serta pengelolaan kebun sawit. Jenis pelatihan ataupun pembinaan yang diinginkan petani untuk pengembangan pengelolaan sawit adalah pelatihan dari perusahaan mengenai Budidaya / berkebun Sawit yaitu Pelatihan pemupukan dan perawatan, Peremajaan, Pruning dan sistem tanam serta Pemanenan.

Terdapat 78% responden menyatakan ada pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh perusahaan/kebun inti kepada petani plasma yaitu:

- Jarak tanam
- Cara perawatan dan pemupukan,
- Pengendalian hama
- Cara dan waktu pemanenan, Peralatan dodos dari perusahaan
- Mandor menyuluh ketua SKT untuk diteruskan kepada anggota
- Pengetahuan pengolahan sawit melalui mandor

4.7. Modal usaha kebun sawit mandiri

a. Petani mandiri/swadaya

Sebanyak 78,4% responden menyatakan bahwa modal untuk usaha perkebunan sawit diperoleh dari modal sendiri yang digabungkan dengan pengeluaran rumah tangga/lainnya, hanya sedikit responden (10-20%) yang menyiapkan modal khusus untuk usaha kebun sawit mandiri. Sebagian kecil responden (6,6%) memperoleh modal usaha dari pinjaman, yaitu: (i) Pinjaman Credit Union (CU), hal ini terjadi di Desa Gema (CU Pancur Dangeri) dan Desa Mekar Raya (CU Lantang Tipo), (ii) Pinjaman Bank, hal ini terjadi di Desa Pematang Gadung, Sungai Pelang, dan Sungai Besar, (iii) Pinjaman dari keluarga atau petani lain, hal ini terjadi di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar. Adapun sisanya (12,6% repsonden) memperoleh modal dari usaha lainnya seperti dari hasil tukang, panen karet, sebagai buruh, berjualan, dll.

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Sebanyak 56% responden sumber modal usaha sawit berasal dari dana sendiri, dan 44% responden sumber dana berasal dari koperasi Kelompok Tani Karya Bersama. Sebanyak 56% menyatakan menyiapkan modal khusus untuk budidaya sawit.

c. Petani plasma

Seluruh responden menyatakan bahwa sumber dana untuk pengelolaan kebun sawit plasma berasal dari pinjaman. 89% responden menyatakan bahwa dana awal pembangunan sawit plasma sebesar Rp 17 juta mengutang kepada perusahaan, dari hasil penjualan buah sawit setiap bulan maka dipotong 30% dan 11% responden menyatakan bahwa awalnya dana pinjaman yang petani tidak tahu bahwa sebelum diserahkan semua biaya dibebankan pada petani.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki sertifikat lahan pada kebun sawit adalah responden di Desa Mekar Raya (6,2%), Pematang Gadung (68,8%), Sungai Pelang (56%), dan Sungai Besar (73,3%). Responden-responden inilah yang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dana baik dari Credit Union maupun bank. Adapun responden sebagian besar responden yang belum memiliki sertifikat terdapat di Desa Gema (88,2%) dan Desa Mekar Raya (93,8%).

4.8. Pendapatan kebun sawit

a. Petani mandiri/swadaya

Hasil studi menunjukkan bahwa sawit, enterpreneur, dan karet merupakan sumber pendapatan terbesar pada desa-desa tertentu, sebagai berikut: (i) Sumber pendapatan terbesar berasal dari sawit terdapat di Desa Mekar Raya,

Sungai Besar, dan Pematang Gadung; (ii) Sumber pendapatan terbesar berasal dari enterpreneur terdapat di Desa Gema dan Sungai Pelang, dan (iii) Sumber pendapatan terbesar berasal dari karet terdapat di Desa Batu Daya dan Kemora.

Rata-rata pendapatan per tahun yang diperoleh khusus dari sawit mandiri paling tinggi adalah di Desa Gema (Rp 23.151.765/tahun), diikuti Desa Pematang Gadung (Rp 21.022.625,-/tahun), Desa Mekar Raya (Rp 17.396.625/tahun), Desa Sungai Besar (Rp 11.314.533/tahun), Desa Sungai Pelang (Rp 9.380.480/tahun), Desa Batu Daya Rp 7.581.818/ tahun dan Desa Kemora Rp 5.625.000/ tahun. Dari total pendapatan rata-rata responden per tahun, persentase pendapatan yang disumbangkan dari sawit pada masing-masing desa beragam, yaitu: Desa Gema (menyumbangkan 30%), Desa Mekar Raya (menyumbangkan 49%), Desa Sungai Pelang (menyumbangkan 23%), Desa Sungai Besar (menyumbangkan 41%), Desa Pematang Gadung (menyumbangkan 34%), Desa Batu Daya (menyumbangkan 22%) dan Desa Kemora (menyumbangkan 18%). Sebanyak 20-30% responden menyatakan bahwa terjadi perbaikan ekonomi rumah tangga setelah ada usaha kebun sawit, namun hanya 10% responden yang menyatakan hasil sawit telah mencukupi kebutuhan hidup.

Tabel 4.10. Daftar sumber pendapatan

Sumber pendapatan	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
1. Pertanian							
kebun sawit	23.151.765	17.396.625	9.380.480	11.314.533	21.022.625	5.265.000	7.581.818
kebun karet	4.725.882	4.507.500	68.000	2.293.333	3.397.500	18.556.667	15.981.818
sawah	0	0	6.820.000	2.066.667	4.781.250	0	0
lainnya	1.157.647	562.500	796.000	266.667	1.900.000	0	0
2. Pekerja	0	150.000	4.724.000	3.450.000	1.250.000	0	909.091
3. Pengusaha	27.552.941	2.250.000	13.800.000	5.733.333	16.465.000	0	0
4. Profesional	12.705.882	10.187.500	2.080.000	133.333	7.000.000	4.666.667	7.454.545
5. lainnya	3.823.529	0	1.580.000	2.333.333	7.093.750	0	2.727.273
6. Pendapatan total per tahun	73.117.647	35.054.125	39.248.480	27.591.200	62.910.125	28.488.333	36.654.545

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Pendapatan dari sektor kebun sawit adalah 28% dari total sumber pendapatan pertahun responden. Sebanyak 89% responden menyatakan ada perbaikan ekonomi setelah mengelola kebun sawit, yaitu karena adanya pendapatan yang tetap.

Tabel 4.11. Sumber pendapatan responden di Desa Muara Jekak

Sumber pendapatan	Rp	%
1. Pertanian		
kebun sawit	30.971.111	27,63
kebun karet	906.667	0,81
sawah	88.800	0,08
2. Pekerja	0	0
3. Pengusaha	62.155.556	5545
4. Profesional	17.333.333	15,46
5. Lainnya	644.444	0,57
6. Pendapatan total per tahun	112.099.911	100

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

c. Petani plasma

Pendapatan dari sektor kebun sawit adalah 68% dari total sumber pendapatan pertahun responden. 44% responden menyatakan ada perbaikan ekonomi setelah mengelola kebun sawit, yaitu karena hasil sawit lebih besar dibandingkan pendapatan lainnya bahkan terdapat responden yang menyatakan bahwa dengan adanya usaha perkebunan sawit kami bisa membangun rumah, membeli kendaraan dan membuka kebun sawit mandiri.

Tabel 4.12. Sumber pendapatan responden di Desa Teluk Bayur

Sumber pendapatan	Pendapatan per rumah tangga	
	Rp	%
1. Pertanian		
kebun sawit	58.174.222	68,16
kebun karet	7.066.667	8,28
sawah	1.008.333	1,18
2. Pekerja	55.556	0,07
3. Pengusaha	13.333.333	15,62
4. Profesional	3.555.556	4,17
5. Lainnya	2.155.556	2,53
6. Pendapatan total per tahun	85.349.223	100

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

4.9. Kondisi rumah

a. Petani mandiri/swadaya

Mayoritas responden di Sungai Pelang dan Sungai Besar menyatakan bahwa rumah mereka berlantai kayu dan berdinding papan, di Desa Pematang Gadung,

Gema dan Batu Daya mayoritas rumah mereka berlantai keramik dan berdinding bata, sedangkan di Desa Mekar Raya, dan Kemora mayoritas rumah mereka berlantai keramik dan berdinding semen. Atap rumah hampir seluruhnya adalah seng/asbes khususnya di desa Gema dan Mekar Raya, sedangkan di Sunga Besar, Sungai Pelang, dan Pematang Gadung selain seng/asbes, terdapat beberapa responden yang rumahnya beratap sirap dan genteng.

Ukuran rumah dan Luas total pekarangan bervariasi, di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar, mayoritas responden memiliki rumah dengan ukuran 36 m2 dan pekarangan 2.500 m2, sedangkan untuk desa Pematang Gadung, Gema, dan Mekar Raya memiliki ukuran yang beragam. Secara detil data ukuran rumah dan pekarangan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.13. Kondisi rumah

Ukuran (m^2)	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
Rumah							
kisaran	25-400	36-1.125	54-360	45-280	30-200	35-98	54-84
kekerapan	36	36				63	63
Pekarangan							
kisaran	200-20.000	200-19.600	256-3000	96-1.200	100-8.500	200-3500	200-2.000
kekerapan	2.500	2.500					

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

b. Petani swadaya berbasis koperasi

Lantai rumah 56% adalah keramik, 33% kayu dan 11% dari tanah. Dinding 78% adalah batu bata dan 22% papan. Atap 78% adalah seng/asbes dan 22% sirap. Ukuran rumah 54-198 m^2 dan ukuran tanah 64-2,000 m^2.

c. Petani plasma

Seluruh responden memiliki rumah dengan dinding bata dan atap dari seng/asbes. 56% responden berlantai keramik, 22% lantai kayu dan 11% berlantai semen. Ukuran rumah 60-175 m^2, paling sering adalah 72 m^2, dengan ukuran tanah 140-4800 m^2.

4.10. Keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

a. Petani mandiri/swadaya

Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) merupakan areal yang memiliki suatu nilai biologi, ekologi, sosial atau budaya atau atribut-atribut yang berkaitan dengan ekosistem yang dikelola secara alami atau tradisional, yang dianggap sangat

penting pada skala nasional, regional dan global. Studi ini menginformasikan bahwa tidak banyak responden yang memahami tentang konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT), hal ini ditunjukkan oleh rendahnya persentase responden yang memahami konsep NKT, yaitu: Desa Pematang Gadung (6%), Desa Gema (6%), Desa Mekar Raya (25%), Desa Sungai Pelang (0%), Desa Batu Daya (27%), Desa Kemora (0%) dan Desa Sungai Besar (0%). Demikian pula pengetahuan responden tentang BKSDA masih rendah, antara lain: Desa Sungai Pelang (4%), Desa Pematang Gadung (12,5%), dan Desa Gema (6%).

Mengenai keberadaan flora/ fauna yang dilindungi yang kini tidak ditemukan keberadaannya menurut responden pada masing-masing desa adalah sebagai berikut: (i) Desa Sungai Pelang, ditemukan orangutan terakhir tahun 2013, (ii) Desa Sungai Besar, orangutan terakhir ditemukan tahun 1990 dan bekantan terakhir ditemukan pada tahun 2017-2018, (iii) Desa Pematang Gadung, burung Enggang terakhir ditemukan tahun 2015, (iv) Desa Kemora, orangutan terakhir tahun 1970-1980. Sebagian besar responden (94%) di Desa Mekar Raya, 83% di Desa Kemora dan 73% di Desa Batu Daya memanfaatkan air sungai untuk mandi dan mencuci, adapun penggunaan lainnya yang juga dimanfaatkan oleh desa lain adalah untuk transportasi air, irigasi pertanian atau kebun, serta mencari ikan. Berikut keberadaan ABKT di sekitar kebun menurut responden:

Tabel 4.14. Areal Bernilai Konservasi Tinggi di sekitar desa

ABKT	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
hutan lindung	-	Ada: 3,3%	Ada: 6,3 ,%	Ada: 5,9%	Ada: 93,8%	Ada: 42%	Ada: 55%
Taman Nasional	-	-	-	-	-	-	-
hutan adat	-	Ada: 3,3%	Ada: 6,3 ,%	-	-	-	Ada: 6%
APL (areal berhutan non kawasan hutan)	Ada: 4%	Ada: 3,3%	Ada: 37,5%	Ada: 5,9%	Ada: 87,5%	Ada: 25%	Ada: 45%
sempadan sungai	-	-	Ada: 56,3%	Ada: 11,8%	Ada: 43,8%	Ada: 58%	Ada: 63%
areal gambut kedalaman >3m	Ada: 28%	Ada: 33,3%	Ada: 18,8%	Ada: 17,6%	-	-	-
tembawang	-	Ada: 3,3%	Ada: 12,5	Ada: 5,9%	-	Ada: 58%	Ada: 73%
terdapat danau/rawa yang disinggahi burung/ satwa lain	-	Ada: 36,7%	Ada: 25%	Ada: 11,8%	-	-	-

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Menurut responden ABKT yang berada di sekitar areal kebun paling banyak berstatus APL (Areal Pemanfaatan Lain) yang ada di hampir semua desa. Keberadaan ABKT lainnya adalah sebagai berikut: (i) Hutan lindung terdapat

di Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Gema, Mekar Raya, Kemora dan Batu Daya (ii) Areal gambut dengan kedalaman > 3 m, terdapat di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, Pematang Gadung, dan Gema, (iii) Hutan adat, terdapat di di Desa Pematang Gadung, Gema, dan Batu Daya (iv) Sempadan sungai, terdapat di Pematang Gadung, Gema, Mekar Raya Kemora dan Batu Daya, dan (v) Tembawang, terdapat di Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Gema Kemora dan Batu Daya.

4.11. Pengetahuan mengenai sertifikasi sawit berkelanjutan

a. Petani mandiri/swadaya

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui tentang sertifikasi kelapa sawit karena mereka tidak mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut. Beberapa responden yang mengetahui tentang sertifikasi kelapa sawit diperoleh melalui inisiatif sendiri. Kondisi ini menyebabkan sangat sedikit responden yang tertarik untuk melakukan sertifikasi kebun sawit mereka. Beberapa hambatan untuk mendapatkan sertifikasi kebun sawit menurut responden antara lain: (i) Responden sama sekali belum mendapatkan informasi tentang sertifikasi kelapa sawit, (ii) Responden tidak mengetahui cara mengurus sertifikasi kelapa sawit, (iii) Responden belum mengetahui manfaat sertifikasi kelapa sawit, (iv) Responden memiliki keterbatasan modal.

Berbagai hambatan di atas menyebabkan pengetahuan responden tentang RSPO, ISPO, maupun pertanian berkelanjutan juga sangat terbatas. Dari hasil survey diperoleh bahwa hanya 6% responden baik di Desa Pematang Gadung maupun Mekar Raya yang pernah memperoleh informasi mengenai RSPO/ISPO, sedangkan informasi tentang pertanian berkelanjutan hanya diketahui oleh 12.5% responden dari Desa Pematang Gadung dan 6% responden dari Desa Gema.

b. Petani plasma

Seluruh responden menyatakan tidak mendengar dan mengerti maksud dari sertifikasi pengelolaan kebun sawit.

4.12. Peremajaan Kelapa Sawit (*Replanting*)

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan replanting, kecuali 53% responden dari Desa Gema yang memiliki rencana melakukan replanting. Alasan responden belum memiliki rencana replanting adalah karena selain tanaman sawit mereka saat ini masih sangat muda, juga harga sawit cenderung murah. Responden juga tidak menyiapkan dana khusus untuk replanting, bahkan sebagian besar menyatakan belum mengetahui dari mana nantinya sumber pembiayaan

untuk kegiatan replanting tersebut jika dilakukan. Sebagian responden lainnya menyiapkan dana khusus yang berasal dari hasil menjual buah sawit, menyisihkan dari sisa pengeluaran rumah tangga, atau meminjam ke CU dan Bank.

Selain melakukan replanting pada tanaman sawit, terdapat juga petani yang berencana memperluas lahan sawitnya. Jumlah responden yang berencana memperluas lahan sawitnya di masing-masing desa adalah sebagai berikut: Desa Sungai Besar (50%), Pematang Gadung (38%), Sungai Pelang (32%), Desa Gema dan Mekar Raya (< 20%) sedangkan di Desa Kemora dan Batu Daya tidak ada rencana perluasan lahan sawit. Alasan masih sedikitnya jumlah responden yang ingin memperluas lahan sawit adalah karena harga sawit masih murah. Adapun alasan responden yang ingin memperluas lahan sawitnya adalah karena masih banyak mempunyai lahan yang belum tergarap (yaitu lahan transmigrasi seluas 2 ha di Desa Sungai Besar), atau karena ingin lebih banyak memiliki sawit serta masih memiliki lahan berupa belukar.

Di antara para responden yang akan melakukan replanting, terdapat mereka yang berencana menggunakan bibit bersertifikat, antara lain: Desa Gema (76%), Mekar Raya (56%), Sungai Besar (53%), Sungai Pelang (44%), dan Pematang Gadung (44%). Tujuan menggunakan bibit bersertifikat adalah agar menghasilkan buah dan produksi yang baik. Namun demikian beberapa responden juga menyatakan bahwa harga bibit bersertifikat yang lebih mahal menjadi alasan petani tidak menggunakannya untuk *replanting*.

4.13. Organisasi petani sawit

Terkait dengan keberadaan organisasi petani kelapa sawit, maka berdasarkan survey di tujuh desa menunjukkan bahwa keberadaan organisasi kelompok tani hanya terdapat di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, dan Pematang Gadung dengan kondisi sebagai berikut: (i) Desa Sungai Pelang, sebanyak 16% responden merupakan anggota kelompok sawit yang bertujuan untuk mendapatkan pola bagi hasil dengan PT Limpah Sejahtera, (ii) Desa Sungai Besar, sebanyak 43% responden menyatakan sebagai anggota kelompok tani sawit, dan (iii) Desa Pematang Gadung, sebanyak 25% responden menyatakan sebagai anggota kelompok tani sawit.

Adapun di Desa Mekar Raya, sebanyak 12,5% responden menyatakan tergabung dalam kelompok tani namun aktivitasnya lebih tentang petani sawah sehingga manfaat yang diperoleh adalah untuk memudahkan mendapat bantuan sarana produksi (pupuk dan benih) padi dari pemerintah. Sedangkan di Desa Kemora dan Batu Daya tidak ada responden yang tergabung dalam kelompok tani.

Terdapat beberapa alasan mengapa petani tidak menjadi anggota organisasi petani, antara lain: (i) Petani tidak tertarik, (ii) Petani tidak ada yang mengajak atau memfasilitasi untuk menjadi anggota, (iii) Petani tidak memiliki waktu, (iv) Belum tersedianya organisasi petani yang sesuai dengan kebutuhan petani, khusus di Desa Gema hingga ini belum terbentuk organisasi petani.

4.14. Tabungan

Hasil survey menunjukkan persentase jumlah responden yang melakukan kegiatan menabung di masing-masing desa, sebagai berikut: (i) Desa Mekar Raya (100%), (ii) Desa Gema (76%), (iii) Desa Pematang Gadung (56%), (iv) Desa Sungai Besar (50%), (v) Desa Sungai Pelang (44%) (vi) Desa Kemora (58%) dan (vii) Desa Batu Daya (91%). Rata-rata jumlah tabungan yang paling sering dilakukan oleh para responden adalah kurang dari Rp 500.000/bulan. Para responden menyatakan bahwa uang tabungan tersebut rencananya digunakan untuk: (i) Membiayai kebutuhan pendidikan/sekolah anak, (ii) Membeli lahan/investasi, (iii) Kebutuhan sehari-hari/keluarga, (iv) Kebutuhan yang mendesak, (v) Kesehatan, dan (vi) modal usaha. Dari tabungan yang dimiliki, hampir seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak menyisihkan dana untuk kegiatan replanting, hanya sedikit responden (6,3%) di Desa Mekar Raya yang menyatakan bahwa tabungan juga akan digunakan untuk *replanting*.

4.15. Rencana masa depan

Terkait rencana pendidikan anak, hampir seluruh responden berkeinginan agar pendidikan anak mereka sampai pada tingkat perguruan tinggi (sarjana), walaupun terdapat responden di Desa Sungai Pelang (16%) , Desa Sungai Besar (23%) Desa Kemora (16%) dan Desa Batu Daya (9%). yang berkeinginan agar pendidikan anak sampai SMA.

Hasil survey menunjukkan bahwa beberapa responden dari lima desa menyatakan adanya peningkatan kualitas hidup petani setelah mereka berkebun sawit, yaitu: (i) Desa Gema (52.94%), (ii) Desa Pematang Gadung (43,8%), (iii) Desa Sungai Besar (36,7%), (iv) Desa Sungai Pelang (32%), dan (v) Desa Mekar Raya (6,3%). Perubahan yang dirasakan oleh mereka adalah bahwa melalui berkebun sawit, sumber pendapatan yang awalnya hanya berasal dari upah sebagai buruh tidak tetap, maka saat ini mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dari sawit walaupun hasilnya hanya sedikit. Mayoritas responden menyatakan bahwa usaha kebun sawit tidak menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup petani, selain itu responden juga menyatakan adanya dampak yang baik terhadap akses jalan serta kelancaran komunikasi, namun sayangnya belum secara significant meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu para petani menaruh harapan kepada pemerintah sebagai berikut: (i) Pemerintah memberikan perhatian kepada

petani sawit mandiri, (ii) Pemerintah memberi bantuan pendampingan agar dapat melakukan penjualan TBS secara langsung ke PKS, (iii) Adanya bantuan pupuk, bibit unggul, saprodi, (iv) Adanya pembinaan/penyuluhan tentang budidaya sawit, (v) Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan harga sawit.

4.16. Kondisi topografi dan tanah kebun sawit

Kondisi topografi dan tanah kebun sawit pada desa-desa yang menjadi lokasi studi menunjukkan informasi yang beragam. Khusus kondisi topografi adalah sebagai berikut:

(a) ***Topografi datar***, terdapat tiga desa yang seluruh lahannya (100%) bertopografi datar (Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, dan Pematang Gadung), serta sebagian lahan di Desa Gema (12%), Desa Mekar Raya (44%), Desa Kemora (8%) dan Desa Batu Daya (45%)

(b) ***Topografi bergelombang***, terdapat di Desa Gema (29%) dan Desa Mekar Raya (38%), Desa Kemora (16%) dan Desa Batu Daya (27%),

(c) ***Topografi curam***, terdapat di Desa Gema (41%), Kemora (8%) dan Desa Mekar Raya (6,3%).

Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis tanah kebun sawit, yaitu: tanah mineral, gambut, dan rawa. Jenis tanah kebun sawit di masing-masing desa adalah sebagai berikut: (i) Desa Sungai Pelang, responden menyatakan bahwa kondisi tanah kebun sawit 40% merupakan gambut, 16% mineral, 4% menyatakan kebun sawit berada pada lahan gambut dan mineral, (ii) Desa Sungai Besar, 57% responden menyatakan bahwa kondisi tanah kebun sawit adalah gambut, 17% rawa-rawa kecil dan 10% tanah mineral, (iii) Desa Pematang Gadung, 50% responden menyatakan bahwa tanah lahan sawit merupakan tanah mineral dan 31% merupakan rawa-rawa kecil, (iv) Desa Gema, 88% responden menyatakan tanah kebun sawit mereka merupakan tanah mineral, (v) Desa Mekar Raya, sebanyak 75% responden menyatakan kebun sawitnya berupa tanah mineral (vi) Desa Kemora sebanyak 33% responden menyatakan kebun sawitnya berupa tanah mineral dan (vii) Desa Batu Daya. Sebanyak 73% responden menyatakan kebun sawitnya berupa tanah mineral.

4.17. Perawatan Kebun Sawit

Studi ini melakukan survey tentang kondisi pasar pikul, piringan, gawang mati, TPH, parit koleksi, dan parit utama. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa kegiatan perawatan kebun yang paling lengkap dan baik dijumpai di Desa Pematang Gadung, hal ini dinyatakan oleh para responden sebagai berikut: (i) Kondisi pasar pikul yang masih baik (dinyatakan 68,8% responden), (ii) Kondisi piringan masih baik (75% responden), (iii) Kondisi gawang mati masih baik

(62,5% responden), (iv) Kondisi Tempat Pengumpulan Hasil masih baik (81,3% responden), (v) Kondisi parit koleksi masih baik (dinyatakan 75% responden), dan (vi) Kondisi parit utama masih baik (dinyatakan 75% responden). Adapun di Desa Gema, terdapat responden yang menyatakan tidak memiliki piringan (47%), tidak memiliki TPH (47%), dan tidak memiliki parit utama (35,3%). Responden yang tidak memiliki parit utama juga terdapat di Desa Mekar Raya (62,5%), selain itu responden di desa ini tidak memiliki parit koleksi (62,5%). Frekuensi petani membersihkan parit bervariasi 1-3 kali/tahun. Pembersihan parit koleksi dikerjakan sendiri dengan cara membersihkan gulma/semak apabila rimbun secara manual melalui pembabatan. Sebagian besar responden menyatakan tidak pernah memelihara, sedangkan pemeiharaan parit utama dikerjakan oleh pemerintah. Secara detil kegiatan perawatan kebun sawit disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.15. Kondisi kegiatan perawatan kebun sawit

Parameter	Desa						
	Sungai Pelang	Sungai Besar	Pematang Gadung	Gema	Mekar Raya	Kemora	Batu Daya
Kondisi pasar pikul	Baik: 64,0%	Baik: 43,3%	Baik: 68,8%	Baik: 35,29%	Baik: 50%	TT: 33%	Baik: 27%
Kondisi piringan	Baik: 48,0%	Baik: 56,7%	Baik: 75%	Baik: 1,2% TA: 47%	Baik: 44%	TT: 33%	Baik: 27%
Kondisi gawangan mati	Baik: 60,0%	Baik: 53,3%	Baik: 62,5%	Baik: 29,4%	Baik: 50%	TT: 33%	Baik: 27%
Kondisi tempat pengumpulan hasil (TPH)	Baik: 56,0%	Baik: 73,3%	Baik: 81,3%	Baik: 41% TA: 47%	Baik: 62%	TT: 33%	Baik: 27%
Kondisi parit koleksi	Baik: 52,0%	Baik: 66,7%	Baik: 75%	Baik: 11,7%	TA: 62,5% TT: 37,5%	TT: 25% TA: 16%	TT: 55% TA: 9%
Kondisi parit utama	Baik: 60,0%	Baik: 83,3%	Baik: 75%	Baik: 5,9% TA: 35,3%	TA: 62,5% TT: 37,5%	TT: 25% TA: 8%	TT: 55% TA: 9%

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)
Keterangan: TA = Tidak ada; **TT** = Tidak terpelihara

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kegiatan perawatan kebun terlengkap dilakukan di Desa Pematang Gadung, kemudian diikuti oleh Desa Sungai Besar, Sungai Pelang, Mekar Raya, dan Batu Daya. Adapun di Desa Kemora tidak dilakukan perawatan kebun sama sekali.

4.18. Konservasi tanah

Survey terkait kegiatan konservasi tanah yang dilakukan para responden menunjukkan hasil sebagai berikut: (i) Guludan teras, hampir seluruh responden menyatakan tidak terdapat guludan teras pada kebun sawitnya, sangat sedikit

responden (6.3%) di Desa Mekar Raya dan (9%) di Desa Batu Daya yang memiliki guludan teras, (ii) Tapal kuda, tidak banyak responden yang menyiapkan tapal kuda di kebu sawitnya, yaitu: Desa Sungai Besar (6.6%), Desa Gema (29.4%), Desa Batu Daya (27%) dan Desa Mekar Raya (25%), (iii) Frond stacking di lereng, seluruh responden di Desa Mekar Raya menyatakan ada, (iv) Embung/Rorak, tidak ada responden yang menyatakan keberadaan rorak/embung. Pengetahuan responden tentang pentingnya konservai tanah masih terbatas, yaitu: Desa Mekar Raya (50% responden), Desa Pematang Gadung (19% responden), Desa Batu Daya (9%) dan Desa Gema (6% responden). Pengetahuan responden tentang jarak minimal penanaman sawit dari batas sungai juga masih kurang, yaitu: Desa Mekar Raya (44%), Desa Pematang Gadung (12.5%), Desa Sungai Besar (7%), Desa Batu Daya (9%) dan Desa Gema (6%). Hasil survey ini juga memperlihatkan para responden masih menempatkan baris tanaman sawit yang begitu dekat atau berada di pinggir sungai, misalnya di Desa Sungai Besar (jarak 1-8 m), Desa Pematang Gadung (1-15 m), Desa Gema (2-500 m), Desa Batu Daya (10-1,000 m), Desa Kemora(50-500 m)dan Desa Mekar Raya (2-350 m).

Kotak 1: Kegiatan Konservasi Tanah

Guludan teras/Teras gulud adalah barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang guludnya. Metode ini dikenal pula dengan istilah guludan bersaluran. Pada tanah yang permeabilitasnya tinggi, guludan dapat dibuat tepat menurut arah garis kontur. Sedangkan pada tanah yang permeabilitasnya rendah, guludan dibuat miring terhadap kontur sebesar tidak lebih dari satu persen menuju ke arah saluran pembuangan. Hal ini ditujukan agar air yang tidak segera masuk ke dalam tanah dapat disalurkan dengan kecepatan rendah keluar lapangan.

Rorak merupakan tempat/lubang penampungan atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah dan sejajar dengan garis kontur. Fungsi rorak adalah untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Galian yang dibuat di sebelah pokok tanaman untuk drainasi, menampung erosi dan menempatkan bahan/pupuk organik

Tapal kuda merupakan teknik terasering yang biasa disebut tapak kuda. Terasering di sini hanya perlu meratakan tanah yang ada di sekeliling pokok sawit. Tapak kuda memiliki ukuran standart 3 m x 3 m sampai 4 m x 4 m

Frond stacking merupakan penumpukan daun/ pelepah di sepanjang garis kontur, dan lubang-lubang lumpur digali di sebelah setiap tanaman kelapa sawit lainnya. Daun-daun ditumpuk segera setelah panen dan setelah pemangkasan korektif, atau sesaat sebelum musim hujan.

4.19. Pengelolaan air

Hasil survey menunjukkan bahwa di Desa Gema, Kemora, Batu Daya dan Desa Mekar Raya, tidak ada responden (0%) yang melakukan pengelolaan air (Water Management), hal ini disebabkan di keempat desa tersebut tidak terdapat parit. Berbeda halnya dengan Desa Sungai Besar dan Pematang Gadung, di kedua desa ini mayoritas responden menyatakan adanya parit utama dan sekunder, namun di Desa Sungai Besar tidak terdapat parit tersier. Selain tersedianya

parit, para responden dari Desa Sungai Besar (50%), Sungai Pelang (36%), dan Pematang Gadung (6%) menyatakan terdapat pintu air. Hampir seluruh responden menyatakan tidak ada pengukuran muka air kecuali dinyatakan oleh 7% responden di Desa Sungai Besar, demikian juga dengan jadwal pengerukan lumpur, mayoritas responden tidak melakukan hal tersebut kecuali 4% responden di Desa Sungai Pelang dan 3% responden di Desa Sungai Besar.

Kegiatan pengelolaan air ini menurut para responden dilakukan melalui beberapa cara: (i) Dilakukan oleh pemerintah melalui sistem upah dan kolektif (menurut responden Desa Sungai Besar), (ii) Dilakukan secara gotong royong dan kolektif (menurut responden Sungai Pelang), (iii) Dilakukan sendiri (menurut responden Pematang Gadung).

4.20. Defisiensi unsur hara

Sebagian besar responden di Desa Gema tidak menjawab informasi tentang defisiensi unsur hara, baik N, Mg, K, Boron, maupun Fe/Cu/Zn, sebagian responden lain (11,7% responden) menyatakan sedikit terjadi defisiensi unsur hara pada tanaman sawitnya. Sebagian besar petani (64,7%) juga tidak mengerti cara mengetahui tanaman sawit mereka kekurangan unsur hara, demikian juga mereka tidak mengetahui kemana bisa memperoleh informasi tentang defisiensi unsur hara. Di Desa Mekar Raya, hanya 60% responden menyatakan hanya sedikit terjadi defisiensi unsur hara pada tanaman sawitnya, sedangkan sisanya (40% responden) menyatakan banyak terjadi defisiensi unsur hara. Cara mereka untuk mengetahui gejala defisiensi hara adalah dengan melihat pertumbuhan batang dan warna daun. Pada dasarnya mereka juga tidak mengetahui kemana menanyakan informasi tentang defisiensi unsur hara, mereka hanya mengandalkan pengalaman bercocok tanam maupun pengalaman kerja dari perusahaan.

Di Desa Pematang Gadung, sebagian besar responden menyatakan sedikit terjadi defisiensi unsur hara pada tanaman sawitnya, cara mereka untuk mengetahui gejala defisiensi hara adalah melalui belajar dari teman, petani dan tetangga (dinyatakan oleh 25% responden) atau melihat gejala daun yang menguning (dinyatakan 31,3% responden). Beberapa responden menyatakan di desa ini tidak ada penyuluh, sehingga tentang defisiensi unsur hara mereka menanyakan kepada teman, tetangga, atau petani, sedangkan beberapa responden yang lainnya tidak mengetahui kemana akan bertanya.

Di Desa Sungai Pelang sebagian besar responden tidak menjawab tentang terjadi tidaknya defisiensi unsur hara pada tanaman sawit mereka, hanya 12% menyatakan terjadi defisiensi unsur N dan hanya 4% menyatakan terjadi penguningan daun. Tidak ada responden yang menjawab cara megetahui defisiensi unsur hara

tersebut. Sebagian dari mereka (12%) tidak tahu kemana menanyakan informasi tentang defisiensi unsur hara, sebagiam yang lain ada yang belajar sendiri (12%), belajar ke petani lain (16%), atau belajar dari tetangga (12%).

Di Desa Sungai Besar 63% responden menyatakan sedikit terjadi defisiensi unsur hara pada tanaman sawit mereka. Untuk mengetahui tanaman sawit mereka kekurangan unsur hara, maka para responden melakukan dengan cara belajar dari petani lain, melihat kondisi yang terjadi kemudian ditanyakan kepada teman, melihat kondisi tanaman misalnya dengan warna daun yang menguning. Hal yang serupa juga mereka lakukan ketika ingin mengetahui informasi tentang defisiensi unsur hara yaitu melalui: bertanya ke teman yang bekerja di perkebunan, belajar sendiri, atapun dari saudara yang pernah menanam sawit.

Di Desa Kemora dari 50% responden yang dilakukan observasi lapang, 16% menyatakan banyak mengalami defisiendi N, Mg dan Fe/Cu/Zn dan 33% menyatakan banyak mengalami defisiensi K dan Boron, Di Desa Batu Daya 36% responden menyatakan banyak defisiensi N, Mg, K, dan Boron dan 45% menyatakan banyak defisiensi Fe/Cu/Zn. petani mengetahui tanaman sawit mereka kekurangan unsur hara dengan melihat kondisi tanaman dan memperoleh informasi tentang defisiensi unsur hara dari pengalaman bercocok tanam dan dari tetangga atau petani lain.

4.21. Hama dan penyakit tanaman sawit

Hasil studi terkait status hama dan penyakit tanaman sawit menunjukkan bahwa Desa Mekar Raya merupakan desa yang respondennya paling banyak menyatakan ditemukan hama dan penyakit tanaman sawit, sedangkan paling sedikit ditemukan hama dan penyakit dinyatakan oleh para responden dari Desa Gema. Sebagian besar responden menyatakan belum melakukan upaya pengendalian hama penyakit. Upaya pengendalian tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil responden di desa Pematang Gadung, Sungai Besar, dan Sungai Pelang, yaitu melalui cara: penyemprotan menggunakan pestisida, fungisida, membersihkan lahan, membuang buah yang busuk atau panen lebih awal.

Hampir seluruh responden menyatakan belum pernah dilatih menggunakan pestisida, kecuali 1 responden masing-masing di desa Sungai Pelang, Pematang Gadung dan Mekar Raya yang pernah dilatih untuk menggunakan pestisida, khususnya pestisida untuk tanaman padi. Responden yang menyatakan mengetahui aturan penggunaan pestisida adalah sebanyak 31% responden di Pematang Gadung, 30% responden di Sungai Besar, dan 16% responden di Sungai Pelang, 6% di Desa Gema. Aturan tentang penggunaan pestisida mereka ketahui dari brosur pada kemasan/botol dan kebiasaan. Pengetahuan responden tentang pengendalian hama terpadu masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh hasil survey

sebagai berikut: di Desa Sungai Besar tidak ada satupun responden yang menyatakan mengetahui tentang pengendalian hama terpadu, adapun di desa-desa lain jumlah responden yang mengetahui cara pengendalian hama terpadu juga relatif rendah, itu pun dalam kegiatan budidaya padi. Jumlah responden yang mengetahui cara pengendalian hama terpadu, yaitu: Desa Sungai Pelang (12%), Desa Pematang Gadung (6%), Desa Gema (6%). Secara detil survey tentang hama dan penyakit tanaman sawit disajikan sebagai berikut:

1) Survey tentang hama tanaman sawit

Hama tikus adalah hama yang paling sering ditemui, dan terdapat di seluruh desa. Di desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Sungai Pelang dan Mekar Raya sebagian kecil (< 30% responden) menyatakan melakukan upaya pengendalian yaitu dengan cara menggunakan racun tikus dan pembersihan lahan, sisanya menyatakan tidak melakukan upaya pengendalian karena umumnya serangan masih sedikit. Adapun di Desa Gema tidak terdapat responden yang melakukan upaya pengendalian hama tikus.

Hama Orytes/kumbang merupakan hama yang paling sering ditemukan setelah tikus di seluruh desa studi. Beberapa responden di desa Pematang Gadung, Sungai Pelang dan Sungai Besar menyatakan dalam melakukan pengendalian umumnya mereka menggunakan pestisida. Sisa responden lainnya menyatakan tidak melakukan pengendalian karena serangan belum banyak. Di desa Gema dan Mekar Raya tidak terdapat responden yang menyatakan melakukan upaya pengendalian hama Orytes.

Hama Ulat api dan ulat kantong ditemukan di seluruh desa, Paling banyak di desa Kemora dan Batu Daya, Mekar Raya (69%), Pematang Gadung (63%), Sungai Pelang (52%) dan Sungai Besar (37%). Di desa Gema hanya 6% responden yang menyatakan terdapat hama ulat api dan ulat kantong. Di Desa Mekar Raya dan Gema, tidak ada satupun responden yang melakukan upaya pengendalian untuk mengatasi serangan hama ulat api dan ulat kantong, sedangkan di Pematang Gadung (19%), Sungai Pelang (12%) dan Sungai Besar (3%) responden menyatakan melakukan upaya pengendalian.

2) Survey tentang penyakit tanaman sawit

Penyakit busuk buah ditemukan di seluruh desa, di mana jenis penyakit ini paling sering ditemukan di Desa Pematang Gadung, Sungai Besar Sungai Pelang. Upaya pengendalian hanya dilakukan oleh beberapa responden di desa Sungai Besar dan Pematang Gadung yaitu dengan membuang buah yang busuk dan melakukan panen lebih awal.

Penyakit Ganoderma ditemukan di seluruh desa. Ganoderma merupakan penyakit yang paling sering di temui di Batu Daya (100%), Kemora dan Desa Mekar Raya yaitu dinyatakan oleh 81% responden. Di Desa Gema dan Mekar Raya tidak terdapat satupun responden yang melakukan upaya pengendalian. Beberapa responden di Desa Pematang Gadung, Sungai Besar, dan Sungai Pelang melakukan upaya pengandalian dengan fungisida, sedangkan sebagian besar lainnya menyatakan tidak melakukan upaya pengendalian.

Crown diseases ditemukan di seluruh desa. Sebagian besar responden menyatakan tidak melakukan upaya pengendalian, hanya beberapa responden di Pematang Gadung , Sungai Besar, dan Sungai Pelang yang melakukan upaya pengendalian penyakit tersebut.

3) Pengendalian Hama

Upaya pengendalian hama dilakukan oleh para responden sebagai berikut:

Burung hantu, Penggunaan predator burung hantu untuk mengatasi hama tikus sangat efektif daripada menggunakan racun tikus atau rodentisida. Racun tikus banyak memiliki kelemahan, antara lain dapat menimbulkan pencemaran bahan kimia terhadap lingkungan, serta menimbulkan bau bangkai di sekitar kebun. Responden yang menyatakan mengetahui manfaat memelihara burung hantu adalah 24% responden di desa Sungai Pelang , 27% di desa Sungai Besar, 25% di desa Pematang Gadung, 6% di desa Gema.

Bunga pukul Sembilan (Imago parasatoit): Semua jenis kelapa sawit rentan terhadap serangan ulat api. Ulat ini dapat menimbulkan kerusakan pada bagian daun tanaman hingga 40-80 persen. Apabila serangan hama ulat api ini tidak segera dikendalikan, akibatnya kelapa-kelapa sawit bakal mati karena tidak bisa hidup dengan baik, dan tentu produksi Tandan Buah Segar (TBS) juga akan menurun secara drastis. Bunga pukul sembilan ternyata menjadi sumber makanan dan habitat ideal bagi Sycanus, yaitu predator alami yang mampu memangsa ulat api. Responden yang menyatakan mengetahui manfaat tanaman bunga pukul 9 adalah: Desa Sungai Pelang (28% responden), Desa Sungai Besar (3%), Desa Pematang Gadung (19%) , dan Desa Gema (6%).

Paraquat: Telah digunakan selama lebih dari 40 tahun, baik di perkebunan besar maupun kecil, paraquat dichloride, yang dikenal secara sederhana sebagai' paraquat', adalah salah satu jenis herbisida yang paling banyak digunakan di dunia. Di Indonesia, 'paraquat' dijual dengan nama Gramoxone. Bahan pemusnah ilalang yang sangat beracun ini umum digunakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Zat yang dikandungnya sangat berbahaya apabila terhirup, tertelan atau terserap melalui kulit. Sampai sekarang belum ada penawar terhadap racun paraquat. Persoalan penting mengenai paraquat

ini adalah resiko yang ditimbulkan bagi para pekerja di perkebunan. Di negara-negara utara masih kerap terjadi kecelakaan dalam penggunaan zat ini. Tetapi, kondisinya jauh lebih memprihatinkan di negara-negara berkembang karena petunjuk dan saran penggunaannya seringkali tidak diperhatikan dengan baik. Para pekerja di perkebunan seringkali bekerja dalam jangka waktu yang panjang, seperti misalnya sepuluh bulan dalam satu tahun, dan enam hari dalam seminggu. Oleh karena itu, mereka sangat mungkin terpapar racun secara rutin. Terkait paraquat, hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar responden (70,3%) tidak menggunakan paraquat, beberapa lainnya meskipun dalam jumlah sedikit, masih ada yang menggunakan paraquat.

4.22. Aksesibilitas

Jalan Koleksi

Di desa Sungai Pelang, responden menyatakan lebar jalan koleksi 3-6 m, namun paling sering adalah 4 m. Sebanyak 32% responden menyatakan kondisi jalan bagus, beberapa responden menyebutkan jalan koleksi berupa jalan tanah. Di desa Sungai Besar responden menyatakan lebar jalan koleksi 1-5 m, namun paling sering adalah 1 m. sebanyak 63% responden menyatakan kondisi jalan bagus, beberapa responden menyebutkan jalan koleksi berupa jalan tanah. Di Desa Pematang Gadung, responden menyatakan lebar jalan koleksi 1-12 m, namun paling sering adalah 2 dan 2.5 m. Sebanyak 68% responden menyatakan kondisi jalan bagus. Di Desa Gema dan Mekar raya menyatakan lebar jalan koleksi 1-2 m, namun paling sering adalah 1 m. Sebanyak 50% responden di Mekar Raya dan 18% responden di desa Gema menyatakan kondisi jalan koleksi bagus. Di Desa Kemora responden menyatakan lebar jalan koleksi 1-3 m, namun paling sering adalah 3 m sedangkan di Desa Batu Daya responden menyatakan lebar jalan koleksi 1-4 m, namun paling sering adalah 1 dan 3 m.

Jalan Utama

Di Desa Sungai Pelang, responden menyatakan lebar jalan utama 1-9 m, namun paling sering adalah 8 m. Sebanyak 40% responden menyatakan kondisi jalan bagus, beberapa responden menyebutkan jalan utama berupa jalan aspal, sebagian lagi menyebutkan berupa jalan batu. Di desa Sungai Besar responden menyatakan lebar jalan utama 1-8 m, namun paling sering adalah 4 m. Sebanyak 67% responden menyatakan kondisi bagus. Di Desa Pematang Gadung, responden menyatakan lebar jalan utama 1-15 m, namun paling sering adalah 4 m dan 81% responden menyatakan kondisi bagus. Di desa Gema responden menyatakan lebar jalan utama 1-9 m dan di Mekar Raya 1-15 m, namun paling sering adalah 2 m. Sebanyak 69% responden di Mekar Raya dan 24% responden di Desa Gema menyatakan kondisi jalan utama bagus. Di Desa Kemora dan Desa Batu Daya responden menyatakan lebar jalan utama 2-6 m, namun paling sering adalah 6 m.

Jembatan dan Gorong-gorong

Tidak terdapat jembatan dan gorong-gorong menurut responden di desa Gema dan Mekar Raya. Adapun di Desa Sungai Pelang, responden menyatakan lebar jembatan 3-6 m, namun paling sering adalah 5 m. Sebanyak 32% responden menyatakan kondisi bagus, beberapa responden menyebutkan jembatan berupa kayu. Di desa Sungai Besar responden menyatakan lebar jembatan 1-6 m, namun paling sering adalah 6 m. 67% responden menyatakan kondisi bagus. Di desa Pematang Gadung, responden menyatakan lebar jembatan 2-6 m, namun paling sering adalah 4 m dan 50% responden menyatakan kondisi bagus.

Pemeliharaan

Sebanyak 40% responden di Desa Sungai Pelang menyatakan pemeliharaan jalan dilakukan dengan frekuensi tahunan, dilain pihak sebanyak 12% menyatakan tidak ada pemeliharaan jalan. Jalan koleksi dilakukan pemeliharaan perorangan, sedangkan jalan utama dilakukan kolektif dengan gotong-royong dusun jika jalan sudah rusak dan tidak dapat dilalui atau jika ada dana dari pemerintah.

Pemeliharaan jalan di desa Sungai Pelang untuk jalan koleksi dilakukan melalui perorangan dengan membersihkan pada kebun masing-masing sedangkan pemeliharaan jalan utama dilakuan setiap tahun dengan sumber anggaran dari dana desa dengan gotong-royong atau dilakukan oleh pemerintah/ada pekerja khusus dengan sistem upah dan buruhnya dari masyarakat.

Sebanyak 40% responden di desa Pematang Gadung, 31% responden di Mekar Raya dan 11% responden di Desa Gema menyatakan pemeliharaan jalan dilakukan dengan frekuensi tahunan. Pemeliharaan jalan hanya dilakukan jika jalan rusa dan Jalan koleksi dilakukan pemeliharaan perorangan dengan membersihkan pada kebun masing-masing.

4.23. Pendapatan per kapita

Pendapatan rata-rata pertahun para responden di semua desa studi paling banyak diperoleh dari sumber usaha pertanian (sawit, karet, padi, dan lainnya). Di Desa Mekar Raya, 64% pendapatan berasal dari usaha pertanian. Desa-desa lain menunjukkan persentase pendapatan dari sumber peratanian yang beragam, yaitu Desa Sungai Besar (58%), Desa Pematang Gadung (49%), Desa Sungai Pelang(43%) dan Desa Gema (40%). Adapun khusus di sektor pertanian itu sendiri, usaha kebun kelapa sawit menjadi sumber pendapatan yang tertinggi jika dibanding usaha pertanian lainnya. Sumber pendapatan tertinggi setelah sawit adalah karet, hal ini dijumpai di Desa Mekar Raya, Gema dan Sungai Besar, sedangkan di desa Sungai Pelang dan Pematang Gadung sumber pendapatan kedua setelah sawit adalah dari hasil padi.

Secara lengkap sumber pendapatan responden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16. Sumber pendapatan responden

Sumber pendapatan	Sungai Pelang		Sungai Besar		Pematang Gadung		Gema		Mekar Raya		Kemora		Batu Daya	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian		43		58		49		40		64		83		68
kebun sawit	9.380.480	24	11.314.533	41	21.022.625	33	23.151.765	32	17.396.625	50	5.265.000	18	7.581.818	22
kebun karet	68.000	0	2.293.333	8	3.397.500	5	4.725.882	6	4.507.500	13	18.556.667	65	15.981.818	46
sawah	6.820.000	17	2.066.667	7	4.781.250	8	0	0	0	0	0	0	0	0
lainnya	796.000	2	266.667	1	1.900.000	3	1.157.647	2	562.500	2	0	0	0	0
2. Pekerja	4.724.000	12	3.450.000	13	1.250.000	2	0	0	150.000	0	0	0	909.091	3
3. Pengusaha	13.800.000	35	5.733.333	21	16.465.000	26	27.552.941	38	2.250.000	6	0	0	0	0
4. Profesional	2.080.000	5	133.333	0	7.000.000	11	12.705.882	17	10.187.500	29	4.666.667	16	7.454.545	22
5. Lainnya	1.580.000	4	2.333.333	8	7.093.750	11	3.823.529	5	0	0	0	0	2.727.273	8
6. Pendapatan total per tahun	39.248.480	0	27.591.200	0	62.910.125	0	73.117.647	0	35.054.125	0	28.488.333	0	34.654.545	0
7. Pendapatan total per hari	107.530.08	0	75.592.33	0	172.356.51	0	200.322.32	0	96.038.70	0	78.050.23	0	94.943.96	0

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Bab 5. Pembahasan

Studi ini dilakukan pada sembilan desa, yaitu: Gema, Mekar Raya, Pematang Gadung, Sungai Pelang, Sungai Besar, Kemora, Batu Daya, Muara Jekak, dan Teluk Bayur. Meskipun ke sembilan desa tersebut sama-sama terdapat pengelolaan sawit oleh rakyat, namun memiliki karakteristik spesifik di dalam menjalankan rangkaian pengelolaannya, salah satu hal yang paling menonjol yang membedakan karakteristik petani sawit tersebut adalah sumber pendanaan untuk pengelolaan sawit. Untuk itu studi ini membagi responden menjadi tiga kelompok berdasarkan sumber dana pengelolaan sawit, yaitu:

(a) Petani Swadaya Murni: seluruh rangkaian pengelolaan sawit dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sangat minim hingga tidak ada fasilitasi atau pendampingan dari pihak lain. Sebagian besar modal diperoleh sendiri, kalaupun terdapat peminjaman dana dari lembaga keuangan hanya dilakukan oleh sedikit responden dan proses untuk peminjaman dilakukan sendiri tanpa pendampingan lembaga terkait. Tidak ada pendampingan dalam budidaya sawit. Yang termasuk ke dalam kelompok ini terdapat 7 desa, yaitu: Desa Gema, Mekar Raya, Pematang Gadung, Sungai Pelang, Sungai Besar, Kemora, dan Batu Daya.

(b) Petani Swadaya Berbasis Koperasi: sebagian rangkaian pengelolaan sawit, termasuk modal sawit, melibatkan peran koperasi/BUM Desa/Organisasi Pengelola Plasma. Sawit mandiri berumur sekitar 2-13 tahun (ditanam mulai tahun 2006). Pembiayaan pembangunan kebun mandiri dibantu oleh pengurus plasma dengan maksimal luas 1 ha. Pembiayaan ini mulai dari: penyiapan lahan, penanaman, pengadaan bibit hingga pemeliharaan. Namun komponen biaya pemeliharaan hingga 48 bulan disepakati kemudian, apakah dibiayai oleh Organisasi Pengelola Plasma atau oleh petani sendiri. Pengurus kebun plasma melakukan pendampingan dalam budidaya sawit, mereka memiliki pengalaman budidaya sawit dari perusahaan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Desa Muara Jekak.

(c) Petani Plasma: dalam rangkaian pengelolaan sawit melibatkan pihak perusahaan sawit, yaitu mulai dari proses land clearing, penyiapan lahan, pembuatan jalan kebun, penyiapan bibit, penanaman, pemupukan serta perawatan dilakukan seluruhnya oleh perusahaan (PT. PTS) sampai dengan usia sawit 4 tahun. Perusahaan menyediakan modal awal dalam pengelolaan sawit. Pengelolaan sawit plasma dilakukan oleh perusahaan yang kemudian hasil pembagian lahan plasma dibagikan kepetani 20%, dan perusahaan

80% melalui model Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Sawit telah berumur 21 tahun. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Desa Teluk Bayur.

Gambar 5.1. Brondolan yang dikutip oleh tenaga wanita

Jika memperhatikan pada tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa lahan sawit yang telah bersertifikat pada Kelompok Sawit Swadaya Murni umumnya dimiliki oleh responden yang berasal dari Suku Jawa (Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar) serta responden yang berasal dari Suku Melayu. Di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar sejarah penguasaan lahan oleh responden berasal dari transmigrasi sehingga lebih mudah dalam proses kepemilikan sertifikat lahan. Adapun responden yang didominasi dari Suku Dayak (Desa Gema, Mekar Raya, Kemora dan Batu Daya) umumnya belum memiliki sertifikat lahan sawitnya.

Capaian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun milik petani rakyat cenderung masih rendah dibanding realisasi secara keseluruhan, padahal area sawit milik petani rakyat mencakup 45 persen dari total luas kebun sawit di Indonesia yang mencapai 14 juta hektare. Secara umum studi ini menunjukkan bahwa para responden di 9 desa lebih banyak yang tidak memiliki sertifikat (61,3%) jika dibandingkan yang memiliki sertifikat lahan sawit (35,9%). Bahkan khusus di desa-desa sawit mandiri, selain sawit plasma di Desa Teluk Bayur, maka sertifikat lahan sawit tidak dimiliki oleh 67,6% responden. Padahal legalitas lahan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi syarat mutlak bagi petani untuk memperoleh sertifikasi ISPO. Terdapat beberapa kendala petani untuk melakukan pengurusan sertifikat lahan sawit antara lain:

(a) Biaya pengurusan sertifikat lahan cukup mahal, misalnya Rp 3,5 juta/ha. Sehubungan dengan mahalnya biaya pengurusan tersebut maka petani lebih memilih untuk membeli pupuk daripada mengurus sertifikat lahan. Harapannya adalah dapat meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang saat ini hanya mencapai sekitar 1 ton/ha/bulan untuk ditingkatkan hingga menjadi 3 ton/ha/bulan; (https://www.cnbcindonesia.com/news/20181128183250-4-44153/pak-jokowi-70-lahan-sawit-petani-tak-punya-sertifikat).
(b) Masalah legalitas membuat para petani dapat berurusan dengan penegak hukum, terutama jika lahan sawit masuk ke dalam kawasan hutan. Hal ini sehubungan dengan pengurusan legalitas kebun sawit rakyat atau swadaya sering berhadapan dengan tumpang tindih lahan.
(c) Adanya keterbatasan jumlah staff di Badan Pertanahan Nasional yang tidak sebanding dengan jumlah sertifikat yang diurus sehingga menjadi kendala pengurusan sertifikat

Kondisi responden yang belum memiliki sertifikat lahan sawit tersebut dapat menjadi hambatan utama yang dihadapi petani sawit untuk mendapatkan manfaat dari budidaya kelapa sawit, hal ini disebabkan: (i) Belum adanya pengakuan hukum hak-hak atas tanah mereka, (ii) Sulitnya akses terhadap pendanaan, material tanaman, pupuk, dan pelatihan; serta (iii) Hambatan karena kepemilikan sertifikat lahan menjadi persyaratan perdagangan dan harga yang adil dari penjualan tandan buah segar yang mereka panen.

Petani yang memiliki sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik atau SHM), adalah mereka yang memiliki bukti hak atas tanah terkuat di Indonesia. Sertifikat ini dapat dialihtangankan dan dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank. Apalagi saat ini pemerintah sedang mendorong agar sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO) dapat diterapkan secara wajib pada seluruh perkebunan sawit terintegrasi di tanah air, baik itu milik negara, swasta, maupun rakyat. Hal ini dikarenakan pemerintah berkepentingan agar perkebunan rakyat juga memenuhi standar keberlanjutan, sehingga komoditas sawit kita tidak menjadi bulan-bulanan di Eropa. Oleh karenanya upaya penuntasan legalitas lahan tentu menjadi persoalan sangat penting untuk melawan black campaign sawit oleh asing.

Untuk melakukan pengelolaan kebun sawit para responden memperoleh modal dari berbagai sumber. Petani kecil umumnya membutuhkan pembiayaan yang signifikan untuk membangun, memelihara, dan meremajakan kebun kelapa sawitnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS), di lain pihak petani kecil memiliki sumber pendanaan yang terbatas dalam mengusahakan kebun kelapa sawit mereka. Sahara, et al., (2018) dalam

studinya menginformasikan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat bagi petani untuk dapat mengakses pinjaman/kredit dari sumber pembiayaan formal seperti bank, yaitu:

(a) Kesenjangan permintaan dan penawaran: menawarkan pinjaman untuk modal kerja dengan jangka waktu pendek. Di sisi lain petani menginginkan kredit untuk modal kerja dan investasi dengan jangka waktu yang lebih panjang.
(b) Kesenjangan jangka tenggat waktu: pinjaman menimbulkan permasalahan mengingat gestation period/beda kala (tenggang waktu antara menanam dan memanen) pada kelapa sawit cukup lama. Petani belum menghasilkan produksi selama masa tersebut (3-4 tahun). Hanya sedikit sekali skema pinjaman yang mempertimbangkan situasi tersebut dan mengijinkan pembayaran pertama setelah kebun sawit menghasilkan.
(c) Kesenjangan pembagian resiko: Sebagian besar petani kecil swadaya tidak memiliki sertifikat tanah mengingat mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat tanah, yaitu setiap perubahan biaya produksi dan harga minyak sawit cenderung dibebankan kepada produsen,
(d) Kesenjangan aspek legalitas, yaitu ketiadaan dokumentasi kepemilikan lahan yang legal menyebabkan petani kesulitan memberikan agunan untuk mengakses pinjaman dari bank.

Produksi kelapa sawit dikatakan berhasil ketika menghasilkan buah sawit dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin mutunya. Petani yang tidak menggunakan bibit unggul dalam penanaman kelapa sawit, maka mereka berpeluang kehilangan hasil produksinya hingga mencapai 50%. Meskipun demikian, kenyataannya petani masih menggunakan bukan bibit unggul untuk budidaya tanaman sawitnya. Terdapat beberapa alasan petani tidak menggunakan bibit unggul, antara lain: (i) Harga bibit mahal yang berkisar antara Rp 35.000 – Rp 50.000/batang, (ii) Informasi dan pengetahuan petani tentang bibit berkualitas masih kurang.

Bibit sawit berkualitas memiliki ciri-ciri antara lain: (i) Mata tunas yang normal serta berwarna putih bersih. Bibit kualitas buruk ditunjukkan oleh bentuk tunas yang cacat serta berwarna cokelat agak kehitam; (ii) Bentuk anak daun yang melebar, tak kusut, dan tidak menggulung; (iii) Tempurung yang berwarna hitam gelap, dan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya; (iv) Calon batang atau bongkot bibit berukuran pendek, semakin pendek calon batang, maka semakin baik bibit sawit pada masa pertumbuhan dan semakin kuat saat sudah ditanam; (v) bentuk bibit bulat atau lonjong serta tidak adanya cekungan-cekungan; (vi) Calon akar (radikula) berwarna agak kekuning-kuningan, panjang maksimum 5 cm, sedangkan calon batang dan daun (flumula) berwarna keputih-putihan; (vii) Akar pada bibit sawit unggul yaitu memiliki panjang 2 sampai 3cm; (viii) Akar memiliki panjang 2 sampai 3cm. (https://www.isw.co.id/single-post/2018/11/07/Begini-Ciri-Bibit-Kelapa-Sawit-yang-Berkualitas).

Selain kegiatan perawatan kebun sawit dengan cara penggunaan herbisida, para petani juga melakukan pemupukan tanaman sawit. Berbeda dengan perawatan tanaman sawit dalam bentuk penyiangan maupun pemupukan, hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak melakukan pengendalian hama penyakit tanaman sawit, hanya sedikit responden yang melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman sawit Hampir seluruh responden disetiap desa melakukan kegiatan pemangkasan/cabut daun. Sawit di kebun plasma perawatan, pruning dan pemupukan kurang karena terkendala biaya.

Gambar 5.2. Kegiatan *Pruning* (Pemangkasan pelepah sawit)

Gambar 5.3. Hasil panen buah sawit yang diletakkan di TPH (Tempat Pemungutan Hasil)

Studi ini melakukan analisis terhadap hasil produksi TBS para responden dari kebun sawit berumur 5 tahun ke atas yang merupakan hasil di luar panen pertama. Menurut Pahan (2008), tanaman kelapa sawit dapat dipanen pada saat tanaman berumur tiga atau empat tahun. Produksi yang dihasilkan akan terus bertambah seiring bertambahnya umur dan akan mencapai produksi maksimalnya pada saat tanaman berumur 9 – 14 tahun, setelah itu produksi yang dihasilkan akan mulai menurun. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit berkisar antara 25 – 26 tahun. Selain mempengaruhi produksi, umur tanaman kelapa sawit juga akan mempengaruhi produktivitas tanaman. Studi ini juga mencoba membandingkan produksi TBS antara kebun sawit yang dilakukan pemupukan dan tanpa pemupukan. Secara ringkas disajikan pada Tabel berikut:

Table 5.1. Hasil produksi TBS kebun sawit berumur 5 tahun ke atas

Desa	Dengan Pupuk (ton/ha/thn)	Tanpa Pupuk (ton/ha/thn)	Produksi berdasarkan kelas kesesuaian lahan umur 5 tahun (ton/ha/thn)		
			S1	S2	S3
Gema	6,8	2,7	18,0	16,0	14,5
Mekar Raya	5,8	4,8			
Sungai Pelang	9,0	0			
Sungai Besar	13,2	0			
Pematang Gadung	6,6	0			
Kemora	0	1,3			
Batu Daya	0	4,7			
Rata-rata	**8,3**	**3,4**			
Muara Jekak	13,2	0			
Teluk Bayur	20,9	0			

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Di Desa Gema dan Mekar Raya dimana tanaman sawit dilakukan pemupukan, menghasilkan produktivitas TBS yang cenderung lebih tinggi (5,8-6,8 ton/ha/tahun) jika dibandingkan dengan produksi TBS pada lahan yang tidak dipupuk (2,7-4,8 ton/ha/tahun). Namun demikian produktivitas TBS tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas TBS kebun sawit umur 5 tahun menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2010) pada semua kelas kesesuaian lahan, yaitu: (i) KKL S1 (18 ton/ha/tahun), (ii) KKL S2 (16 ton/ha/tahun), dan KKL S3 (14,5 ton/ha/tahun). Produktivitas tertinggi diperoleh di Desa Sungai Besar (13,2 ton/ha/tahun) meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas sawit umur 5 tahun menurut PPKS (14,5-18 ton/ha/tahun). Tingkat Produktivitas Kelapa Sawit umur 3-25 tahun berdasarkan Kesesuaian Kelas Lahan (KKL) disajikan pada Tabel berikut:

Table 5.2. Tingkat Produktivitas Kelapa Sawit Berdasarkan Kesesuaian Kelas Lahan (KKL)

Umur (tahun)	KKL S1			KKL S2			KKL S3		
	TBS	RBT	RJT	TBS	RBT	RJT	TBS	RBT	RJT
	(ton)	(kg)	(Tandan/ Pohon)	(ton)	(kg)	(Tandan/ Pohon)	(ton)	(kg)	(Tandan/ Pohon)
3	9,0	3,2	21,6	7,3	3,1	18,1	6,2	3,0	17,9
4	15,0	6,0	19,2	15,5	5,9	17,6	12,0	5,3	17,4
5	18,0	7,5	18,5	16,0	7,1	17,3	14,5	6,7	16,6
6	21,1	10,0	16,2	18,5	9,4	15,1	17,0	8,5	15,4
7	26,0	12,5	16,0	23,0	11,8	15,0	22,0	10,0	15,7
8	30,0	15,1	15,3	25,5	13,2	14,9	24,5	12,7	14,8
9	31,0	17,0	14,0	28,0	16,5	13,1	26,0	15,5	12,9
10	31,0	18,5	12,9	28,0	17,5	12,3	26,0	16,0	12,5
11	31,0	19,6	12,2	28,0	18,5	11,6	26,0	17,4	11,5
12	31,0	20,5	11,6	28,0	19,5	11,0	26,0	18,5	10,8
13	31,0	21,1	11,3	28,0	20,0	10,8	26,0	19,5	10,3
14	30,0	22,5	10,3	27,0	20,5	10,1	25,0	20,0	9,6
15	27,9	23,0	9,3	26,0	21,8	9,2	24,5	20,6	9,1
16	27,1	24,5	8,5	25,5	23,1	8,5	23,5	21,8	8,3
17	26,0	25,0	8,0	24,5	24,1	7,8	22,0	23,0	7,4
18	24,9	26,0	7,4	23,5	25,2	7,2	21,0	24,2	6,7
19	24,1	27,5	6,7	22,5	26,4	6,6	20,0	25,5	6,0
20	23,1	28,5	6,2	21,5	27,8	5,9	19,0	26,6	5,5
21	21,9	29,0	5,8	21,0	28,6	5,6	18,0	27,4	5,1
22	19,8	30,0	5,1	19,0	29,4	5,0	17,0	28,4	4,6
23	18,9	30,5	4,8	18,0	30,1	4,6	16,0	29,4	4,2
24	18,1	31,9	4,4	17,0	31,0	4,2	15,0	30,4	3,8
25	17,1	32,4	3,9	16,0	32,0	3,8	14,0	31,2	3,6
Jumlah	**553,0**	**481,8**	**249,2**	**505,3**	**462,5**	**235,3**	**461,2**	**441,6**	**229,7**
Rata-rata	**24,0**	**20,9**	**10,8**	**22,0**	**20,1**	**10,2**	**20,1**	**19,2**	**10,0**

Sumber: Palm Oil Research Center, 2010.
Informasi: TBS = Tandan Buah Segar; RBT = Rata-rata Berat Tandan; RJT = Rata-rata Jumlah Tandan

Produktivitas petani swadaya secara umum lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan skala besar. Hasil panen perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar dapat mencapai 30 ton per hektar per tahun, terutama yang beroperasi di tanah mineral. Sementara itu, hasil produksi rata-rata para petani swadaya transmigran dan petani lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat ketika

pohon sawit berumur 4-10 tahun hanya 15,8 dan 12,69 ton per hektar per tahun Rendahnya produktivitas TBS akan berkorelasi terhadap rendahnya produktivitas CPO. Hasil penelitian Lembaga Penelitian Sawit Indonesia menyebutkan bahwa rendemen CPO untuk sawit Tenera (bercangkang tipis) umur 4-16 tahun sekitar 17,32-21,44%, sedangkan sawit Dura (bercangkang tebal) umur 4-16 tahun memiliki rendemen CPO sekitar 15,78-19,72%. Adapun menurut Fauzi (2002), adanya perbedaan ketebalan daging buah kelapa sawit menyebabkan perbedaan rendemen minyak sawit (CPO) yang terkandung di dalamnya. Rendemen minyak paling tinggi ditemukan pada buah dengan tipe Tenera (cangkang tipis) yaitu rata-rata sebesar 22-24%, sedangkan pada varietas Dura (cangkang tebal) hanya mengandung rendemen minyak rata-rata 16-18%.

Mengacu pada hasil penelitian Lembaga Penelitian Sawit Indonesia tersebut, maka rata-rata produktivitas CPO pada desa-desa studi berkisar antara 1,4-1,8 ton/ha/tahun untuk bentuk cangkang tipis (Tenera) dan berkisar antara 1,3-1,6 ton/ha/tahun untuk cangkang tebal (Dura). Khusus di Desa Sungai Besar maka produktivitas CPO berkisar 2,3-2,8 ton/ha/tahun (Tenera) atau 2,1-2,6 ton/ha/tahun (Dura). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), bahwa rata-rata produktivitas CPO perkebunan sawit rakyat hanya 2-3 ton/hektar/tahun. Jauh di bawah angka produktivitas kebun sawit di Negeri Jiran yang produksi CPO bisa mencapai 12 ton/ha/tahun juga produktiivitas di perkebunan swasta yang berkisar 4-8 ton/ha/tahun. (http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/69-penyebab-rendahnya-produktivitas-sawit-petani.html). Perkiraan hasil produksi CPO kebun sawit berumur 5 tahun ke atas disajikan sebagai berikut:

Table 5.3. Perkiraan hasil produksi CPO kebun sawit berumur 5 tahun ke atas

Desa	Produksi TBS pada Kebun Dipupuk (ton/ha/tahun)	Perkiraan CPO Cangkang Tipis/ Tenera (ton/ha/tahun)	Perkiraan CPO Cangkang Tebal/Dura (ton/ha/tahun)
Gema	6,8	1,2-1,5	1,1-1,3
Mekar Raya	5,8	1,0-1,2	0,9-1,1
Sungai Pelang	9,0	1,6-1,9	1,4-1,8
Sungai Besar	13,2	2,3-2,8	2,1-2,6
Pematang Gadung	6,6	1,1-1,4	1,0-1,3
Rata-rata	**8,3**		
Muara Jekak	13,2	2,3-2,8	2,1-2,6
Teluk Bayur	20,9	3,6-4,5	3,3-4,1

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa produksi TBS dan CPO pada perkebunan sawit yang berasal dari pola plasma di Desa Teluk Bayur, menujukkan hasil

TBS yang tertinggi (20,9 ton/ha/tahun) yang kemudian diikuti oleh perkebunan sawit berbasis koperasi di Desa Muara Jekak (13,2 ton/ha/tahun), dan terakhir perkebunan sawit mandiri murni di tujuan desa lainnya dengan rata-rata produksi TBS 8,3 ton/ha/tahun. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat pada Gambar berikut:

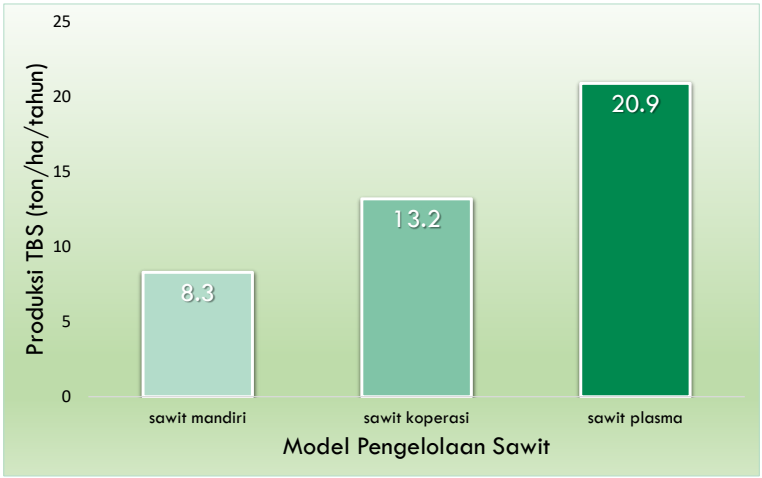

Gambar 5.4. Perbandingan produksi TBS pada tiga pola pengelolaan sawit

Lembaga Penelitian Sawit Indonesia (Indonesian Oil Palm Research Institute) telah mengklasifikasikan tingkat produktivitas CPO sebagai berikut: (i) Produktivitas progeny unggul (12-13 ton/ha/tahun), (ii) Produktivitas komersil tertinggi (8 ton/ha/tahun), (iii) Produktivitas tinggi (> 6 ton/ha/tahun), (iv) Produktivitas Medium-Tinggi (4-6 ton/ha/tahun, (v) Produktivitas Rendah-Medium (3-4 ton/ha/tahun), dan (vi) Produktivitas Rendah (< 3 ton/ha/tahun).

Produktivitas CPO yang rendah terjadi jika tanaman sawit tidak dilakukan pemupukan atau pemupukan tapi kurang, hal ini umum terjadi pada kebun-kebun sawit rakyat sebagaimana juga ditemukan dalam studi ini dimana produktivitas CPO sekitar 1,4-1,8 ton/ha/tahun untuk bentuk cangkang tipis (Tenera) dan berkisar antara 1,3-1,6 ton/ha/tahun untuk cangkang tebal (Dura). Adapun jika pemupukan tidak seimbang akan menyebabkan produktivitas Rendah-Medium, sebagaimana yang terjadi di Indonesia dengan produktivitas CPO 3,8 ton/ha/tahun. Sedangkan pemupukan yang seimbang akan meningkatkan produktivitas CPO hingga masuk kategori Medium-Tinggi sebagaimana produktivitas CPO di Malaysia yang mencapai 4,5 ton/ha/tahun.

Rendahnya produktivitas tandan buah segar (TBS) pada sawit rakyat disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana disampaikan oleh MISB Sertifikasi (2017), yaitu:
(i) Penggunaan benih palsu atau asalan, hal ini disebabkan: kurangnya

pengetahuan petani, mahalnya benih unggul bersertifikat, kurangnya pendampingan dari perusahaan.

(ii) Petani ingin menanam sawit dengan cepat dan murah, tanpa mempedulikan lagi hasilnya.

(iii) Petani tidak mengelola kebun dengan benar mulai dari perawatan tanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Pempukan tidak menerapkan prinsip pemupukan yang efisien, berimbang dan efektif. Petani juga tidak tahu cara membersihkan gawangan, tidak tahu cara memotong pelepah dengan benar, tidak tahu kriteria buah matang.

(iv) Peremajaan kebun sawit (replanting) dilakukan terlambat, saat ini terdapat lebih dari 1 juta ha kebun sawit yang umurnya sudah di atas 25 tahun namun belum dilakukan peremajaan.

(v) Belum kuatnya kelembagaan petani karena belum menyatu dalam koperasi atau kelompok petani. Akibatnya, akses terhadap perbankan untuk permodalan dan akses terhadap Badan Pertanahan Nasional untuk legalitas lahan menjadi terbatas.

Gambar 5.5. TBS (Tandan Buah Segar)

Beberapa studi lain juga telah melaporkan bahwa perkebunan rakyat kelapa sawit memiliki hasil panen rendah, menerapkan praktik pertanian yang belum baik, serta memiliki kerentanan dalam proses produksi hingga tata niaga. Berbagai permasalahan yang dijumpai oleh petani swadaya sebagaimana hasil studi Rizki, et al (2017) menyebutkan antara lain: (i) Tidak diterapkannya praktik usaha kelapa sawit berkelanjutan, (ii) Penggunaan benih tidak unggul, (iii) Kesulitan memperoleh modal, (iv) Adanya distorsi harga TBS di level petani sawit, (v) Rendahnya kesadaran terhadap legalitas lahan, (vi) Administrasi yang belum baik, (vii) Minimnya pelatihan serta pendampingan teknis yang menyebabkan masih rendahnya pengetahuan petani, dan (viii) Minimnya pemeliharaan tanaman. Lebih jauh Molenaar dkk. (2010) menyebutkan bahwa faktor pembatas sistem produksi pertanian, termasuk kelapa sawit meliputi; (i) Variabel internal (kondisi

lahan, tenaga kerja, kapasitas pekebun, dan organisasi pekebun) dan (ii) Variabel eksternal (aktor atau institusi yang mengendalikan akses informasi, input, pasar, dan finansial).

Untuk meningkatkan produktivitas sawit petani, maka perlu dilakukan replanting, perbaikan budidaya, dukungan pihak perusahaan melalui kerja sama kemitraan yang luas. Faktor penentu produktivitas CPO menurut Lembaga Penelitian Sawit Indonesia antara lain:

(i) ***Iklim***: temperatur (22-33°C, optimum 27°C), Curah hujan (1.250-3.000 mm/tahun, optimum 1.750-2.500 mm/tahun), Bulan kering (< 3 bulan, optimum 0-1 bulan), Kelembaban udara (50-90%, optimum 80%), Lama penyinaran matahari (5-7 jam/hari), Ketinggian tempat (< 400m dpl, optimum 200m dpl).

(ii) ***Kondisi Tanah***: kelapa sawit tumbuh baik pada tanah Podsolik (Ultisol), Latosol (Oxisol), Regosol (Entisol), Aluvial dan Hidromorfik (Inceptisol), Andosol (Andisol), dan Gambut (Histosol). Kondisi tanah yang baik mengurangi pengaruh buruk curah hujan yang kurang sesuai. Sifat kimia akan lebih berguna untuk pemupukan supaya menghasilkan produktivitas kelapa sawit yang tinggi.

Untuk jelasnya bisa dilihat pada Gambar berikut:

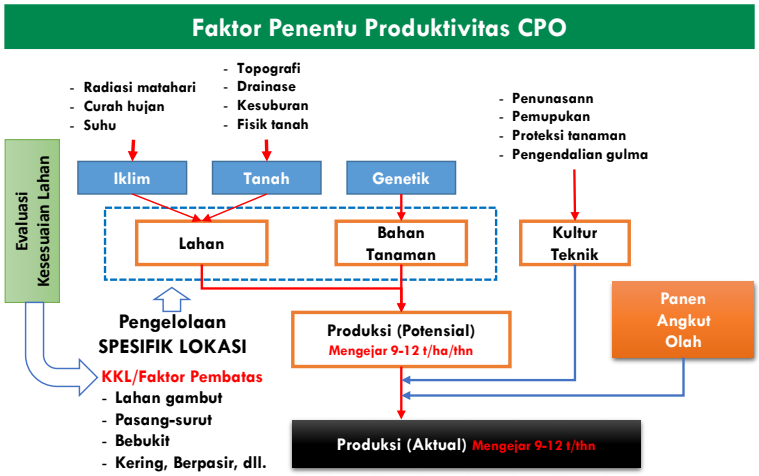

Gambar 5.6. Faktor penentu produktivitas CPO (**Sumber:** Indonesian Oil Palm Research Institute)

Selain umur tanaman, produktivitas kelapa sawit juga bergantung pada akses terhadap material tanaman dengan varietas berkualitas tinggi, pupuk, kredit, dan harga pasar (International Finance Corporation, 2013). Pekebun yang ingin menanam kelapa sawit dapat mengerjakannya secara mandiri atau berlembaga sehingga memiliki akses terhadap kredit, material tanaman, dan pupuk yang dibutuhkan untuk berbudidaya kelapa sawit. Mereka juga harus memiliki akses

terhadap pabrik kelapa sawit untuk memastikan bahwa tandan buah segar yang mereka hasilkan dapat diolah dalam kurun waktu 48 jam setelah pemanenan. Pekebun yang mampu mengatasi berbagai hambatan ini menemukan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan dari menanam kelapa sawit lebih besar dari tanaman lain yang biasa mereka tanam (Belcher dkk., 2004).

Mayoritas petani menjual sawit kepada pengepul/tengkulak. Sebagai catatan bahwa buah sawit harus segera diproses dalam kurun waktu 48 jam setelah dipanen, karena akan berdampak pada semakin rusaknya kualitas minyak sawit mentah (CPO). Sebagian besar responden menyatakan bahwa penentu harga dan sumber informasi harga sawit adalah dari pengepul/tengkulak.

Berdasarkan hasil studi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya petani swadaya merasa lebih mudah untuk menjual hasil panen mereka melalui pengepul karena tidak harus menanggung biaya angkutan sendiri. Para pengepul ini dapat menjual langsung kepada pabrik, tapi juga bisa menjual kepada jaringan CV atau PT yang setiap saat berkeliling di desa-desa penghasil sawit. Karena petani swadaya hanya menjual mela¬lui pengepul, maka harga jual yang mereka terima jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diterbitkan oleh pabrik, CV atau PT, apalagi harga resmi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa kemungkinan peran pengepul:

(1) Menyediakan input pertanian (benih, pupuk, dll.), dengan imbalan bahwa petani hanya menjual TBS kepada pengepul,
(2) Menyediakan kredit bagi petani,
(3) Sebagai pembeli TBS dari petani,
(4) Sebagai pengangkutan TBS dari petani,
(5) Sebagai pemegang izin perintah pengiriman resmi dari pabrik kelapa sawit. Perintah pengiriman (delivery order) merupakan hak eksklusif dalam hal ini yang diberikan kepada pengepul untuk mengirimkan TBS ke sebuah pabrik kelapa sawit (Anggraini and Grundmann, 2013). Biasanya pengepul yang memegang perintah pengiriman menghadapi tekanan untuk memenuhi pesanan dan dapat dijatuhi sanksi atau kehilangan izin jika mereka tidak dapat memenuhinya.

Pada kondisi pengepul berperan sebagai pemasok input sekaligus pembeli hasil kelapa sawit, maka akan mempengaruhi penentuan harga kepada petani, hal yang sama juga bisa terjadi ketika petani berhadapan langsung dengan perkebunan kelapa sawit (McCarthy and Cramb, 2009).

Rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan mensyaratkan bahwa seluruh TBS dalam rantai pasok harus legal, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi. Hal ini merupakan beban tersendiri bagi petani swadaya yang seringkali tidak dapat memenuhinya. Pemerintah daerah, dengan kemungkinan dukungan dari pihak luar,

harus membantu petani swadaya untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut. Dukungan ini akan memastikan bahwa plot perkebunan yang dikelola pekebun swadaya telah terdaftar dan TBS yang mereka hasilkan dapat dilacak. Pekebun juga memerlukan dukungan untuk mengadopsi praktik-praktik budidaya yang baik seperti penggunaan material tanaman berkualitas tinggi dan pupuk yang sesuai. Adopsi praktik-praktik budidaya yang baik ini juga memerlukan ketersediaan pinjaman secara finansial dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani swadaya. Dalam memastikan keterlacakan tandan buah segar tersebut identitas dan praktik-praktik pihak perantara seperti pengepul dan pengangkut perlu untuk diketahui dan turut diregulasi.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pemasaran TBS menurut para responden, antara lain: (i) Harga TBS murah/tidak stabil, (ii) Penjualan masih melalui tengkulak/pengepul, (iii) Harga buah ditentukan oleh tengkulak, (iv) Akses jalan yang belum baik, (v) Pembayaran tidak cash, (vi) Kualitas buah yang kurang memenuhi standar, (vii) Pabrik rusak/keterbatasan pembeli. Sehubungan permasalahan-permasalahan pemasaran TBS, maka para responden mengajukan usulan sebagai berikut: (i) Perlu upaya/bantuan pemerintah untuk menaikkan harga sawit, pemerintah membuat aturan tentang sawit mandiri, (ii) Kerjasama dengan pabrik/dapat menjual langsung ke PKS, (iii) Adanya standar harga/ perbaikan harga, dan sosialisasi harga sawit, (iv) Memudahkan akses/pengerasan jalan untuk penjualan sawit mandiri, (v) Adanya kelompok tani dan legalitasnya untuk mempermudah petani menjual langsung ke pabrik, (vi) Adanya pelatihan dan pendampingan.

Figure 5.7. Loading activity of palm fruit for sale to collectors

Kondisi antar petani sawit swadaya yang sangat bervariasi (kualitas bibit, kesuburan tanah, jarak kebun dengan pabrik, kondisi jalan, jumlah populasi sawit, dll.) menyebabkan produktivitas dan kualitas produksi kelapa sawitnya juga bervariasi dan sulit mendapatkan harga yang tinggi. Petani swadaya umumnya belum menyadari beberapa hal tentang penentuan harga TBS, antara lain:

(1) Harga TBS ditentukan dari rendemen bukan dari berat tandan saja, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa penetapan harga TBS sangat dipengaruhi oleh tingkat rendemen CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil), harga CPO dan PKO, serta biaya produksi CPO dari tiap PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Penetapan harga ini sebenarnya ditujukan untuk petani plasma, yang umur tanamannya dapat diketahui dengan pasti, sedangkan petani swadaya pada umumnya memiliki umur tanaman yang sangat bervariasi sehingga sulit menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karenanya perusahaan pada umumnya menetapkan harga yang lebih rendah untuk TBS dari kebun petani swadaya.
(2) Secara umum, fluktuasi harga TBS juga dipengaruhi oleh faktor iklim, dimana pada musim kering produksi TBS biasanya rendah sehingga suplai ke PKS juga menurun dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Sedangkan pada musim hujan produksi berlimpah, menyebabkan harga menjadi lebih rendah (Corley & Tinker, 2003; Pahan, 2012). Kondisi dimana terjadi fluktuasi produksi sawit akibat respon terhadap kondisi iklim menjadi salah satu penyebab variasi harga sawit yang belum banyak diketahui oleh petani.
(3) Sebagian besar dari petani swadaya belum memiliki surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B), sehingga luas area dan produksi kelapa sawit rakyat belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya informasi yang akurat mengenai produksi TBS petani swadaya. Terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran TBS tidak dapat diantisipasi dengan baik dan fluktuasi harga tidak bisa diprediksi dengan tepat.
(4) Harga TBS di tingkat petani sawit dipengaruhi oleh jarak dan kondisi jalan antara kebun dan PKS, semakin jauh lokasi kebun maka biaya transportasi semakin tinggi, yang menyebabkan potongan harga semakin besar.

Saluran pemasaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen (Mursid, 1997). Saluran pemasaran terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yakni saluran nol tingkat, saluran setingkat, saluran dwi tingkat, dan saluran tri tingkat (Swasta, 2002). Saluran pemasaran yang terlibat dalam tataniaga TBS kelapa sawit umumnya satu tingkat, yakni: Petani, Pedagang pengumpul, Pabrik Kelapa Sawit (Sumiati, Rusida, & Idawati, 2017). Namun di daerah lain, terdapat saluran pemasaran TBS yang lebih kompleks dengan

melibatkan lebih banyak pelaku pemasaran. Saluran pemasaran TBS di Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan pedagang perantara dan pemilik Surat Pengangkut Buah (SPB) sebagai lembaga pemasaran (Nugroho, 2015).

Sumartono et al., (2018) menyatakan bahwa saluran pemasaran yang telah terbentuk selama ini, yakni: (1) Saluran pemasaran I: Petani menjual ke pedagang pengumpul lalu menjual pabrik, (2) Saluran pemasaran II: Petani menjual ke kelompok tani lalu menjual pabrik, dan (3) Saluran pemasaran III (Saluran Nol): Petani langsung menjual ke pabrik Saluran III dapat dikategorikan sebagai saluran nol tingkat (Swasta, 1991).

Sebagaimana umumnya desa-desa sentra perkebunan kelapa sawit rakyat, para petani memiliki kebebasan dalam memilih saluran pemasaran dalam penjualan hasil panennya saluran pemasaran I (petani – pedagang pengumpul – pabrik) merupakan saluran yang paling mendominasi pilihan para petani. Alasan utama para petani memilih pola saluran ini adalah adanya sistem pembayaran tunai oleh pedagang pengumpul. Selain itu, telah terjalin hubungan yang baik antara petani dengan pedagang pengumpul dalam waktu yang cukup lama. Kepercayaan (trust) antara petani dan pedagang pengumpul menjadi salah satu modal sosial yang telah terbentuk dalam tatanan masyarakat di pedesaan. Umumnya petani mengakui hubungan kemitraan yang terjalin dengan pedagang pengumpul tidak hanya dalam aspek pemasaran saja namun juga dalam aspek pengadaan sarana produksi.

Beberapa pedagang pengumpul juga memberikan pinjaman modal kepada petani. Transaksi jual beli bahkan biasanya dilakukan petani dengan pedagang pengumpul sebelum proses pemanenan terjadi. Petani telah memberikan jadwal panennya kepada pedagang pengumpul jauh-jauh hari. Pada saat pemanenan, pedagang pengumpul telah siap di lokasi panen, lalu mengangkut hasil panen petani untuk langsung ditimbang dan dibayar langsung di tempat. Bagi petani, sistem ini dianggap sangat simple dan memudahkan, meskipun harga jual yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan apabila petani memilih saluran pemasaran lain.

Mayoritas responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Jenis pelatihan ataupun pembinaan yang diinginkan petani untuk pengembangan pengelolaan sawit adalah pelatihan dari perusahaan mengenai Budidaya /berkebun Sawit yaitu Pelatihan pemupukan dan perawatan, Peremajaan, *Pruning* dan sistem tanam serta Pemanenan.

Di Indonesia, pada umumnya petani swadaya tidak memiliki kepastian tenurial. Petani swadaya yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah akan mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman bank dan menghadapi tantangan yang berat

untuk memperoleh sertifikat keberlanjutan. Sertifikat kepemilikan lahan (Sertifikat Hak Milik atau SHM) yang dipandang sebagai bukti kepemilikan lahan terkuat, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang dari bank. Sebagai syarat mendapatkan Sertifikat Hak Milik, seorang pekebun harus memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dari lurah atau kepala desa. Alternatif dari SKT adalah Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang juga dikeluarkan oleh kepala desa. Camat harus menandatangani SKT atau SPT tersebut. Penerbitan SKT/SPT dicatat secara manual di dalam buku catatan tanah di tingkat desa. Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah telah memperkenalkan bentuk lain bukti kepemilikan lahan yang diakui, yakni Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). SKTA dikeluarkan oleh kepala lembaga adat lokal. Namun menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), SKTA tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik karena BPN hanya mengakui surat kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa. Setelah mendapatkan SKTA, pekebun dapat mengurus SKT jika tanah yang dimiliki secara pribadi tersebut berukuran kurang dari 5 hektar, selanjutnya setelah memiliki SKT, pekebun dapat mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki sertifikat lahan pada kebun sawit adalah responden di Desa Mekar Raya (6,2%), Pematang Gadung (68,8%), Sungai Pelang (56%), dan Sungai Besar (73,3%). Responden-responden inilah yang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dana baik dari Credit Union maupun bank. Adapun responden sebagian besar responden yang belum memiliki sertifikat terdapat di Desa Gema (88,2%) dan Desa Mekar Raya (93,8%). Status Kepemilikan Sertifikat dan Sumber Peminjaman Dana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.4. Status kepemilikan sertifikat lahan dan sumber peminjaman dana

Information	Gema	Mekar Raya	Pematang Gadung	Sungai Pelang	Sungai Besar	Batu Daya	Kemora
Kepemilikan sertifikat lahan (%)							
Tidak memiliki	88,2	93,8	31,2	40	26.7	91	92
Memiliki	0	6,2	68,8	56	73.3	0	8
Tidak menjawab	11.8	0	0	0	0	0	0
Sumber dana pinjaman (%)							
Credit Union	17,6	6,3	0	0	0	0	0
Bank	0	0	12,5	3,2	6,7	0	0
Keluarga/tetangga	0	0	0	0	0	18	0
Dana sendiri	0	0	0	0	0	0	100

Sumber: Hasil pengolahan data TI (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa-desa yang sebagian besar respondennya memiliki sertifikat lahan sawit (Pematang Gadung, Sungai Pelang, Sungai Besar), maka mereka melakukan pinjaman ke bank walaupun jumlah responden yang melakukan pinjaman di bank tidak banyak yaitu 3,2-12,5% responden saja. Adapun desa-desa yang sebagian besar respondennya tidak memiliki sertifikat lahan sawit (Desa Gema, Mekar Raya, Batu Daya, dan Kemora), maka umumnya tidak melakukan pinjaman ke bank, meskipun ada beberapa yang masih melakukan pinjaman tetapi melalui Credit Union (misalnya di Desa Gema dan Mekar Raya).

Hasil studi Tropenbos Indonesia (2019) menunjukkan beberapa produk pinjaman yang disediakan oleh CU dan urutan alasan peminjaman terbanyak adalah: (i) Pinjaman kebutuhan konsumtif (membeli sepeda motor), (ii)Pinjaman dana pendidikan, (iii) Pinjaman kebutuhan kesehatan, (iv) Pinjaman bisnis/berdangang/ usaha perkebunan/pertanian termasuk untuk sawit (Produktif), (v) Pinjaman pembangunan rumah tinggal.

CU merupakan sebuah lembaga keuangan berbasis koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, serta bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Terdapat tiga prinsip utama CU, yaitu: (1) Asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya), (2) Asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan (3) Asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman). Untuk mengajukan pinjaman pada CU, maka terdapat beberapa persyaratan, yaitu: (i) Fotokopi KTP suami istri, (ii) Fotokopi KK, (iii) Fotokopi buku anggota, (iv) Sertifikat tanah atau minimal SKT jika meminjam dana di atas nilai tabungan yang dimiliki, (v) Dilakukan survey penilaian kelengkapan, kejelasan dan perkiraan harga sertifikat tanah yang dijadikan jaminan, (vi) Prosesnya dilakukan maksimal 14 hari (2 minggu), (vii) Surat pernyataan apabila terjadi gagal bayar, (vii) Peminjaman tidak bisa dilakukan oleh kelompok, kalaupun diajukan kelompok maka tetap harus ada perwakilan individu yang mengatasnamakan kelompok. Meskipun bunga CU lebih tinggi (misalnya berkisar 1-1,25%), namun umumnya masyarakat lebih memilih peminjaman melalui CU, alasannya adalah adanya kemudahan proses dana pinjaman yang berdasarkan pada kepercayaan. Peminjaman modal bisa diberikan kepada masyarakat meskipun usahanya belum berjalan, sedangkan pada bank baru dapat memberikan dana pinjaman jika usaha telah berjalan minimal 6 bulan.

Menurut responden ABKT yang berada di sekitar areal kebun paling banyak berstatus APL (Areal Pemanfaatan Lain) yang ada di hampir semua desa. Keberadaan ABKT lainnya adalah sebagai berikut: (i) Hutan lindung terdapat di Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Gema, Mekar Raya, Kemora dan Batu Daya (ii) Areal gambut dengan kedalaman > 3 m, terdapat di Desa Sungai

Pelang, Sungai Besar, Pematang Gadung, dan Gema, (iii) Hutan adat, terdapat di Desa Pematang Gadung, Gema, dan Batu Daya (iv) Sempadan sungai, terdapat di Pematang Gadung, Gema, Mekar Raya Kemora dan Batu Daya, dan (v) Tembawang, terdapat di Desa Sungai Besar, Pematang Gadung, Gema Kemora dan Batu Daya.

Salah satu upaya dalam mengurangi dampak negatif kelapa sawit terhadap lingkungan adalah dengan memastikan bahwa petani sawit mandiri memproduksi sawitnya secara produktif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan produktivitas sawit, masyarakat masih mengandalkan pelaksanaan perluasan/ekstensifikasi kebun sawit, hal ini disebabkan masih minimnya informasi/pengetahuan tentang budidaya sawit secara berkelanjutan dan masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap optimalisasi faktor produksi/intensifikasi kebun sawit. Ekstensifikasi kebun kelapa sawit jika tidak mendapatkan bimbingan dan pendampingan dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian sumberdaya alam dan tanggung jawab sosial yang justru semakin mempersulit petani untuk memperoleh sertifikasi kebun sawitnya (Hutabarat, 2017).

Sebagaimana diketahui bahwa sertifikasi kebun sawit merupakan respon masyarakat dunia, terutama mereka yang menjadi konsumen berbagai produk dengan bahan baku kelapa sawit, terhadap proses produksi sawit yang dianggap tidak dilakukan secara lestari. Sertifikasi menjadi instrumen untuk menjamin bahwa produksi kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan standar dan kriteria yang ramah lingkungan maupun sosial sehingga produk-produk tertentu dapat memasuki pasar tertentu, tujuannya adalah menjamin produk-produk yang dipasarkan diproduksi secara lestari dan berkelanjutan.

Meskipun China dan India sebagai pasar terbesar produk sawit selain Eropa saat ini belum menerapkan sertifikasi, namun di masa mendatang kecenderungan untuk menerapkan sertifikasi akan berkembang ke negara-negara non-Uni Eropa. Ketika kelak seluruh negara telah menerapkan sertifikasi sawit, maka akses pemasaran produk sawit ke luar negeri dari perkebunan rakyat pada perusahaan atau pabrik yang menjual produk minyak sawitnya ke pasar internasional, akan semakin kecil. Di lain pihak akses pemasaran produk sawit di dalam negeri juga akan semakin sulit ketika sertifikasi ISPO membatasi akses pemasaran produk sawit pada PKS bagi para petani yang tidak memiliki sertifikasi ISPO.

Target sertifikasi ini tentu ditujukan kepada seluruh bentuk kebun sawit, baik perkebunan besar swasta (PBS), perkebunan besar negara (PBN), maupun perkebunan rakyat (PR). Sertifikasi untuk produk-produk kelapa sawit di Indonesia meliputi RSPO, ISPO, dan ISCC. Sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang merupakan standar

baku industri kelapa sawit yang wajib dipenuhi oleh semua industri atau operator perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, ISPO hanya diberlakukan bagi perusahaan besar dan pabrik kelapa sawit, sedangkan untuk pekebun plasma dan swadaya penerapannya masih bersifat sukarela. Di lain pihak menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (2019) saat ini kebun sawit yang merupakan perkebunan rakyat mencapai luas 5.958.502 ha atau 40,6% dari total luas sawit di Indonesia. Sertifikasi merupakan suatu keharusan bagi pekebun kelapa sawit swadaya agar mendapatkan akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan menjadi sebuah pekerjaan besar ketika areal kebun sawit rakyat begitu luas tersebut harus memiliki sertifikasi kebun sawit. Cukup banyak hal yang perlu dilakukan ketika perkebunan sawit rakyat ingin memperoleh sertifikasi kebun sawit, antara lain: (i) Petani harus membentuk organisasi/kelompok dan menjadi anggota kelompok sawit, (ii) Memiliki sertifikat lahan kebun yang legal, (iii) Memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), (iv) Memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), (v) Petani medokumentasikan dan mencatat perkebunan kelapa sawit, (vi) Petani melakukan pemeliharaan dan pemupukan tanaman sawit sesuai dengan dosis dan cara yang direkomendasikan internal control system (ICS) sesuai standar RSPO, (vii) Semua kegiatan operasional petani akan diawasi oleh ICS sebelum diaudit lembaga auditor. Melalui sertifikasi tersebut petani diharapkan akan memperoleh harga premium sebagai satu-satunya insentif bagi petani.

Namun melihat berbagai persyaratan untuk memperoleh sertifikasi sawit sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat digambarkan bahwa proses menuju sertifikasi sangat berat, di lain pihak kapasitas pekebun secara individual tidak memungkinkan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tanpa ulur tangan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian jelas bahwa posisi petani kelapa sawit swadaya sangat lemah dalam menghadapi berbagai perubahan di pasar tingkat internasional. Untuk itu perlu peran para pihak dalam melakukan pendampingan, bimbingan, dan bantuan kepada petani swadaya ketika mereka diharuskan melakukan sertifikasi lahan sawitnya, antara lain (i) Pihak pemerintah melalui otoritasnya dalam menyiapkan peraturan perundang-undangan, (ii) Pemerintah daerah/tingkat lokal memberikan pemahaman dan penjelasan dalam mengimplementasikan peraturan terkait di lapangan (misalnya tentang dokumen legalitas kelapa sawit), (iii) NGO/LSM, dengan ketersediaan sumberdayanya bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan bimbingan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dan proses pengurusan sertifikasi sawit.

Peremajaan kelapa sawit merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan peremajaan tanaman (penanaman kembali) yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun bertahap. Peremajaan

kelapa sawit juga terkait erat dengan upaya peningkatan produksi suatu kebun. Dari segi pengusahaan, suatu kebun kelapa sawit dianggap sudah tua jika berumur sekitar 20 sampai 25 tahun dan perlu diremajakan kembali. Peremajaan tanaman (replanting) dilakukan agar hasil produksi kebun sawit tidak menurun secara drastis. Pada tahap ini diperlukan perencanaan yang matang dan terperinci untuk menghindari terjadinya kerugian selama kegiatan peremajaan. Untuk mengatasi hal tersebut, peremajaan dapat dilakukan secara bertahap dengan membagi areal tanaman tua menjadi beberapa wilayah pengerjaan. Tahapan peremajaan tanaman kelapa sawit meliputi: (i) Penumbangan tanaman lama, (ii) Pencacahan cabang dan batang, (iii) Penumpukan, (iv) Penanaman tanaman penutup tanah (LCC), (v) Pemancangan, (vi) Konservasi tanah, (vii) Pembuatan lubang tanam, dan (viii) Penanaman bibit tanaman kelapa sawit (Mangoensoekardjo dan Semangun 2005). Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan replanting, kecuali 53% responden dari Desa Gema yang memiliki rencana melakukan replanting. Alasan responden belum memiliki rencana replanting adalah karena selain tanaman sawit mereka saat ini masih sangat muda, juga harga sawit cenderung murah.

Dalam melakukan kegiatan perawatan kebun, para responden memberikan perhatian lebih terhadap Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), hal ini ditunjukkan oleh banyaknya responden yang menyatakan bahwa kondisi TPH dalam keadaan baik, diikuti dengan pasar pikul yang digunakan untuk aktivitas mengeluarkan TBS ke TPH.

Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyusun buah hasil dari pemanenan, dapat berupa TBS dan brondolan. Biasanya dalam 3 pasar pikul terdapat 1 TPH yang letaknya di depan jalur pokok yang berada di pinggir jalan koleksi. Tujuan pembuatan TPH tersebut adalah untuk: (i) Memudahkan dalam perhitungan jumlah janjang yang telah dipanen, (ii) Memudahkan proses pengangkutan buah, (iii) Agar TBS dan brondolan yang terkumpul bersih dari sampah, tanah atau pasir. Untuk menjaga tetap bersihnya brondolan, biasanya setiap TPH harus dialasi dengan karung bekas pupuk ataupun brondolan itu sendiri dimasukkan ke dalam karung.

Pendapatan rata-rata pertahun para responden di semua desa studi paling banyak diperoleh dari sumber usaha pertanian (sawit, karet, padi, dan lainnya). PDB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Sebaliknya, semakin kecil PDB perkapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Hasil studi menunjukkan bahwa total pendapatan perkapita per tahun dari kelima desa berkisar antara Rp 27.591.200/tahun – Rp

73.117.647 atau pendapatan per hari berkisar Rp 75.592,33 – Rp 200.322,32. Pendapatan per kapita para responden yang tertinggi diperoleh dari Desa Gema sedangkan terendah dari Desa Sungai Besar.

Pada Maret 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis standar garis kemiskinan masyarakat Indonesia adalah Rp 425.250 per kapita per bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa orang miskin Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp 14.175 setiap harinya. Dilain pihak Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2018 mencapai Rp13.588,8 triliun. Dengan PDB tersebut maka rata-rata pendapatan per kapita atau orang mencapai Rp 56 juta per tahun. Mengacu pada data ini, maka para responden di desa-desa yang menjadi tempat studi tidak termasuk pada golongan orang miskin, karena pendapatan rata-rata per hari mereka di atas Rp 14.175 yaitu berkisar Rp 75.592,33 – Rp 200.322,32. Namun berdasarkan PDB nasional, maka terdapat beberapa desa yang memiliki pendapatan perkapita per tahun yang kurang dari PDB nasional (Rp 56 juta/tahun), khususnya Desa Sungai Pelang (Rp 39.248.480/kapita/tahun), Desa Sungai Besar (Rp 27.591.200/kapita/tahun), dan Desa Mekar Raya (Rp 35.054.125/kapita/tahun). Adapun Desa Pematang Gadung (Rp 62.910.125/kapita/tahun) dan Desa Gema (Rp 73.117.647/ kapita/tahun) memiliki PDB yang lebih tinggi dari PDB nasional.

Bab 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi, maka profil petani sawit rakyat di Kabupaten Ketapang secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Identitas responden

Terdapat tiga kelompok responden dalam pengelolaan perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Ketapang, yaitu: (1) Petani Swadaya Murni (budidaya sawit dilakukan sendiri tanpa pendampingan, sumber dana untuk budidaya dari sendiri atau meminjam ke lembaga keuangan atas usaha sendiri, (2) Petani Swadaya Berbasis Koperasi (budidaya sawit didampingi oleh organisasi pengelola plasma, mendapat pinjaman dana dari koperasi/BUM Desa), (3) Petani Plasma (budidaya sawit dilakukan oleh perusahaan, mendapat pinjaman dana dari perusahaan). Responden yang didominasi Suku Dayak dijumpai di Desa Gema, Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya. Responden yang didominasi suku selain Dayak (Jawa, Sunda, Melayu, Lampung, Cina) dijumpai di Desa Pematang Gadung, Sungai Pelang, dan Sungai Besar.

Kepemilikan lahan

Seluruh responden memiliki lahan sawit di lahan milik pribadi yang luasnya bervariasi, lahan dikuasai, dan digarap sendiri. Luas lahan sawit yang dimiliki berkisar antara 0,5-25 ha, luas lahan sawit paling banyak dimiliki adalah 2 ha, umur sawit berkisar 1-10 tahun dan paling banyak umur 5 tahun (pada sawit swadaya murni), umur 2-13 tahun (pada sawit swadaya berbasis koperasi), dan umur 22 tahun (pada sawit plasma). Jenis penggunaan lahan yang banyak dijumpai selain sawit adalah sawah, kebun karet, dan belukar.

Penggunaan lahan

Pola penanaman; Sebagian besar petani melakukan pola penanaman sawit secara monokultur , namun demikian ada sebagian lainnya yang melakukan penanaman secara campuran (misalnya di Desa Sungai Besar, Sungai Pelang, Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya). Pola penanaman campuran dilakukan dengan menanam nanas dan jengkol pada kebun sawit.

Sejarah penguasaan lahan; Sejarah asal penguasaan lahan sawit terdiri dari tiga cara, yaitu: (1) Lahan berasal dari cara membeli, (2) Lahan berasal dari hibah/transmigrasi, (3) Lahan berasal dari warisan, dan (4) Lahan merupakan pembagian kebun plasma dari perusahaan. Sebelum ditanami sawit lahan-lahan

tersebut berupa semak belukar (misalnya di di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, dan Pematang Gadung) atau berupa kebun karet (misalnya di Desa Gema, Mekar Raya, Kemora, dan Batu Daya).

Alasan budidaya sawit; Alasan perubahan penggunaan lahan menjadi kebun sawit, adalah: (1) Harga sawit lebih tinggi, (2) Mengikuti teman/orang lain yang melakukan budidaya sawit, dan (3) Sering terjadi kebakaran. Perubahan penggunaan lahan menjadi sawit ini banyak dilakukan pada tahun 2012-2014. Faktor paling banyak sebagai pendorong berpindahnya masyarakat ke desa adalah adanya harapan memperoleh lahan untuk dilakukan pengelolaan.

Status legalitas lahan; Terdapat dua status legalitas lahan sawit, yaitu: (1) Lahan telah bersertifikat, sebagian besar terdapat di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, Pematang Gadung, dan Desa Teluk Bayur; (2) Lahan belum bersertifikat, sebagian besar terdapat di Desa Gema, Mekar Raya, Kemora, Batu Daya, dan Muara Jekak, di mana desa-desa ini didominasi oleh Suku Dayak. Secara umum lahan sawit yang tidak memiliki sertifikat (61,3%) lebih banyak jika dibandingkan lahan yang memiliki sertifikat (35,9%). Padahal legalitas lahan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi syarat mutlak bagi petani untuk memperoleh sertifikasi ISPO.

Terdapat beberapa kendala petani untuk melakukan pengurusan sertifikat lahan sawit antara lain: (i) Biaya pengurusan sertifikat lahan cukup mahal, petani lebih memilih untuk membeli pupuk daripada mengurus sertifikat lahan; (ii) Masalah legalitas membuat para petani dapat berurusan dengan penegak hukum, terutama jika lahan sawit masuk ke dalam kawasan hutan, hal ini terkait dengan tumpang tindih lahan, (iii) Adanya keterbatasan jumlah staff di Badan Pertanahan Nasional yang tidak sebanding dengan jumlah sertifikat yang diurus sehingga menjadi kendala pengurusan sertifikat.

Keorganisasian petani; Sebagian besar responden tidak tergabung ke dalam kelompok tani sawit karena beberapa alasan, antara lain: tidak tertarik, tidak ada yang mengajak atau memfasilitasi untuk menjadi anggota, tidak memiliki waktu, atau belum tersedianya organisasi petani. Mereka juga telah menabung dengan jumlah tabungan rata-rata kurang dari Rp 500.000/bulan dimana tabungan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan. Sangat sedikit petani yang sengaja menabung untuk persiapan kegiatan replanting.

Pengelolaan kebun

Sumber dana; Sumber dana untuk pengelolaan kebun sawit sebagian besar diperoleh dari modal sendiri, namun demikian beberapa responden juga memperoleh modal dari dana pinjaman, antara lain: (1) Sawit swadaya murni

(Pinjaman dari Credit Union, bank, keluarga sendiri/petani lain), pinjaman Bank, (2) Sawit berbasis koperasi (pinjaman dari koperasi/BUMDes dengan besaran Rp 8-10,5 juta), (3) Sawit plasma (pinjaman dari perusahaan sawit).

Bibit sawit; Sebagian besar responden belum memiliki pengetahuan tentang: ciri-ciri bibit sawit berkualitas, tempat penjualan bibit berkualitas, serta sistem tanam sawit. Jenis bibit yang paling banyak dibudidayakan adalah Marihat, kemudian diikuti jenis Lonsum, Sopim, Costarika, Sokpindo, Spindo, Tanera dan Sriwijaya. Sumber bibit: (1) Sawit swadaya murni: sebagian besar responden memperoleh bibit sawit dengan cara membeli dari pedagang atau petani lain dengan harga Rp 35.000/batang. Sangat sedikit responden yang membeli bibit dari perusahaan atau membuat bibit sendiri; (2) Sawit berbasis koperasi: sumber bibit seluruhnya disediakan oleh koperasi dengan harga Rp 55.000/batang; (3) Sawit plasma: bibit seluruhnya diadakan perusahaan, petani tidak mengetahui harga bibit dan tidak dilibatkan dalam penentuan jenis bibit sawit yang akan ditanam.

Pembukaan lahan; sebagian besar responden petani swadaya murni dan berbasis koperasi melakukan pembukaan lahan dengan cara tebang, tebas, bakar karena cara ini dianggap lebih mudah dan murah, di mana pengerjaannya dilakuan dengan cara gotong royong/arisan, dilakukan sendiri, atau mempekerjakan orang lain. Lahan yang sudah terbuka maka dilakukan penyemprotan herbisida. Cara pembukaan lahan seperti ini dapat menyebabkan kebakaran dan gangguan kesehatan. Adapun pada petani plasma tidak ada keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pembukaan lahan, semua ditentukan perusahaan. Penanaman sawit; Sebagian besar responden menerapkan jarak tanam: 8m x 8m, 8m x 9m, dan 9m x 9m atau setara dengan jumlah tanaman sawit 100-125 batang/ha atau 126-150 batang/ha. Pelaksanaan penanaman adalah sebagai berikut:

(1) *Sawit mandiri/swadaya*: ditanam sendiri, borongan per bibit (Rp 3.000 – 10.000)/bibit), borongan per hektar (Rp 600.000-1.2000.000/ha), atau sistem upah harian sebesar Rp 65.000- 120.000/hari selama 3-12 hari.
(2) *Sawit berbasis koperasi*; Jumlah tanaman sawit 92-200 batang/ha, biaya Rp 500.000-4,8 juta, penanaman sudah termasuk dalam komponen pinjaman.
(3) *Sawit plasma*; petani tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat penamanan bibit.

Perawatan kebun sawit; Hampir seluruh responden melakukan perawatan kebun sawit, baik secara manual atau penggunaan herbisida. Jenis herbisida yang banyak digunakan adalah Gramoxon dan Round up. Kegiatan perawatan sawit dilakukan dengan cara: mandiri, upah borongan, atau upah harian.

Pemupukan; Responden di Desa Kemora dan Batu Daya tidak melakukan pemupukan sawit, sedangkan di lima desa lainnya sebagian besar responden

melakukan pemupukan sawit. Jenis pupuk yang umum digunakan adalah NPK dan urea, jenis pupuk lainnya yang digunakan adalah Borax, KCl, dolomit, TSP, SP36, dan pupuk kandang.

Pengendalian hama dan penyakit; mayoritas responden pada petani swadaya murni dan berbasis koperasi tidak melakukan pengendalian hama penyakit tanaman sawit. Kegiatan pengendalian penyakit dilakukan dengan menggunakan pestisida dan tidak rutin yaitu hanya jika terjadi serangan saja. Jenis pestisida yang digunakan antara lain Decis, Furadan dan Regent.

Pemangkasan/cabut daun; Hampir seluruh responden melakukan pemangkasan/ cabut daun, dengan frekuensi 1-3 kali/tahun atau bersamaan dengan waktu panen.

Pelibatan anak dan perempuan; Dalam melakukan pengelolaan kebun sawit tidak ada pelibatan anak, namun melibatkan kaum perempuan khusunya untuk kegiatan pemupukan dan pemanenan.

Pemanenan; Panen pertama umumnya dilakukan pada umur 3 tahun. Kegiatan panen dilakukan sebanyak 24 kali/tahun. Tanaman sawit swadaya murni yang dipanen umumnya saat ini berumur 5 tahun. Aktivitas yang dilakukan pasca panen buah sawit hanya pengangkutan ke TPH. Harga TBS yang berlaku adalah Rp 1000/kg. Hasil produksi TBS kebun sawit berumur 5 tahun ke atas adalah: (i) Sawit swadaya murni (8,3 ton/ha/tahun), (ii) Sawit swadaya berbasis koperasi (13,2 ton/ha/tahun), dan (iii) Sawit plasma (20,9 ton/ha/tahun). Produksi TBS pada kebun sawit sadaya murni yang dipupuk (8,3 ton/ha/tahun) lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi pada kebun yang tidak dipupuk (3,4 ton/ha/ tahun). Produktivitas TBS sawit swadaya murni tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas TBS kebun sawit umur 5 tahun menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2010) pada semua kelas kesesuaian lahan, yaitu: (i) KKL S1 (18 ton/ha/tahun), (ii) KKL S2 (16 ton/ha/tahun), dan KKL S3 (14,5 ton/ha/ tahun).

Pemasaran

Startegi pemasaran harus mempertimbangkan bahwa buah sawit harus segera diproses dalam kurun waktu 48 jam setelah dipanen, karena akan berdampak pada semakin rusaknya kualitas minyak sawit mentah (CPO). Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang persyaratan buah sawit yang dapat dipasarkan. Pengepul akan mengambil buah sawit di rumah, kebun petani, atau TPH. Penentu harga sawit adalah dari tengkulak, sedangkan penentu harga dari tengkulak adalah tengkulak yang memiliki SPK dari pabrik. Adapun tansaksi penjulan sawit antara

petani dengan tengkulak dapat dilakukan secara cash atau sistem ijon. Sehingga wajar jika terdapat perbedaan harga TBS antara harga di pabrik dan tengkulak sekitar Rp 500/kg. Penjualan sawit adalah sebagai berikut: (i) Sawit swadaya murni: penjualan sawit (TBS) melalui tengkulak/pengepul pemegang SPK; (ii) Sawit Swadaya berbasis koperasi: penjualan sawit melalui pengepul, koperasi, BUMDes, atau menjual langsung ke PKS; (iii) Sawit plasma: penjualan sawit melalui perusahaan.

Pelatihan dan pembinaan

Mayoritas responden petani sawit swadaya murni menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan tentang budidaya sawit, sebagian kecil petani sawit swadaya berbasis koperasi menyatakan pernah mendapatkan pelatihan, sebagian besar petani sawit plasma (67%) telah mendapatkan pelatihan dari perusahaan. Topik pelatihan yang dibutuhkan responden antara lain: (i) Budidaya dan perawatan sawit yang benar, (ii) Cara peningkatan produktivitas sawit, (iii) Pelatihan pembuatan pestisida organik (racun rumput/gulma), (iv) Pelatihan pembuatan pupuk, (v) Pelatihan pemasaran, (vi) Pelatihan pemeliharaan sawit, (vii) Pelatihan replanting (peremajaan) sawit, (vii) Pelatihan pemanenan sawit.

Modal usaha

Untuk petani sawit swadaya murni, sebagian besar responden menyatakan bahwa modal untuk usaha perkebunan sawit diperoleh dari modal sendiri dan sebagian besar mereka tidak menyiapkan modal khusus untuk usaha kebun sawit. Hanya sebagian kecil responden yang modal usaha sawitnya diproleh dari peminjaman bank atau Credit Union. Pada petani sawit swadaya berbasis koperasi sebagian modal dari sendiri, sebagian lainnya dari pinjaman koperasi (Koperasi Kelompok Tani Karya Bersama). Adapun untuk petani sawit plasma seluruh modal berasal dari pinjaman perusahaan (Rp 17 juta), di mana akan dilakukan pemotongan sebesar 30% dari hasil penjualan sawit setiap bulannya.

Pendapatan kebun sawit

Pada petani sawit swadaya murni menyatakan bahwa hasil sawit bersama enterpreneur dan karet merupakan sumber pendapatan terbesar pada desa-desa lokasi studi. Rata-rata pendapatan per tahun yang diperoleh khusus dari sawit mandiri berkisar antara Rp 5,6 – 23,1 juta/tahun, di mana sawit telah turut menyumbangkan sumber pendapatan masyarakat sebesar 18-49% dari total pendapatan/tahun responden. Tidak banyak responden yang merasa hasil sawit telah mampu mencukupi kebutuhan hidup maupun memperbaiki ekonomi rumah tangga. Adapun pada sawit swadaya berbasis koperasi dan sawit plasma sebagian responden menyatakan ada perbaikan ekonomi setelah mengelola kebun sawit, yaitu karena adanya pendapatan yang tetap dan hasil sait lebih besar jika

dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Pada petani sawit swadaya berbasis koperasi, hasil sawit telah menyumbang 28% dari total pendapatan per tahunan, sedangkan pada sawit plasma menyumbang 68%.

Kondisi rumah

Umumnya rumah berlantai kayu, keramik, semen, atau tanah; dindingnya berupa papan, batu bata, semen; atapnya berupa seng/asbes sebagian kecil berupa sirap/genteng; ukuran rumah rata-rata 36 m2 dan pekarangan 2.500 m2.

Keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

Tidak banyak responden yang memahami tentang konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan keberadaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Keberadaan flora/fauna yang dilindungi yang kini tidak ditemukan keberadaannya, antara lain: orangutan, burung Enggang. ABKT yang berada di sekitar areal kebun paling banyak berstatus APL (Areal Pemanfaatan Lain) yang ada di hampir semua desa, adapun Keberadaan ABKT lainnya adalah: hutan lindung, areal gambut dengan kedalaman > 3 m, hutan adat, dan Tembawang.

Pengetahuan tentang sertifikasi sawit berkelanjutan

Sebagian besar responden tidak mengetahui tentang sertifikasi kelapa sawit karena mereka tidak mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut, kondisi ini menyebabkan sangat sedikit responden yang tertarik untuk melakukan sertifikasi kebun sawit mereka. Informasi tentang RSPO, ISPO, dan pertanian berkelanjutan juga sangat sedikit diketahui responden. Beberapa hambatan untuk mendapatkan sertifikasi kebun sawit antara lain: (i) Responden sama sekali belum mendapatkan informasi tentang sertifikasi kelapa sawit, (ii) Responden tidak mengetahui cara mengurus sertifikasi kelapa sawit, (iii) Responden belum mengetahui manfaat sertifikasi kelapa sawit, (iv) Responden memiliki keterbatasan modal.

Peremajaan sawit (*replanting*)

Sebagian besar responden petani sawit swadaya murni tidak memiliki rencana untuk melakukan replanting kelapa sawit, alasannya adalah: tanaman sawit masih muda (1-10 tahun) dan harga sawit murah. Mereka juga tidak menyiapkan dana khusus untuk replanting. Terdapat sebagian responden yang berencana memperluas (ektensifikasi) lahan sawit, alasannya adalah: ingin lebih banyak memiliki sawit (peningkatan jumlah produksi) dan masih tersedia lahan. Sebaliknya belum ada responden yang berencana melakukan intensifikasi lahan sawitnya. Sebagian responden berencana menggunakan bibit bersertifikat untuk replanting, namun ada juga yang tidak akan menggunakan bibit bersertifikat karena harganya lebih mahal.

Organisasi petani sawit

Sebagian kecil petani di beberapa desa ada yang telah menjadi anggota dan sebagian besar lainnya belum menjadi anggota kelompok tani. Alasan petani tidak menjadi anggota organisasi petani, antara lain: (i) Petani tidak tertarik, (ii) Petani tidak ada yang mengajak atau memfasilitasi untuk menjadi anggota, (iii) Petani tidak memiliki waktu, (iv) Belum tersedianya organisasi petani yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Tabungan

Lebih dari setengah responden melakukan penabungan di Bank dengan rata-rata jumlah tabungan yang paling sering adalah Rp 500.000,-/bulan. Rencana penggunaan tabungan adalah: (i) Membiayai kebutuhan pendidikan/sekolah anak, (ii) Membeli lahan/investasi, (iii) Kebutuhan sehari-hari/keluarga, (iv) Kebutuhan yang mendesak, (v) Kesehatan, dan (vi) modal usaha.

Rencana masa depan

Sebagian besar responden berkeinginan agar pendidikan anak mereka sampai pada tingkat perguruan tinggi (sarjana). Harapan petani sawit kepada pemerintah antara lain: (i) Pemerintah memberikan perhatian kepada petani sawit mandiri, (ii) Pemerintah memberi bantuan pendampingan agar dapat melakukan penjualan TBS secara langsung ke PKS, (iii) Pemerintah memberi bantuan pupuk, bibit unggul, dan saprodi sawit, (iv) Pemerintah memberikan pembinaan/penyuluhan tentang budidaya sawit, (v) Pemerintah menyediakan kebijakan yang mendorong perubahan harga sawit.

Kondisi topografi dan tanah kebun sawit

Kebun sawit memliki topografi datar, bergelombang, hingga curam dengan jenis tanah mineral, gambut, dan rawa. Jenis tanah yang mendominasi di masing-masing desa adalah: Tanah gambut (Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Besar) dan Tanah mineral (Desa Pematang Gadung, Desa Gema, Desa Mekar Raya, Desa Kemora, dan Desa Batu Daya).

Perawatan kebun sawit

Perawatan kebun meliputi pasar pikul, piringan, gawang mati, Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), parit koleksi, dan parit utama. Berdasarkan survey kegiatan perawatan kebun yang paling lengkap dijumpai di Desa Pematang Gadung, kemudian diikuti oleh Desa Sungai Besar, Sungai Pelang, Mekar Raya, dan Batu Daya. Adapun di Desa Kemora tidak dilakukan perawatan kebun sama sekali.

Konservasi tanah

Kegiatan konservasi tanah meliputi: guludan teras, tapal kuda, front stacking, embung/rorak. Hampir semua kebun petani tidak ada guludan teras, sangat sedikit tapal kuda, tidak ada embung/rorak, Front stacking hanya terdapat di Desa Mekar Raya. Pengetahuan responden tentang pentingnya konservai tanah masih terbatas, pengetahuan responden tentang jarak minimal penanaman sawit dari batas sungai juga masih kurang, serta responden masih menempatkan baris tanaman sawit yang begitu dekat atau berada di pinggir sungai.

Pengelolaan air

Kegiatan pengelolaan air tidak banyak dilakukan oleh petani. Mereka yang melakukan kegiatan pengelolaan air dilakukan melalui beberapa cara: (i) Oleh pemerintah melalui sistem upah dan kolektif, (ii) Secara gotong royong dan kolektif, (iii) Dilakukan sendiri.

Defisiensi unsur hara

Sebagian besar petani tidak mengerti cara mengetahui ciri-ciri tanaman sawit kekurangan/defisiensi unsur hara. Sebagian petani ada yang mengerti cara mengetahui gejala defisiensi unsur hara dengan melihat pertumbuhan batang, warna daun, belajar dari teman yang bekerja di perkebunan. Namun demikian keduanya sama-sama tidak mengetahui kemana bisa memperoleh informasi tentang defisiensi unsur hara tersebut.

Hama dan penyakit tanaman sawit

Pengetahuan responden tentang pengendalian hama terpadu masih rendah. Sebagian besar responden belum melakukan upaya pengendalian hama penyakit, hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil responden yaitu melalui cara: penyemprotan menggunakan pestisida, fungisida, membersihkan lahan, membuang buah yang busuk, atau panen buah sawit lebih awal. Hampir seluruh responden belum pernah dilatih cara menggunakan pestisida. Jenis hama yang paling sering ditemukan adalah tikus, Orytes/kumbang, ulat api dan ulat kantong. Adapun jenis penyakit yang sering dijumpai adalah penyakit busuk buah, Ganoderma, Crown diseases. Upaya pengendalian hama yang diketahui para responden antara lain: penggunaan burung hantu, penggunaan bunga pukul sembilan (Imago parasatoit), dan paraquat (salah satu jenis herbisida yang paling banyak digunakan).

Daftar Pustaka

Amalia Rizki, Ratnawati N., Zulfi P.S.N., dan Ambar K. 2017. *Analisis Kesiapan Petani dan Koperasi dalam Program Peremajaan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit*. Jurnal Perkebunan Kelapa Sawit, 2017, 25(3): 171-182).

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Ketapang dalam Angka 2018*.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018*.

Cahyadi, E. R., & Waibel, H. (2015). *Contract Farming and Vulnerability to Poverty among Oil Palm Smallholders in Indonesia*. The Journal of Development Studies, 1-15.

Corley, R. H. V., & Tinker, P. B. H. (2003). *The oil palm*. New Jersey: Blackwell.

Daemeter. 2015. *Overview of Indonesian oil palm smallholder farmers: A typology of organizational models, needs, and investment opportunities*. Daemeter Consulting. Jakarta.

Dharmawan, Arya Hadi, Fredian T.N., Baba Barus, Rilus A. Kinseng, Yoyoh I., Hana I., Dyah M., Faris R., Hilda N.H., Ade M. R. 2019. *Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan*. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP. JURNAL ILMU LINGKUNGAN, Volume 17 Issue 2(2019):304-315.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2017-2019*. Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia-Jakarta.

Fauzi, Yan. 2002. *Kelapa sawit, budidaya, pemanfaatan hasil dan limbah. Analisa, Usaha dan Pemasaran*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Firdaus Lubis, Muhammad, Iskandar Lubis. 2018. *Analisis Produksi Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Di Kebun Buatan, Kabupaten Pelalawan, Riau*. Buletin Agrohorti 6 (2): 281-286 (2018).

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181128183250-4-44153/pak-jokowi-70-lahan-sawit-petani-tak-punya-sertifikat. [diakses November 2019].

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190723/99/1127576/capaian-sertifikasi-ispo-kebun-petani-sawit-rakyat-masih-rendah. [diakses November 2019].

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181128183250-4-44153/pak-jokowi-70-lahan-sawit-petani-tak-punya-sertifikat. [diakses November 2019].

https://mediaindonesia.com/read/detail/189731-kebun-sawit-rakyat-banyak-bermasalah-dalam-legalitas. [diakses November 2019].

https://gapki.id/news/4140/refleksi-industri-kelapa-sawit-2017-dan-prospek-2018. [diakses November 2019].

http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/69-penyebab-rendahnya-produktivitas-sawit-petani.html

https://www.isw.co.id/single-post/2018/11/07/Begini-Ciri-Bibit-Kelapa-Sawit-yang-Berkualitas. [diakses November 2019].

International Finance Corporation (IFC). 2013. *Diagnostic Study on Indonesian Oil Palm Smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential*. Jakarta, Indonesia.

Smallholders_Book_050116_web.pdfInstitute for Research and Empowerment (IRE) dan OXFAM. 2017. *Mengembangkan BUMDes untuk Petani sawit*. Policy Brief. https://ireyogya.org/uploads/Policy%20Brief%20Maret%20 2017%20SIAP%20CETAK.pdf. [diakses November 2019].

Institut Penelitian Inovasi Bumi (Inobu). 2016. *Seluk beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit secara Swadaya*. Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Manggabarani, A. (2009a). *Memaknai sebuah anugerah: Sumbangsih kelapa sawit Indonesia bagi dunia*. Jakarta: Ideals Agro Akbar.

Mangoensoekarjo, S dan H. Semangun. 2005. *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*. Gadjah Madha University Press. Yogyakarta.

McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. (2009). *Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers*. Geographical Journal, 175, 112–123. doi: DOI 10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x.

MISB Sertifikasi. 2017. *Penyebab Rendahnya Produktivitas Sawit Petani*. http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/69-penyebab-rendahnya-produktivitas-sawit-petani.html. [diakses November 2019].

Molenaar, J. W., Orth, M., Lord, S., Meekers, P., Taylor, C., Hanu, M. D. A., Ginting, L. (2010). *Analysis of the Agronomic and Institutional Constraints to Smallholder Yield Improvement in Indonesia*. Amsterdam, The Netherlands: Aidenvironment.

Molenaar JW, Persch-Orth M, Lord S, Taylor C dan Harms J. 2013. *Diagnostic Study on Indonesian Palm Oil Smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential, International Finance Corporation*: 96.

Mursid, M. (1997). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Nugroho, A. E., (2015). *Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Petani Swadaya Kecamatan Muara Muntai)*. Magrobis Journal, 15(2): 47-56.

Pahan, I. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit (Manajemen Agribisnis Hulu hingga Hilir)*. Jakarta (ID): Penabar Swadaya.

Prayitno Hadi, Rajif Dri Angga, Sukasmanto, M. Zainal Anwar. 2017. *Mengembangkan BUMVillage untuk Petani Sawit*. Policy Brief Maret 2017. Institute for Research and Empowerment (IRE).

Purwanto E, Jelsma I. 2020. *Possibilities and challenges for developing a more inclusive and sustainable independent smallholder oil palm sector in Ketapang, Indonesia*. Info brief-January, 2020. Tropenbos Indonesia. Bogor.

Purwanto E., Tjawikrama D., 2019. *The role of village assemblies in overcoming barriers to smallholder inclusiveness: examples from Indonesia*. ETFRN News 59; page 63-71. *in the* Jezeer, Rosalien and Nick Pasiecznik (eds.). (2019). *Exploring inclusive palm oil production*. Tropenbos International: Wageningen, the Netherlands. xx + 166 pp.

Puslitbangbun. 2010. *Budidaya Kelapa Sawit. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Saharaa, Haryadib dan Nuning Kusumowardhani. 2018. *Pembiayaan bagi Petani Kecil di Sektor Kelapa Sawit: Analisis kesenjangan antara skema kredit yang tersedia dan pembiayaan yang dihadapi petani kecil*. Brief Info-CIFOR.

Sakti Hutabarat. 2017. *Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global*. Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017.

Siahaan, Donald. 2017. *Kajian Potensi Rendemen untuk Mencapai Produktivitas CPO Tinggi Di Perkebunan Kelapa Sawit*. Medan. http://www.iopri.org/wp-content/uploads/2017/10/WPLACE-17-W1.1.-Kajian-Potensi-CPO-n-PKO-DS.pdf [diakses November 2019].

Sumartono, Eko, M. Suryanty, R. Badrudin, Agus R. 2018. *Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara*. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research. Vol. 4 No.1 Januari -Juni 2018

Sumiati, S; Rusida, R., & Idawati, I. (2017). *Analisis Saluran Pemasaran Kelapa Sawit Di Village Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*. Journal TABARO, 1(1): 38-50.

Teoh, C. H. (2012). *Key sustainability issues in the palm oil sector*. A Discussion Paper for MultiStakeholders Consultations (Commissioned by the World Bank Group). International Finance Corporation, The World Bank., Washington DC.

Lampiran

Lampiran 1. Kuisioner pengumpulan data desa

STUDI OIL PALM SMALLHOLDER MANAGEMENT

GUIDANCE OF VILLAGE INTERVIEW

1. Province :
2. Regency/City :
3. Subdistrict :
4. Village :
5. Address of the Village Office :
6. Name of the interviewees :
7. interviewees position : 1. Village Head 2. Village Secretary 3. Other Village Officials
8. Date of interview :
9. Start-finish time :
10. Interview location :
11. interviewees phone :
12. Name if interviewer :
13. Interviewer note :

Completeness interview checklist

	Approval Form / Consent
	Voice Recorder
	Observation Note
	Village Office Picture

Guidance of Village Indepth Interview In Ketapang
© TROPENBOS INDONESIA 2019
1

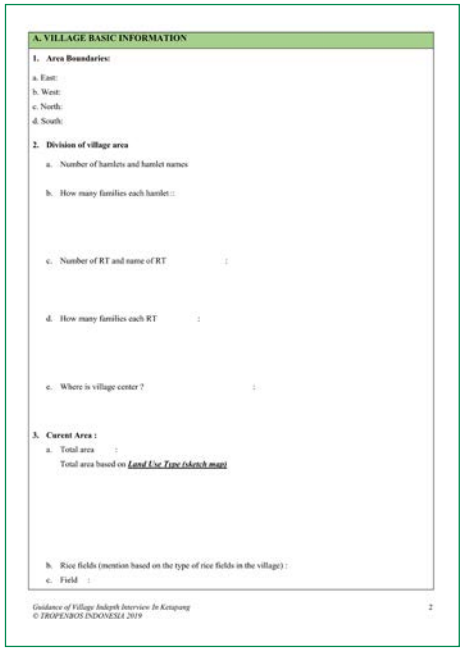

A. VILLAGE BASIC INFORMATION

1. **Area Boundaries:**

a. East:
b. West:
c. North:
d. South:

2. **Division of village area**

a. Number of hamlets and hamlet names

b. How many families each hamlet ::

c. Number of RT and name of RT :

d. How many families each RT :

e. Where is village center ? :

3. **Curent Area :**

a. Total area :
Total area based on ***Land Use Type (sketch map)***

b. Rice fields (mention based on the type of rice fields in the village) :
c. Field :

Guidance of Village Indepth Interview In Ketapang
© TROPENBOS INDONESIA 2019
2

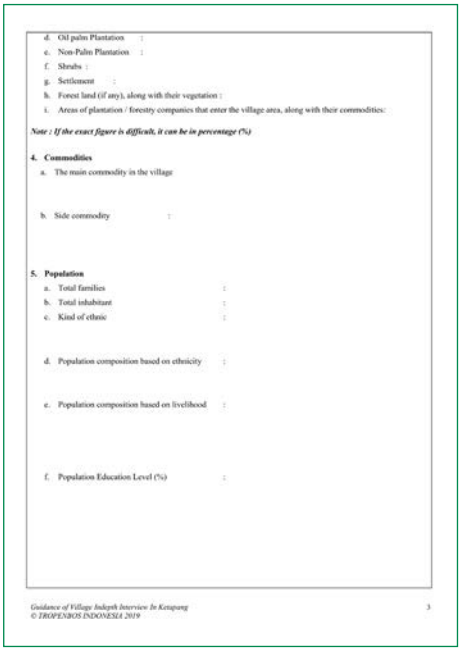

d. Oil palm Plantation :
e. Non-Palm Plantation :
f. Shrubs :
g. Settlement :
h. Forest land (if any), along with their vegetation :
i. Areas of plantation / forestry companies that enter the village area, along with their commodities:

Note : If the exact figure is difficult, it can be in percentage (%)

4. **Commodities**

a. The main commodity in the village

b. Side commodity :

5. **Population**

a. Total families :
b. Total inhabitant :
c. Kind of ethnic :

d. Population composition based on ethnicity :

e. Population composition based on livelihood :

f. Population Education Level (%) :

Guidance of Village Indepth Interview In Ketapang
© TROPENBOS INDONESIA 2019
3

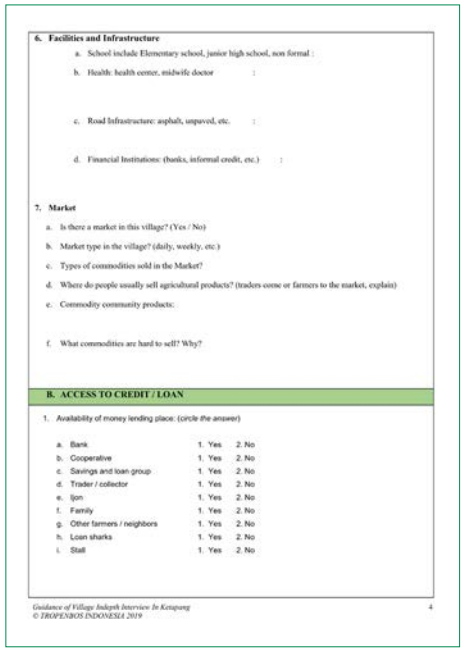

6. **Facilities and Infrastructure**

a. School include Elementary school, junior high school, non formal :

b. Health: health center, midwife doctor :

c. Road Infrastructure: asphalt, unpaved, etc. :

d. Financial Institutions: (banks, informal credit, etc.) :

7. **Market**

a. Is there a market in this village? (Yes / No)
b. Market type in the village? (daily, weekly, etc.)
c. Types of commodities sold in the Market?
d. Where do people usually sell agricultural products? (traders come or farmers to the market, explain)
e. Commodity community products:

f. What commodities are hard to sell? Why?

B. ACCESS TO CREDIT / LOAN

1. Availability of money lending place: (circle the answer)

a. Bank	1. Yes	2. No
b. Cooperative	1. Yes	2. No
c. Savings and loan group	1. Yes	2. No
d. Trader / collector	1. Yes	2. No
e. Ijon	1. Yes	2. No
f. Family	1. Yes	2. No
g. Other farmers / neighbors	1. Yes	2. No
h. Loan sharks	1. Yes	2. No
i. Stall	1. Yes	2. No

Guidance of Village Indepth Interview In Ketapang
© TROPENBOS INDONESIA 2019
4

C. VILLAGE HISTORY

1. When was this village formed:
2. The first ethnic / community present in this village?:
3. Mention the factors that make the tribe / community inhabit this village:
4. Please described about how is land clearing started in this village:
5. How does the system of land ownership in this village:
6. Please described the history of land ownership in this village:
7. Does anyone outside the village own land in this village? (Yes/ No). If yes, explain whether the sale is private or in the knowledge of village officials:
8. Is there any clarity in the boundaries of forest areas and land outside forest areas? Please explain:

D. HISTORY OF OPENING OIL PALM PLANTATION IN VILLAGE

1. How many family heads (HH) open oil palm in this village?

Type of oil plam plantation	1. Available 2. No	Number of families	Percentage (%)	Total area (Ha)
a. Independent oil palm plantation				
b. Plasma oil palm plantation				

2. When was the opening of oil palm plantations in this village (year)?
3. Is the initial opening of oil palm plantations done independently or direct plasma oil palm plantations?
4. Why do people switch to planting oil palm? Please explain
5. Does the community build oil palm by clearing secondary forests from ex-HPH or by converting their existing plantations?
6. Is the availability of land in this village now limited?
7. How is the ownership of the oil palm plantation (private own / other investors / outside the village)?
8. How is the management of oil palm plantations in this village? is it managed individually / group / village / plasma?
9. Are there any oil palm farmer groups / cooperatives in this village? 1. Yes 2. No
10. Can the oil palm plantation be traded? 1. Yes 2. No
11. If yes, what are the rules and who (local institutions) govern them?
12. Is this village a palm oil concession area? 1. Yes 2. No
13. If yes, does villages and communities involved in the process of developing oil palm plantations? 1. Yes 2. No
14. How does the process of land acquisition for plasma oil palm plantations? (land compensation process, determination of plasma area)
15. How does the relationship between plasma smallholders and the company?
16. Is there a conflict with the company? 1. Yes 2. No
17. If yes, explain what the conflict is like and the main cause of the conflict

18. How do people meet their traditional / basic needs such as hunting, looking for fruits, etc. after most of their land is converted to oil palm?

E. FIRE USE

1. Are there values of tradition that are still alive in slash and burn activities? (Yes/ No)
2. What is the community's tradition of burning?
3. What traditions are still alive until now, and how these traditions adapt to changing land conditions
4. If there are sanctions, please specify?

F. LAND FIRE

1) Most of the fires are caused by independent or corporate palm oil. Please explain :
2) Is it true that most of the oil palm corporations do not carried out land clearing by slash and burn system? Please explain:

G. ISPO/RSPO and HCV UNDERSTANDING

1. Has the village heard of the term ISPO / RSPO? (Yes/ No). If yes, please explain:
2. Does the village know about High Conservation Value (HCV)? if Yes, please explain about HCV:
3. According to the village, has the palm oil corporation allocated HCV areas? please explain:

H. LAND CONFLICT

1. Have there been conflicts / disagreements / disputes related to land ownership?
2. If so, what year?
3. If ever, is it inter-ethnic? Or is it between the community and the company? Please explain
4. What is the area of disputed land?
5. How is the solution?
6. What is the causes of conflict?
7. Who is involved?

Lampiran 2. Kuisioner pengumpulan data sawit rakyat

NO: _____

SMALLHOLDER PALM OIL SECTOR STUDY

INTERVIEW GUIDE

HOUSEHOLD OF PALM OIL PLASMA SMALLHOLDER

1. Name of Respondent :
2. Number of family member s :
3. Village Name (permanent address) :
4. Sub District :
5. District/Province :
6. Gender : 1. Male 2. Female
7. Age of Respondents :
8. Position in family : 1. head of family 2. Wife/husband 3. Children 4. Other, please specify ...
9. Respondent Status : 1. Married 2. Divorced 3. Not married
10. Tribe : 1. Dayak 2. Malay 3. Other, please specify ...
11. Last education :
12. Migration Status : A. Born in this village B. Migration from outside of the village
13. The Main Job :
14. Side Job :
15. Year moved to this village :
16. Place of Origin (Sub-District & Province):
17. Reasons for Migration / Transmigration
    a. Stimulus Factor :
    b. Attractor Factor :
18. Phone Number / Respondent's Cell :
19. Interview Date :
20. Interview Hours (start - finish) : :
21. Interviewer's name :

Completeness interview checklist

	Approval Form / Consent
	Voice Recorder
	Observation Note
	Photo

Guide In-depth Interview Plasma Oil Palm smallholder
© TROPENBOS INDONESIA 2018
1

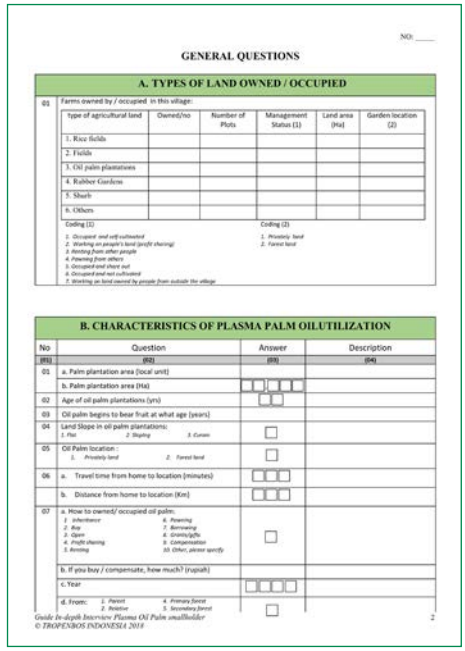

NO: _____

GENERAL QUESTIONS

A. TYPES OF LAND OWNED / OCCUPIED

01 Farms owned by / occupied in this village:

type of agricultural land	Owned/no	Number of Plots	Management Status (1)	Land area (Ha)	Garden location (2)
1. Rice fields					
2. Fields					
3. Oil palm plantations					
4. Rubber Gardens					
5. Shurb					
6. Others					

Coding (1): *1. Occupied and cultivated; 2. Working on people's land (profit sharing); 3. Renting from other people; 4. Pawning from others; 5. Occupied and share out; 6. Occupied and not cultivated; 7. Working on land owned by people from outside the village*

Coding (2): *1. Privately- land; 2. Forest land*

B. CHARACTERISTICS OF PLASMA PALM OILUTILIZATION

No	Question	Answer	Description
(01)	(02)	(03)	(04)
01	a. Palm plantation area (local unit)		
	b. Palm plantation area (Ha)		
02	Age of oil palm plantations (yrs)		
03	Oil palm begins to bear fruit at what age (years)		
04	Land Slope in oil palm plantations: *1. Flat 2. Sloping 3. Curvain*		
05	Oil Palm location : *1. Privately land 2. Forest land*		
06	a. Travel time from home to location (minutes)		
	b. Distance from home to location (Km)		
07	a. How to owned/ occupied oil palm: *1. Inheritance 2. Buy 3. Open 4. Profit sharing 5. Renting 6. Pawning 7. Borrowing 8. Grants/gifts 9. Compensation 10. Other, please specify*		
	b. If you buy / compensate, how much? (rupiah)		
	c. Year		
	d. From: *1. Parent 2. Relative 4. Primary forest 5. Secondary forest*		

Guide In-depth Interview Plasma Oil Palm smallholder
© TROPENBOS INDONESIA 2018
2

NO: _____

B. CHARACTERISTICS OF PLASMA PALM OILUTILIZATION

No	Question	Answer	Description
(01)	(02)	(03)	(04)
	8. Others 6. Other, please specify		
08	Land use : *(Coding) 1. Oil palm 2. Rubber 3. Fruit garden 4. Other garden 5. Rice fields 6. Fields 7. Shurb 8. Primary forest 9. Secondary forest 10. Other, please specify* — a. Currently:		
	b. Before occupied :		
	c. one year after occupied :		
	d. the last condition before this time		
09	If there is a change in land use from the previous condition (d) to the current one (a), state the reasons: *1. Price is higher / profitable 2. Easy maintenance 3. Following friends/others 4. Other, please specify*		
10	When did it begin to change (Year):		
11	Is this Plasma oil palm plantation certified? *1. Yes 2. No*		

C. MANAGEMENT OF PLASMA OIL PALM PLANTATION

1. Plasma plantation ownership

a. Did the farmer is the land owner before the land was turned into a plasma oil palm plantation by a large company? 1 Yes 2. No

b. Was before becoming a plasma smallholding, this garden is an independent oil palm plantation?

1. Yes 2. No

c. If yes, how is the process of transforming an independent oil palm plantation into a plasma oil palm plantation?

d. How is the process of acquisition by a palm oil company? Please describe

e. If farmers are native to the village, how do they feel before and after converted to plasma oil palm plantations? 1. Happy 2. Not happy 3. Same

2. Involvement in decision making

a. Are farmers involved in decision making in labor resources: 1. Yes 2. No

Guide In-depth Interview Plasma Oil Palm smallholder
© TROPENBOS INDONESIA 2018
3

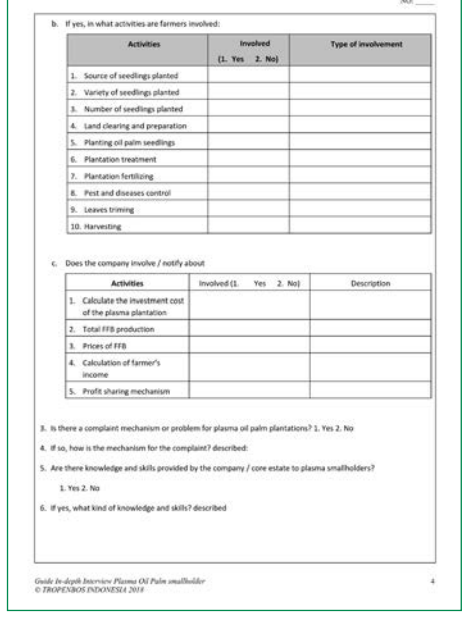

NO: _____

b. If yes, in what activities are farmers involved:

Activities	Involved (1. Yes 2. No)	Type of involvement
1. Source of seedlings planted		
2. Variety of seedlings planted		
3. Number of seedlings planted		
4. Land clearing and preparation		
5. Planting oil palm seedlings		
6. Plantation treatment		
7. Plantation fertilizing		
8. Pest and diseases control		
9. Leaves triming		
10. Harvesting		

c. Does the company involve / notify about

Activities	Involved (1. Yes 2. No)	Description
1. Calculate the investment cost of the plasma plantation		
2. Total FFB production		
3. Prices of FFB		
4. Calculation of farmer's income		
5. Profit sharing mechanism		

3. Is there a complaint mechanism or problem for plasma oil palm plantations? 1. Yes 2. No
4. If so, how is the mechanism for the complaint? described:
5. Are there knowledge and skills provided by the company / core estate to plasma smallholders?

   1. Yes 2. No

6. If yes, what kind of knowledge and skills? described

Guide In-depth Interview Plasma Oil Palm smallholder
© TROPENBOS INDONESIA 2018
4

NO: _____

7. Are the conditions / quality of land (eg slope, flood hazard, fire hazard / conflict with orangutans, fertility) lower than the core estate? (Yes/ No). Described

8. Does the plasma smallholding receive different treatment from the nucleus estate? 1. Yes 2. No

9. Is the smallholder oil palm productivity less than the core estate?

1. Yes 2. No 3. Don't know

10.If yes, how did the smallholders find out about the various differences, mention the cases?

11.Are there any written / oral promises / agreements of the manager of the core estate that have not been fulfilled, mention the cases?

12. Does government assistance exist to facilitate communication between smallholders and companies?? 1. Yes 2. No

13.If yes, explain:

14.Who bears the risk if crop failure or damage occurs?

1. Plasma Farmers 2. Companies 3. Plasma farmers and companies

15.Source of funds for the management of plasma oil palm estates

a. Where are the sources of funds for the management of plasma oil palm plantations (whether own / independent funds or loans), explain, mentions the system / agreement:

b. Whether the agreement is the result of negotiations between core estate involving farmers plasma or one-sided agreement from the core company and the village elite ?

16.Oil Palm seedlings:

a. Where does the source of palm seedlings

1. Own nursery
2. Buy from trader/other farmer
3. Buy from company
4. Provided by company

b. If buying from a company / provided by the company, are farmers involved in determining the type / quality of oil palm seedlings planted? 1. Yes 2. No

c. Do farmers know the variety and quality of oil palm seedlings planted in plasma plantations? 1. Yes 2. No

d. If yes, what is the variety of palm seedlings are planted and how is the quality:

e. Are the types variety and quality of seedlings in smallholdings is simmiliar with core estates?

f. Do smallholders know how much the price of oil palm seedlings planted in their plasma plantations

1. Yes 2. No

g. If yes, what is the price of oil palm seedlings per stem

h. How is the simplicity to obtaining oil palm seedlings ?

i. Are farmers aware if the quality of oil palm seedlings affects the quality of their production

j. Do farmers know the quality of oil palm seedlings planted: 1. Yes 2. No

k. Did in farmers opinion that the seedlings planted in the core estate differ in type / quality from those planted in the plasma plantations: 1. Yes 2. No

l. If yes, which palm seedling is better type / quality:
1. Oil palm seedlings for core estates 2. Oil palm seedlings for plasma plantation

D. LABOR

1. Aside from being a plasma owner, is there a family of plasma farmers who also work as UP palm oil employees?

Laborer	Worked as UP Palm employee (1. Yes 2. No)
a. Head of family / owner of plasma plantation	
b. The couple head of the family	
c. Son	
d. Other family members	

2. If there are UP palm oil employees, in what division? Explain

E. TRAINING AND GUIDANCE

1. Have farmers ever received training or guidance on oil palm? (Yes / No). If ever, please explain:

2. From where the training and coaching?

3. How many times have farmers received training or guidance on oil palm. Please explain

4. Is the training or coaching useful for farmers. Please explain

5. What else is the type of training or guidance that farmers want for the development of independent palm oil management. Explain the type and institution:

F. PRODUKSI TBS KEBUN SAWIT TAHUN 2017/2018

1. Apakah petani mengetahui jumlah hasil produksi TBS kebun plasmanya setiap panen?
1. Ya 2. Tidak
2. Jika Ya, berapa hasil produksi TBS/Ha nya pada tahun setahun terakhir ini?

G. CERTIFICATION

1. Do farmers have heard and understood the purpose of oil palm plantation management certification?
1. Yes 2. No

2. If yes, whether the plasma smallholders plantation have been certified for their management of oil palm plantations
1. Yes 2. No

3. Which certificate?
1. ISPO 2. RSPO

4. Is there a change in management after the farmer's plasma smallholdings are certified
1. Yes 2. No

5. To whom is the certification fee charged?
1. Plasma smallholder 2. Company 3. Smallholder and company

6. If the farmers' oil palm plantations have not been certified, are they interested in certifying of their oil palm plantations management?
1. Yes 2. No

7. If yes, which certificate desired
1. ISPO 2. RSPO

8. What is the hope that farmers desired after their palm oil plantations are certified

H. CONTRIBUTION OF OIL PALM INCOME IN 2017/2018

1. What are the types of farmers' income in the last 1 year (2017/2018):

Income Types	Amount(Rp)	Description
1) Agriculture:		
- Oil palm		
- Rubber		
- Other garden		
2) Other farming		
3) Farm laborers		
4) Remittances		
5) Bussiness		
6) Professional		
7) Other		

2. Has there been any improvement in the farmer's household economy after after becoming a plasma oil palm smallholder, please described

I. HOUSE CONDITIONS IN 2018

1. What is the condition of the farmer's house in 2018

Kualitas Rumah	Coding
a. Lantai *(Coding 1)*	
b. Dinding *(Coding 2)*	
c. Atap *(Coding 3)*	
d. Ukuran bangunan (M^2)	
e. Ukuran luas total (rumah+pekarangan) M^2	

Coding 1:
1. Soil
2. Wood
3. Cement
4. Ceramics

Coding 2:
1. Bamboo
2. Board
3. Brick

Coding 3:
1. Coconut leaves
2. Shingle
3. Zinc / asbestos
4. Roof tiles

TROPENBOS INDONESIA

Alamat Kantor:
Taman Cimanggu, Jalan Akasia I Blok P1 No.6 RT.05/RW.05
Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Bogor, 16163 - Indonesia
Phone: (0251) 8316156
E-mail: tropenbos@tropenbos-indonesia.org